



**BUPATI JEPARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik diperlukan Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20183);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

### Pasal 1

Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### Pasal 2

- (1) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pasal 1 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

### Pasal 3

- (1) Bagan Akun Standar mencakup kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban.

### Pasal 4

Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Bagan Akun Standar dapat diubah atau dikelola/ditambah/dikurangi oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara perubahan Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (3) Klasifikasi program dan kegiatan sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara.

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 382 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 10 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 21 Oktober 2019

Plt. BUPATI JEPARA  
WAKIL BUPATI,

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 53  
53

**BAGAN AKUN**  
**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R i b n y e c i k a n	U R A I A N
0.					PERUBAHAN SAL
0.	1.				PERUBAHAN SAL
0.	1.	1.			Perubahan SAL
0.	1.	1.	01.		Perubahan SAL
0.	1.	1.	01.	001.	Perubahan SAL
0.	2.				TRANSAKSI LAIN-LAIN
0.	2.	1.			PENGEMBALIAN BELANJA
0.	2.	1.	01.		Pengembalian Uang Persediaan
0.	2.	1.	01.	001	Pengembalian Uang Persediaan
0.	2.	1.	02.		Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
0.	2.	1.	02.	001	Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
0.	3.				Transitoris PFK
0.	3.	1.			Penerimaan PFK
0.	3.	1.	01.		Penerimaan PFK Gaji
0.	3.	1.	01.	001	Taspen
0.	3.	1.	01.	002	Askes
0.	3.	1.	01.	003	Taperum
0.	3.	1.	01.	004	PPh Pusat
0.	3.	1.	02.		Penerimaan PFK Non Gaji
0.	3.	1.	02.	001	PPh Pusat
0.	3.	1.	02.	002	PPN Pusat
0.	3.	1.	03.		PFK Lainnya
0.	3.	1.	03.	001	PFK Lainnya
0.	3.	2.			Pengeluaran PFK
0.	3.	2.	01.		Pengeluaran PFK Gaji
0.	3.	2.	01.	001	Taspen
0.	3.	2.	01.	002	Askes
0.	3.	2.	01.	003	Taperum
0.	3.	2.	01.	004	PPh Pusat
0.	3.	2.	02.		Pengeluaran PFK Non Gaji
0.	3.	2.	02.	001	PPh Pusat
0.	3.	2.	02.	002	PPN Pusat
0.	3.	2.	03.		PFK Lainnya
0.	3.	2.	03.	001	PFK Lainnya
0.	4.				MUTASI
0.	4.	1.			Mutasi Masuk
0.	4.	1.	01.		Pencairan Deposito
0.	4.	1.	01.	001	Pencairan Deposito

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
0.	4.	1.	02.		Mutasi antar Rekening
0.	4.	1.	02.	001	Mutasi antar Rekening
0.	4.	2.			Mutasi Keluar
0.	4.	2.	01.		Penempatan Deposito
0.	4.	2.	01.	001	Penempatan Deposito
0.	4.	2.	02.		Mutasi antar Rekening
0.	4.	2.	02.	001	Mutasi antar Rekening
1.					ASET
1.	1.				ASET LANCAR
1.	1.	1.			Kas dan Setara Kas
1.	1.	1.	01.		Kas di Kas Daerah
1.	1.	1.	01.	001	Kas di Kas Daerah
1.	1.	1.	02.		Kas di Bendahara Pengeluaran
1.	1.	1.	02.	001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1.	1.	1.	03.		Kas di Bendahara Penerimaan
1.	1.	1.	03.	001	Kas di Bendahara Penerimaan
1.	1.	1.	04.		Kas di BLUD
1.	1.	1.	04.	001	Kas di BLUD
1.	1.	1.	05.		Kas di Bendahara Lainnya
1.	1.	1.	05.	001	Kas di Bendahara Lainnya
1.	1.	2.			Investasi Jangka Pendek
1.	1.	2.	01.		Investasi Jangka Pendek
1.	1.	2.	01.	001	Investasi Deposito Jangka Pendek
1.	1.	2.	02.		Investasi Surat Perbendaharaan Negara
1.	1.	2.	02.	002	Investasi Surat Perbendaharaan Negara
1.	1.	2.	03.		Investasi Jangka Pendek-BLU
1.	1.	2.	03.	001	Investasi Deposito
1.	1.	2.	03.	002	Investasi Lainnya
1.	1.	3.			Piutang Pendapatan
1.	1.	3.	01.		Piutang Pajak
1.	1.	3.	01.	001	Pendapatan Pajak Hotel
1.	1.	3.	01.	002	Pendapatan Pajak Restoran
1.	1.	3.	01.	003	Pendapatan Pajak Hiburan
1.	1.	3.	01.	004	Pendapatan Pajak Reklame
1.	1.	3.	01.	005	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan
1.	1.	3.	01.	006	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.	1.	3.	01.	007	Pendapatan Pajak Parkir
1.	1.	3.	01.	008	Pendapatan Pajak Air Tanah
1.	1.	3.	01.	009	Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet
1.	1.	3.	01.	010	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1.	1.	3.	01.	011	Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.	1.	3.	02.		Piutang Retribusi
1.	1.	3.	02.	001	Pendapatan Retribusi Jasa Umum
1.	1.	3.	02.	002	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
1.	1.	3.	02.	003	Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b j e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
1.	1.	3.	03.		<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
1.	1.	3.	03.	001	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD
1.	1.	3.	03.	002	Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
1.	1.	3.	03.	003	Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
1.	1.	3.	03.	004	Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman
1.	1.	3.	04.		<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>
1.	1.	3.	04.	001	Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1.	1.	3.	04.	002	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD yang Tidak Dipisahkan
1.	1.	3.	04.	003	Pendapatan Jasa Giro
1.	1.	3.	04.	004	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1.	1.	3.	04.	005	Pendapatan Bunga
1.	1.	3.	04.	006	Pendapatan Dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.	1.	3.	04.	007	Pendapatan Komisi dan Potongan
1.	1.	3.	04.	008	Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
1.	1.	3.	04.	009	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1.	1.	3.	04.	010	Pendapatan Bunga Pajak
1.	1.	3.	04.	011	Pendapatan Denda Pajak
1.	1.	3.	04.	012	Pendapatan Bunga Retribusi
1.	1.	3.	04.	013	Pendapatan Denda Retribusi
1.	1.	3.	04.	014	Pendapatan Denda Lainnya
1.	1.	3.	04.	015	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1.	1.	3.	04.	016	Pendapatan dari Pengembalian
1.	1.	3.	04.	017	Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1.	1.	3.	04.	018	Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1.	1.	3.	04.	019	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1.	1.	3.	04.	020	Pendapatan dari Kompensasi
1.	1.	3.	04.	021	Pendapatan BLUD
1.	1.	3.	04.	022	Pendapatan lainnya
1.	1.	3.	05.		<b>Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>
1.	1.	3.	05.	001	Pendapatan Dana Bagi Hasil
1.	1.	3.	05.	002	Pendapatan Dana Alokasi Umum
1.	1.	3.	05.	003	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik
1.	1.	3.	05.	004	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1.	1.	3.	05.	005	Pendapatan Dana Insentif Daerah
1.	1.	3.	05.	006	Pendapatan Dana Otonomi Khusus
1.	1.	3.	05.	007	Pendapatan Dana Keistimewaan
1.	1.	3.	05.	008	Pendapatan Dana Desa
1.	1.	3.	06.		<b>Pendapatan Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>
1.	1.	3.	06.	001	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1.	1.	3.	06.	002	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Lainnya
1.	1.	3.	06.	003	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Lainnya
1.	1.	3.	06.	004	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.	1.	3.	06.	005	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
1.	1.	3.	06.	006	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lainnya
1.	1.	3.	06.	007	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota Lainnya
1.	1.	4.			<b>Piutang Lainnya</b>
1.	1.	4.	01.		<b>Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang</b>
1.	1.	4.	01.	001	Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1.	1.	4.	01.	002	Piutang Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
1.	1.	4.	01.	003	Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
1.	1.	4.	02.		<b>Piutang Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lain</b>
1.	1.	4.	02.	001	Piutang Pinjaman kepada Perusahaan Negara
1.	1.	4.	02.	002	Piutang Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
1.	1.	4.	02.	003	Piutang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
1.	1.	4.	02.	004	Piutang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1.	1.	4.	02.	005	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
1.	1.	4.	02.	006	Piutang Tuntutan Ganti Rugi
1.	1.	4.	02.	007	Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
1.	1.	4.	02.	008	Piutang BLU Pelayanan Pengelolaan Dana Investasi
1.	1.	4.	02.	009	Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir
1.	1.	4.	02.	010	Piutang BLU Pengelolaan Dana Lainnya
1.	1.	4.	02.	011	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
1.	1.	4.	02.	012	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
1.	1.	5.			<b>Penyisihan Piutang</b>
1.	1.	5.	01.		<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>
1.	1.	5.	01.	001	Penyisihan Piutang Pajak
1.	1.	5.	01.	002	Penyisihan Piutang Retribusi
1.	1.	5.	01.	003	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.	1.	5.	01.	004	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1.	1.	5.	01.	005	Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1.	1.	5.	01.	006	Penyisihan Piutang Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.	1.	5.	01.	007	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1.	1.	5.	01.	008	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Lainnya
1.	1.	5.	01.	009	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Lainnya
1.	1.	5.	01.	010	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Lainnya
1.	1.	5.	01.	011	<b>Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>
1.	1.	5.	01.	012	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lainnya
1.	1.	5.	01.	013	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan dari Kota Lainnya
1.	1.	5.	02.		<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>
1.	1.	5.	02.	001	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1.	1.	5.	02.	002	Penyisihan Piutang Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lain
1.	1.	6.			<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>
1.	1.	6.	01.		<b>Biaya Pegawai Dibayar Dimuka</b>
1.	1.	6.	01.	001	Biaya Pegawai Dibayar Dimuka
1.	1.	6.	02.		<b>Belanja Barang Jasa Dibayar Dimuka</b>
1.	1.	6.	02.	001	Belanja Barang Jasa Dibayar Dimuka
1.	1.	6.	03.		<b>Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka</b>
1.	1.	6.	03.	001	Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
1.	1.	7.			Persediaan
1.	1.	7.	01.		Barang Habis Pakai
1.	1.	7.	01.	001	Bahan
1.	1.	7.	01.	002	Suku Cadang
1.	1.	7.	01.	003	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
1.	1.	7.	01.	004	Obat-obatan
1.	1.	7.	01.	005	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1.	1.	7.	01.	006	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1.	1.	7.	01.	007	Natura dan Pakan
1.	1.	7.	01.	008	Persediaan Penelitian
1.	1.	7.	01.	009	Persediaan Dalam Proses
1.	1.	7.	02.		Barang Tak Habis Pakai
1.	1.	7.	02.	001	Komponen
1.	1.	7.	02.	002	P I P A
1.	1.	7.	03.		Barang Bekas Pakai
1.	1.	7.	03.	001	Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1.	9.	9.			Aset untuk Dikonsolidasikan
1.	9.	9.	01.		R / K SKPD
1.	9.	9.	01.	001	R/K SKPD
1.	9.	9.	01.	002	Persediaan
1.	9.	9.	01.	003	Aset Tetap
1.	2.				INVESTASI JANGKA PANJANG
1.	2.	1.			Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1.	2.	1.	01.		Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1.	2.	1.	01.	001	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
1.	2.	1.	01.	002	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
1.	2.	1.	01.	003	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1.	2.	1.	02.		Investasi dalam Obligasi
1.	2.	1.	02.	001	Investasi dalam Obligasi
1.	2.	1.	03.		Investasi dalam Proyek Pembangunan
1.	2.	1.	03.	001	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1.	2.	1.	04.		Dana Bergulir
1.	2.	1.	04.	001	Dana Bergulir
1.	2.	1.	05.		Investasi Non Permanen Lainnya
1.	2.	1.	05.	001	Investasi Non Permanen Lainnya
1.	2.	2.			Investasi Jangka Panjang Permanen
1.	2.	2.	01.		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
1.	2.	2.	01.	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
1.	2.	2.	02.		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1.	2.	2.	02.	001	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1.	2.	2.	03.		Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1.	2.	2.	03.	001	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1.	2.	2.	04.		Investasi Permanen Lainnya
1.	2.	2.	04.	001	Investasi Permanen Lainnya
1.	3.				ASET TETAP

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k i k a n	R O b i n y e c i k a n	U R A I A N
1.	3.	1.			Tanah
1.	3.	1.	01.		Tanah Persil
1.	3.	1.	01.	001	Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal
1.	3.	1.	01.	002	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan
1.	3.	1.	01.	003	Tanah Untuk Bangunan Industri
1.	3.	1.	01.	004	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja
1.	3.	1.	01.	005	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
1.	3.	1.	01.	006	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1.	3.	1.	01.	007	Tanah Persil Lainnya
1.	3.	1.	02.		Tanah Non Persil
1.	3.	1.	02.	001	Tanah Basah
1.	3.	1.	02.	002	Tanah Kering
1.	3.	1.	02.	003	Tanah Perkebunan
1.	3.	1.	02.	004	Tanah Hutan
1.	3.	1.	02.	005	Tanah Tandus
1.	3.	1.	02.	006	Tanah Padang Alang-alang/Rumput
1.	3.	1.	02.	007	Tanah Pertanian
1.	3.	1.	02.	008	Tanah Pertambangan
1.	3.	1.	02.	009	Tanah Non Persil Lainnya
1.	3.	1.	03.		Tanah Lapangan
1.	3.	1.	03.	001	Tanah Rawa
1.	3.	1.	03.	002	Tanah Lapangan Olah Raga
1.	3.	1.	03.	003	Tanah Lapangan Parkir
1.	3.	1.	03.	004	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
1.	3.	1.	03.	005	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1.	3.	1.	03.	006	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1.	3.	1.	03.	007	Tanah Lapangan Terbang
1.	3.	1.	03.	008	Tanah Untuk Jalan
1.	3.	1.	03.	009	Tanah Untuk Bangunan Air
1.	3.	1.	03.	010	Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1.	3.	1.	03.	011	Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1.	3.	1.	03.	012	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1.	3.	1.	03.	013	Tanah Untuk Makam
1.	3.	1.	03.	014	Tanah Untuk Taman
1.	3.	1.	03.	015	Tanah Untuk Latihan
1.	3.	1.	03.	016	Tanah Daerah Pertahanan
1.	3.	1.	03.	017	Tanah Lapangan PBB
1.	3.	1.	03.	018	Tanah Kampung
1.	3.	1.	03.	019	Emplasment
1.	3.	1.	03.	020	Lapangan Lainnya
1.	3.	1.	04.		Tanah BLUD
1.	3.	1.	04.	001	Tanah BLUD
1.	3.	1.	05.		Tanah BOS
1.	3.	1.	05.	001	Tanah BOS
1.	3.	2.			Peralatan dan Mesin
1.	3.	2.	01.		Alat Besar
1.	3.	2.	01.	001	Alat Besar Darat

# U R A I A N

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b j e k	R o b i n y e e a n	
1.	3.	2.	01.	002	Alat Besar Apung
1.	3.	2.	01.	003	Alat Bantu
1.	3.	2.	02.		Alat Angkutan
1.	3.	2.	02.	001	Alat Angkutan Darat Bermotor
1.	3.	2.	02.	002	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.	3.	2.	02.	003	Alat Angkutan Apung Bermotor
1.	3.	2.	02.	004	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1.	3.	2.	02.	005	Alat Angkutan Udara Bermotor
1.	3.	2.	02.	006	Alat Angkutan Udara Tak Bermotor
1.	3.	2.	03.		Alat Bengkel dan Alat Ukur
1.	3.	2.	03.	001	Alat Bengkel Bermesin
1.	3.	2.	03.	002	Alat Bengkel Tak Bermesin
1.	3.	2.	03.	003	Alat ukur
1.	3.	2.	04.		Alat Pertanian
1.	3.	2.	04.	001	Alat pengolahan tanah dan tanaman
1.	3.	2.	04.	002	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak
1.	3.	2.	04.	003	Alat panen
1.	3.	2.	04.	004	Alat penyimpanan hasil percobaan pertanian
1.	3.	2.	04.	005	Alat laboratorium pertanian
1.	3.	2.	04.	006	Alat prosesing
1.	3.	2.	04.	007	Alat pasca panen
1.	3.	2.	04.	008	Alat produksi perikanan
1.	3.	2.	04.	009	Alat-alat peternakan
1.	3.	2.	04.	010	Alat pengolahan lainnya
1.	3.	2.	05.		Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.	3.	2.	05.	001	Alat Kantor
1.	3.	2.	05.	002	Alat Rumah Tangga
1.	3.	2.	05.	003	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.	3.	2.	06.		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1.	3.	2.	06.	001	Alat Studio
1.	3.	2.	06.	002	Alat Komunikasi
1.	3.	2.	06.	003	Alat Pemancar
1.	3.	2.	06.	004	Peralatan Komunikasi Navigasi
1.	3.	2.	07.		Alat Kedokteran dan Kesehatan
1.	3.	2.	07.	001	Alat Kedokteran
1.	3.	2.	07.	002	Alat Kesehatan Umum
1.	3.	2.	08.		Alat Laboratorium
1.	3.	2.	08.	001	Unit Alat Laboratorium
1.	3.	2.	08.	002	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1.	3.	2.	08.	003	Alat Peraga Sekolah
1.	3.	2.	08.	004	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1.	3.	2.	08.	005	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1.	3.	2.	08.	006	Alat Radiation Application and Non Destructif Testing Laboratory Lainnya
1.	3.	2.	08.	007	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1.	3.	2.	08.	008	Peralatan Laboratorium Hydrdinamica
1.	3.	2.	08.	009	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1.	3.	2.	09.		Persenjataan
1.	3.	2.	09.	001	Senjata Api
1.	3.	2.	09.	002	Persenjataan Non Senjata Api

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b j e k t i f i k a n	R o y a l	U R A I A N
1.	3.	2.	09.	003	Senjata Sinar
1.	3.	2.	09.	004	Alat Khusus Kepolisian
1.	3.	2.	10.		<b>Komputer</b>
1.	3.	2.	10.	001	Komputer Unit
1.	3.	2.	10.	002	Peralatan Komputer
1.	3.	2.	11.		<b>Alat Eksplorasi</b>
1.	3.	2.	11.	001	Alat Eksplorasi Topografi
1.	3.	2.	11.	002	Alat Eksplorasi Geofisika
1.	3.	2.	12.		<b>Alat Pengeboran</b>
1.	3.	2.	12.	001	Alat Pengeboran Mesin
1.	3.	2.	12.	002	Alat Pengeboran Non Mesin
1.	3.	2.	13.		<b>Alat Pengeboran Non Mesin</b>
1.	3.	2.	13.	001	Alat Sumur
1.	3.	2.	13.	002	Alat Produksi
1.	3.	2.	13.	003	Alat Pengolahan dan Pemurnian
1.	3.	2.	14.		<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>
1.	3.	2.	14.	001	Alat Bantu Eksplorasi
1.	3.	2.	14.	002	Alat Bantu Produksi
1.	3.	2.	15.		<b>Alat Keselamatan Kerja</b>
1.	3.	2.	15.	001	Alat Deteksi
1.	3.	2.	15.	002	Alat Pelindung
1.	3.	2.	15.	003	Alat SAR
1.	3.	2.	15.	004	Alat Kerja Penerbangan
1.	3.	2.	16.		<b>Alat Peraga</b>
1.	3.	2.	16.	001	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1.	3.	2.	17.		<b>Peralatan Proses/Produksi</b>
1.	3.	2.	17.	001	Unit Peralatan Proses/Produksi
1.	3.	2.	18.		<b>Rambu-Rambu</b>
1.	3.	2.	18.	001	Rambu-Rambu Lalu lintas Darat
1.	3.	2.	18.	002	Rambu-Rambu Lalu lintas Udara
1.	3.	2.	18.	003	Rambu-Rambu Lalu lintas Air
1.	3.	2.	19.		<b>Peralatan Olah Raga</b>
1.	3.	2.	19.	001	Peralatan Olah Raga
1.	3.	3.			<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
1.	3.	3.	01.		Bangunan Gedung
1.	3.	3.	01.	001	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.	3.	3.	01.	002	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1.	3.	3.	02.		Monumen
1.	3.	3.	02.	001	Candi
1.	3.	3.	02.	002	Tugu Peringatan
1.	3.	3.	02.	003	Prasasti
1.	3.	3.	02.	004	Monumen Lainnya
1.	3.	3.	03.		Bangunan Menara
1.	3.	3.	03.	001	Bangunan Menara
1.	3.	3.	04.		Tugu Titik Kontrol/Pasti
1.	3.	3.	04.	001	Tugu/Tanda Batas
1.	3.	4.			<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>
1.	3.	4.	01.		Jalan dan Jembatan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e k i k a n	U R A I A N
1.	3.	4.	01.	001	Jalan
1.	3.	4.	01.	002	Jembatan
1.	3.	4.	02.		Bangunan Air
1.	3.	4.	02.	001	Bangunan Air Irigasi
1.	3.	4.	02.	002	Bangunan Air Pasang Surut
1.	3.	4.	02.	003	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1.	3.	4.	02.	004	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penganggulangan Bencana Alam
1.	3.	4.	02.	005	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1.	3.	4.	02.	006	Bangunan Air Bersih/Air Baku
1.	3.	4.	02.	007	Bangunan Air Kotor
1.	3.	4.	03.		Instalasi
1.	3.	4.	03.	001	Instalasi Air Bersih/Air Baku
1.	3.	4.	03.	002	Instalasi Air Kotor
1.	3.	4.	03.	003	Instalasi Pengolahan Sampah
1.	3.	4.	03.	004	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1.	3.	4.	03.	005	Instalasi Pembangkit Listrik
1.	3.	4.	03.	006	Instalasi Gardu Listrik
1.	3.	4.	03.	007	Instalasi Pertahanan
1.	3.	4.	03.	008	Instalasi Gas
1.	3.	4.	03.	009	Instalasi Pengaman
1.	3.	4.	03.	010	Instalasi Lainnya
1.	3.	4.	04.		Jaringan
1.	3.	4.	04.	001	Jaringan Air Minum
1.	3.	4.	04.	002	Jaringan Listrik
1.	3.	4.	04.	003	Jaringan Telepon
1.	3.	4.	04.	004	Jaringan Gas
1.	3.	5.			<b>Aset Tetap Lainnya</b>
1.	3.	5.	01.		<b>Bahan Perpustakaan</b>
1.	3.	5.	01.	001	Bahan Perpustakaan Tercetak
1.	3.	5.	01.	002	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1.	3.	5.	01.	003	Kartografi, Naskah dan Lukisan
1.	3.	5.	01.	004	Musik
1.	3.	5.	01.	005	Karya Grafika
1.	3.	5.	02.		<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga</b>
1.	3.	5.	02.	001	Barang Bercorak Kesenian
1.	3.	5.	02.	002	Alat Bercorak Kebudayaan
1.	3.	5.	02.	003	Tanda Penghargaan
1.	3.	5.	03.		<b>Hewan</b>
1.	3.	5.	03.	001	Hewan Peliharaan
1.	3.	5.	03.	002	Hewan Ternak
1.	3.	5.	03.	003	Hewan Lainnya
1.	3.	5.	03.	004	Biota Perairan
1.	3.	5.	04.		<b>Tanaman</b>
1.	3.	5.	04.	001	Tanaman
1.	3.	5.	05.		<b>Barang Koleksi Non Budaya</b>
1.	3.	5.	05.	001	Barang Koleksi Non Budaya
1.	3.	6.			<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>
1.	3.	6.	01.		<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
1.	3.	6.	01.	001	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.	3.	7.			<b>Akumulasi Penyusutan</b>
1.	3.	7.	01.		<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
1.	3.	7.	01.	001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1.	3.	7.	01.	002	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu
1.	3.	7.	01.	003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Udara Tak Bermotor
1.	3.	7.	01.	004	Akumulasi Penyusutan Alat ukur
1.	3.	7.	01.	005	Akumulasi Penyusutan Alat pengolahan lainnya
1.	3.	7.	01.	006	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.	3.	7.	01.	007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi
1.	3.	7.	01.	008	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum
1.	3.	7.	01.	009	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1.	3.	7.	01.	010	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian
1.	3.	7.	01.	011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
1.	3.	7.	01.	012	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika
1.	3.	7.	01.	013	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin
1.	3.	7.	01.	014	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan dan Pemurnian
1.	3.	7.	01.	015	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
1.	3.	7.	01.	016	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1.	3.	7.	01.	017	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
1.	3.	7.	01.	018	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1.	3.	7.	01.	019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga
1.	3.	7.	02.		<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
1.	3.	7.	02.	001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1.	3.	7.	02.	002	Akumulasi Penyusutan Monumen
1.	3.	7.	02.	003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1.	3.	7.	02.	004	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1.	3.	7.	03.		<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
1.	3.	7.	03.	001	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1.	3.	7.	03.	002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1.	3.	7.	03.	003	Akumulasi Penyusutan Instalasi
1.	3.	7.	03.	004	Akumulasi Penyusutan Jaringan
1.	3.	7.	04.		<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
1.	3.	7.	04.	001	Akumulasi Penyusutan Bahan Perpustakaan
1.	3.	7.	04.	002	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga
1.	3.	7.	04.	003	Akumulasi Penyusutan Hewan
1.	3.	7.	04.	004	Akumulasi Penyusutan Tanaman
1.	3.	7.	04.	005	Akumulasi Penyusutan Barang Koleksi Non Budaya
1.	4.				<b>Dana Cadangan</b>
1.	4.	1.			<b>Dana Cadangan</b>
1.	4.	1.	01.		<b>Dana Cadangan</b>
1.	4.	1.	01.	001	Dana Cadangan
1.	5.				<b>Aset Lainnya</b>
1.	5.	1.			<b>Tagihan Jangka Panjang</b>
1.	5.	1.	01.		<b>Tagihan Penjualan Angsuran</b>
1.	5.	1.	01.	001	Tagihan Angsuran Rumah
1.	5.	1.	01.	002	Tagihan Angsuran Kendaraan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
1.	5.	1.	01.	003	Tagihan Angsuran Lainnya
1.	5.	1.	02.		<b>Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>
1.	5.	1.	02.	001	Pendapatan dari Tuntutan Perbendaharaan
1.	5.	1.	02.	002	Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.	5.	2.			<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>
1.	5.	2.	01.		<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>
1.	5.	2.	01.	001	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.	5.	3.			<b>Aset Tidak Berwujud</b>
1.	5.	3.	01.		<b>Aset Tidak Berwujud</b>
1.	5.	3.	01.	001	Goodwill
1.	5.	3.	01.	002	Lisensi dan Franchise
1.	5.	3.	01.	003	Hak Cipta
1.	5.	3.	01.	004	Hak Paten
1.	5.	3.	01.	005	Software
1.	5.	3.	01.	006	Kajian
1.	5.	3.	01.	007	Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
1.	5.	3.	01.	008	Aset Tidak Berwujud Lainnya
1.	5.	4.			<b>Aset Lain-lain</b>
1.	5.	4.	01.		<b>Aset Lain-lain</b>
1.	5.	4.	01.	001	Aset Lain-lain
1.	5.	5.			<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>
1.	5.	5.	01.		<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>
1.	5.	5.	01.	001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1.	5.	6.			<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>
1.	5.	6.	01.		<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>
1.	5.	6.	01.	001	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
2.					<b>KEWAJIBAN</b>
2.	1.				<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
2.	1.	1.			<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>
2.	1.	1.	01.		<b>Utang Taspen</b>
2.	1.	1.	01.	001	Utang Taspen
2.	1.	1.	02.		<b>Utang Askes</b>
2.	1.	1.	02.	001	Utang Askes
2.	1.	1.	03.		<b>Utang PPh Pusat</b>
2.	1.	1.	03.	001	Utang PPh 21
2.	1.	1.	03.	002	Utang PPh 22
2.	1.	1.	03.	003	Utang PPh 23
2.	1.	1.	03.	004	Utang PPh 25
2.	1.	1.	04.		<b>Utang PPN Pusat</b>
2.	1.	1.	04.	001	Utang PPN Pusat
2.	1.	1.	05.		<b>Utang Taperum</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i b n y e c i k a n	U R A I A N
2.	1.	1.	05.	001	Utang Taperum
2.	1.	1.	06.		Utang PFK Lainnya
2.	1.	1.	06.	001	Utang PFK Lainnya
2.	1.	2.			Utang Bunga
2.	1.	2.	01.		Utang Bunga
2.	1.	2.	01.	001	Utang Bunga kepada Pemerintah
2.	1.	2.	01.	002	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2.	1.	2.	01.	003	Utang Bunga kepada BUMN/BUMD
2.	1.	2.	01.	004	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.	1.	2.	01.	005	Utang Bunga Obligasi
2.	1.	2.	01.	006	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2.	1.	2.	01.	007	Utang Bunga Luar Negeri
2.	1.	3.			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.	1.	3.	01.		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.	1.	3.	01.	001	Bagian Lancar Utang dari Sektor Perbankan
2.	1.	3.	01.	002	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.	1.	3.	01.	003	Bagian Lancar Utang Obligasi
2.	1.	3.	01.	004	Bagian Lancar Utang dari Pemerintah Pusat
2.	1.	3.	01.	005	Bagian Lancar Utang dari Pemerintah Daerah Lainnya
2.	1.	3.	01.	006	Premium (Diskonto) Obligasi
2.	1.	4.			Pendapatan Diterima Dimuka
2.	1.	4.	01.		Kelebihan Pembayaran kepada Pihak III
2.	1.	4.	01.	001	Kelebihan Pembayaran kepada Pihak III
2.	1.	4.	02.		Uang Muka Penjualan
2.	1.	4.	02.	001	Uang Muka Penjualan
2.	1.	4.	03.		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2.	1.	4.	03.	001	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2.	1.	4.	04.		Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
2.	1.	4.	04.	001	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
2.	1.	4.	05.		Pendapatan diterima dimuka atas perjanjian dengan Pihak Ketiga
2.	1.	4.	05.	001	Pendapatan diterima dimuka atas perjanjian dengan Pihak Ketiga
2.	1.	5.			Utang Belanja
2.	1.	5.	01.		Utang Belanja Pegawai
2.	1.	5.	01.	001	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2.	1.	5.	01.	002	Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.	1.	5.	01.	003	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
2.	1.	5.	01.	004	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.	1.	5.	01.	005	Gaji dan Tunjangan DPRD
2.	1.	5.	01.	006	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
2.	1.	5.	01.	007	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
2.	1.	5.	01.	008	Honorarium PNS
2.	1.	5.	01.	009	Honorarium Non PNS
2.	1.	5.	01.	010	Uang Lembur
2.	1.	5.	02.		Utang Belanja Barang dan Jasa
2.	1.	5.	02.	001	Belanja Bahan



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
2.	1.	5.	02.	002	Belanja Suku Cadang
2.	1.	5.	02.	003	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
2.	1.	5.	02.	004	Belanja Obat-obatan
2.	1.	5.	02.	005	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga
2.	1.	5.	02.	006	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.	1.	5.	02.	007	Belanja Barang Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
2.	1.	5.	02.	008	Belanja Natura dan Pakan
2.	1.	5.	02.	009	Belanja Barang Untuk Penelitian
2.	1.	5.	02.	010	Belanja Barang Untuk Proses Produksi
2.	1.	5.	02.	011	Belanja Jasa Kantor
2.	1.	5.	02.	012	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.	1.	5.	02.	013	Belanja Jasa Konsultansi
2.	1.	5.	02.	014	Belanja Premi Asuransi
2.	1.	5.	02.	015	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.	1.	5.	02.	016	Belanja Cetak dan Penggandaan
2.	1.	5.	02.	017	Belanja Sewa
2.	1.	5.	02.	018	Belanja Perjalanan Dinas
2.	1.	5.	02.	019	Belanja Pemulangan Pegawai
2.	1.	5.	02.	020	Belanja Pemeliharaan
2.	1.	5.	02.	021	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
2.	1.	5.	02.	022	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
2.	1.	5.	02.	023	Belanja Pembayaran Jasa PNS
2.	1.	5.	02.	024	Belanja Pembayaran Jasa Non PNS
2.	1.	5.	02.	025	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.	1.	5.	02.	026	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.	1.	5.	02.	027	Belanja Tamu Pemerintah Daerah
2.	1.	5.	02.	028	Belanja Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
2.	1.	5.	02.	029	Belanja Barang dan Jasa BLUD
2.	1.	5.	02.	030	Belanja Barang dan Jasa BOS
2.	1.	5.	02.	031	Belanja Kontribusi Organisasi atau Asosiasi Pemerintah Daerah
2.	1.	5.	03.		<b>Utang Belanja Bunga</b>
2.	1.	5.	03.	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman
2.	1.	5.	03.	002	Belanja Bunga Utang Obligasi
2.	1.	5.	03.	003	Belanja Bunga Utang BLUD
2.	1.	5.	04.		<b>Utang Belanja Subsidi</b>
2.	1.	5.	04.	001	Utang Belanja Subsidi
2.	1.	5.	05.		<b>Utang Belanja Hibah</b>
2.	1.	5.	05.	001	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2.	1.	5.	05.	002	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
2.	1.	5.	05.	003	Utang Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
2.	1.	5.	05.	004	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa
2.	1.	5.	05.	005	Utang Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
2.	1.	5.	05.	006	Utang Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
2.	1.	5.	05.	007	Utang Belanja Bantuan Keuangan untuk Partai Politik
2.	1.	5.	06.		<b>Utang Belanja Transfer</b>
2.	1.	5.	06.	001	Transfer Bagi Hasil Pendapatan
2.	1.	5.	06.	002	Transfer Bantuan Keuangan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R i b n y e c i k a n	U R A I A N
2.	1.	6.			Utang Jangka Pendek Lainnya
2.	1.	6.	01.		Utang Jangka Pendek Lainnya
2.	1.	6.	01.	001	Utang Jangka Pendek Lainnya
2.	2.				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.	2.	1.			Pinjaman Dalam Negeri
2.	2.	1.	01.		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
2.	2.	1.	01.	001	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
2.	2.	1.	02.		Pinjaman Dalam Negeri dari pemerintah daerah lain
2.	2.	1.	02.	001	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah daerah lain
2.	2.	1.	03.		Pinjaman Dalam Negeri dari lembaga keuangan bank
2.	2.	1.	03.	001	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bank
2.	2.	1.	04.		Pinjaman Dalam Negeri dari lembaga keuangan bukan bank
2.	2.	1.	04.	001	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga keuangan bukan bank
2.	2.	1.	05.		Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
2.	2.	1.	05.	001	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
2.	2.	1.	06.		Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
2.	2.	1.	06.	001	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
2.	2.	2.			Utang Luar Negeri
2.	2.	2.	01		Utang Luar Negeri
2.	2.	2.	01	001	Utang Luar Negeri
2.	2.	3.			Utang Jangka Panjang Lainnya
2.	2.	3.	01		Utang Jangka Panjang Lainnya
2.	2.	3.	01	001	Utang Jangka Panjang Lainnya
3.					EKUITAS
3.	1.				EKUITAS
3.	1.	1.			Ekuitas
3.	1.	1.	01.		Ekuitas
3.	1.	1.	01.	001	Ekuitas
3.	1.	2.			Ekuitas SAL
3.	1.	2.	01.		Estimasi Pendapatan
3.	1.	2.	01.	001	Estimasi Pendapatan
3.	1.	2.	02.		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3.	1.	2.	02.	001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3.	1.	2.	03.		Apropriasi Belanja
3.	1.	2.	03.	001	Apropriasi Belanja
3.	1.	2.	04.		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3.	1.	2.	04.	001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3.	1.	3.			Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3.	1.	3.	01.		R/K PPKD
3.	1.	3.	01.	001	R/K PPKD
4.					PENDAPATAN
4.	1.				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
4.	1.	1.			<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>
4.	1.	1.	01.		<b>Pendapatan Pajak Hotel</b>
4.	1.	1.	01.	001	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima Berlian
4.	1.	1.	01.	002	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima
4.	1.	1.	01.	003	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Empat
4.	1.	1.	01.	004	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga
4.	1.	1.	01.	005	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua
4.	1.	1.	01.	006	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu
4.	1.	1.	01.	007	Pendapatan Pajak Hotel Melati
4.	1.	1.	01.	008	Pendapatan Pajak Motel
4.	1.	1.	01.	009	Pendapatan Pajak Losmen
4.	1.	1.	01.	010	Pendapatan Pajak Gubug Pariwisata
4.	1.	1.	01.	011	Pendapatan Pajak Wisma Pariwisata
4.	1.	1.	01.	012	Pendapatan Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
4.	1.	1.	01.	013	Pendapatan Pajak Rumah Kos
4.	1.	1.	01.	014	Pendapatan Pajak Cottage
4.	1.	1.	01.	015	Pendapatan Pajak Pesanggrahan/ Hostel
4.	1.	1.	02.		<b>Pendapatan Pajak Restoran</b>
4.	1.	1.	02.	001	Pendapatan Pajak Restoran
4.	1.	1.	02.	002	Pendapatan Pajak Rumah Makan
4.	1.	1.	02.	003	Pendapatan Pajak Kafetaria
4.	1.	1.	02.	004	Pendapatan Pajak Kantin
4.	1.	1.	02.	005	Pendapatan Pajak Jasa Boga/Katering
4.	1.	1.	02.	006	Pendapatan Pajak Warung
4.	1.	1.	02.	007	Pendapatan Pajak Bar
4.	1.	1.	03.		<b>Pendapatan Pajak Hiburan</b>
4.	1.	1.	03.	001	Pendapatan Pajak Tontonan Film
4.	1.	1.	03.	002	Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
4.	1.	1.	03.	003	Pendapatan Pajak Kontes Kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya
4.	1.	1.	03.	004	Pendapatan Pajak Pameran
4.	1.	1.	03.	005	Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya
4.	1.	1.	03.	006	Pendapatan Pajak Sirkus, Akrobat dan Sulap
4.	1.	1.	03.	007	Pendapatan Pajak Permainan Bilyar, Golf dan Bowling
4.	1.	1.	03.	008	Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan
4.	1.	1.	03.	009	Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
4.	1.	1.	03.	010	Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga
4.	1.	1.	04.		<b>Pendapatan Pajak Reklame</b>
4.	1.	1.	04.	001	Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya
4.	1.	1.	04.	002	Pendapatan Pajak Reklame Kain
4.	1.	1.	04.	003	Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker
4.	1.	1.	04.	004	Pendapatan Pajak Reklame Selebaran
4.	1.	1.	04.	005	Pendapatan Pajak Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan
4.	1.	1.	04.	006	Pendapatan Pajak Reklame Udara

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
4.	1.	1.	04.	007	Pendapatan Pajak Reklame Apung
4.	1.	1.	04.	008	Pendapatan Pajak Reklame Suara
4.	1.	1.	04.	009	Pendapatan Pajak Reklame Film/ Slide
4.	1.	1.	04.	010	Pendapatan Pajak Reklame Peragaan
4.	1.	1.	05.		<b>Pendapatan Pajak Penerangan Jalan</b>
4.	1.	1.	05.	001	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan
4.	1.	1.	06.		<b>Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>
4.	1.	1.	06.	001	Pendapatan Pajak Asbes
4.	1.	1.	06.	002	Pendapatan Pajak Batu Tulis
4.	1.	1.	06.	003	Pendapatan Pajak Batu Setengah Permata
4.	1.	1.	06.	004	Pendapatan Pajak Batu Kapur
4.	1.	1.	06.	005	Pendapatan Pajak Batu Apung
4.	1.	1.	06.	006	Pendapatan Pajak Batu Permata
4.	1.	1.	06.	007	Pendapatan Pajak Bentonit
4.	1.	1.	06.	008	Pendapatan Pajak Dolomit
4.	1.	1.	06.	009	Pendapatan Pajak Feldspar
4.	1.	1.	06.	010	Pendapatan Pajak Garam Batu (halite)
4.	1.	1.	06.	011	Pendapatan Pajak Grafit
4.	1.	1.	06.	012	Pendapatan Pajak Granit/Andesit
4.	1.	1.	06.	013	Pendapatan Pajak Gips
4.	1.	1.	06.	014	Pendapatan Pajak Kalsit
4.	1.	1.	06.	015	Pendapatan Pajak Kaolin
4.	1.	1.	06.	016	Pendapatan Pajak Leusit
4.	1.	1.	06.	017	Pendapatan Pajak Magnesit
4.	1.	1.	06.	018	Pendapatan Pajak Mika
4.	1.	1.	06.	019	Pendapatan Pajak Marmer
4.	1.	1.	06.	020	Pendapatan Pajak Nitrat
4.	1.	1.	06.	021	Pendapatan Pajak Opsidien
4.	1.	1.	06.	022	Pendapatan Pajak Oker
4.	1.	1.	06.	023	Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil
4.	1.	1.	06.	024	Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa
4.	1.	1.	06.	025	Pendapatan Pajak Perlit
4.	1.	1.	06.	026	Pendapatan Pajak Phospat
4.	1.	1.	06.	027	Pendapatan Pajak Talk
4.	1.	1.	06.	028	Pendapatan Pajak Tanah Serap (fullers earth)
4.	1.	1.	06.	029	Pendapatan Pajak Tanah Diatome
4.	1.	1.	06.	030	Pendapatan Pajak Tanah Liat
4.	1.	1.	06.	031	Pendapatan Pajak Tawas (alum)
4.	1.	1.	06.	032	Pendapatan Pajak Tras
4.	1.	1.	06.	033	Pendapatan Pajak Yarosif
4.	1.	1.	06.	034	Pendapatan Pajak Zeolit
4.	1.	1.	06.	035	Pendapatan Pajak Basal
4.	1.	1.	06.	036	Pendapatan Pajak Trakkit
4.	1.	1.	06.	037	Pendapatan Pajak Tanah Urug
4.	1.	1.	06.	038	Pendapatan Pajak Andesit
4.	1.	1.	06.	039	Mineral bukan logam dan lainnya
4.	1.	1.	07.		<b>Pendapatan Pajak Parkir</b>
4.	1.	1.	07.	001	Pendapatan Pajak Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Luar Badan Jalan dan Penitipan Kendaraan Bermotor

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
4.	1.	1.	08.		<b>Pendapatan Pajak Air Tanah</b>
4.	1.	1.	08.	001	Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
4.	1.	1.	09.		<b>Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet</b>
4.	1.	1.	09.	001	Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet
4.	1.	1.	10.		<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>
4.	1.	1.	10.	001	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.	1.	1.	11.		<b>Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>
4.	1.	1.	11.	001	Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.	1.	1.	11.	002	Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Baru Atas Tanah dan Bangunan
4.	1.	2.			<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>
4.	1.	2.	01.		<b>Pendapatan Retribusi Jasa Umum</b>
4.	1.	2.	01.	001	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.	1.	2.	01.	002	Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4.	1.	2.	01.	003	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.	1.	2.	01.	004	Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.	1.	2.	01.	005	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
4.	1.	2.	01.	006	Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.	1.	2.	01.	007	Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.	1.	2.	01.	008	Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.	1.	2.	01.	009	Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.	1.	2.	01.	010	Pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.	1.	2.	01.	011	Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.	1.	2.	01.	012	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.	1.	2.	01.	013	Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.	1.	2.	02.		<b>Pendapatan Retribusi Jasa Usaha</b>
4.	1.	2.	02.	001	Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.	1.	2.	02.	002	Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4.	1.	2.	02.	003	Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan
4.	1.	2.	02.	004	Pendapatan Retribusi Terminal
4.	1.	2.	02.	005	Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.	1.	2.	02.	006	Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
4.	1.	2.	02.	007	Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan
4.	1.	2.	02.	008	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.	1.	2.	02.	009	Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.	1.	2.	02.	010	Pendapatan Retribusi Penyeberangan di Air
4.	1.	2.	02.	011	Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.	1.	2.	03.		<b>Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu</b>
4.	1.	2.	03.	001	Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
4.	1.	2.	03.	002	Pendapatan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.	1.	2.	03.	003	Pendapatan Retribusi Ijin Trayek
4.	1.	2.	03.	004	Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan
4.	1.	2.	03.	005	Pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
4.	1.	3.			<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
4.	1.	3.	01.		<b>Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD</b>
4.	1.	3.	01.	001	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng
4.	1.	3.	01.	002	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha
4.	1.	3.	01.	003	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara
4.	1.	3.	01.	004	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha
4.	1.	3.	01.	005	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Jepara
4.	1.	3.	02.		<b>Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN</b>
4.	1.	3.	02.	001	Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN
4.	1.	3.	03.		<b>Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta</b>
4.	1.	3.	03.	001	Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
4.	1.	3.	04.		<b>Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman</b>
4.	1.	3.	04.	001	Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman
4.	1.	4.			<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>
4.	1.	4.	01.		<b>Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>
4.	1.	4.	01.	001	Hasil Penjualan Tanah
4.	1.	4.	01.	002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4.	1.	4.	01.	003	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4.	1.	4.	01.	004	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
4.	1.	4.	01.	005	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4.	1.	4.	01.	006	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4.	1.	4.	02.		<b>Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>
4.	1.	4.	02.	001	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD Sewa
4.	1.	4.	02.	002	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD Kerjasama
4.	1.	4.	02.	003	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD Bangun Guna Serah (BGS)/Build Operate Transfer (BOT)
4.	1.	4.	02.	004	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD Bangun Serah Guna (BSG)/Build Transfer Operate (BTO)
4.	1.	4.	03.		<b>Pendapatan Jasa Giro</b>
4.	1.	4.	03.	001	Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah
4.	1.	4.	03.	002	Pendapatan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran
4.	1.	4.	03.	003	Pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan
4.	1.	4.	04.		<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>
4.	1.	4.	04.	001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
4.	1.	4.	05.		<b>Pendapatan Bunga</b>
4.	1.	4.	05.	001	Pendapatan Bunga Deposito
4.	1.	4.	05.	002	Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman
4.	1.	4.	05.	003	Pendapatan Bunga Lainnya
4.	1.	4.	06.		<b>Pendapatan Dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>
4.	1.	4.	06.	001	Pendapatan dari Tuntutan Perbendaharaan
4.	1.	4.	06.	002	Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.	1.	4.	07.		<b>Pendapatan Komisi dan Potongan</b>
4.	1.	4.	07.	001	Pendapatan Komisi
4.	1.	4.	07.	002	Pendapatan Potongan
4.	1.	4.	08.		<b>Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing</b>
4.	1.	4.	08.	001	Pendapatan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.	1.	4.	09.		<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>
4.	1.	4.	09.	001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.	1.	4.	10.		<b>Pendapatan Bunga Pajak</b>
4.	1.	4.	10.	001	Pendapatan Bunga Pajak Hotel
4.	1.	4.	10.	002	Pendapatan Bunga Pajak Restoran
4.	1.	4.	10.	003	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan
4.	1.	4.	10.	004	Pendapatan Bunga Pajak Reklame
4.	1.	4.	10.	005	Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan
4.	1.	4.	10.	006	Pendapatan Bunga Pajak Parkir
4.	1.	4.	10.	007	Pendapatan Bunga Pajak Air Bawah Tanah
4.	1.	4.	10.	008	Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet
4.	1.	4.	10.	009	Pendapatan Bunga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.	1.	4.	10.	010	Pendapatan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.	1.	4.	10.	011	Pendapatan Bunga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.	1.	4.	11.		<b>Pendapatan Denda Pajak</b>
4.	1.	4.	11.	001	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.	1.	4.	11.	002	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.	1.	4.	11.	003	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.	1.	4.	11.	004	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.	1.	4.	11.	005	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.	1.	4.	11.	006	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.	1.	4.	11.	007	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4.	1.	4.	11.	008	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.	1.	4.	11.	009	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.	1.	4.	11.	010	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.	1.	4.	11.	011	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.	1.	4.	12.		<b>Pendapatan Bunga Retribusi</b>
4.	1.	4.	12.	001	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum
4.	1.	4.	12.	002	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha
4.	1.	4.	12.	003	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu
4.	1.	4.	13.		<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>
4.	1.	4.	13.	001	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.	1.	4.	13.	002	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.	1.	4.	13.	003	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
4.	1.	4.	14		<b>Pendapatan Denda Lainnya</b>
4.	1.	4.	14	001	Pendapatan Denda Pelanggaran Peraturan Daerah
4.	1.	4.	14	002	Pendapatan Denda Sewa
4.	1.	4.	14	003	Pendapatan Denda Kerjasama
4.	1.	4.	14	004	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah (BGS)/Build Operate Transfer (BOT)
4.	1.	4.	14	005	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna (BSG)/Build Transfer Operate (BTO)
4.	1.	4.	15		<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>
4.	1.	4.	15	001	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.	1.	4.	15	002	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.	1.	4.	15	003	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4.	1.	4.	16		<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>
4.	1.	4.	16	001	Pendapatan dari Pengembalian PPh 21 tahun sebelumnya
4.	1.	4.	16	002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Daerah tahun sebelumnya
4.	1.	4.	16	003	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya
4.	1.	4.	17		<b>Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>
4.	1.	4.	17	001	Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.	1.	4.	18		<b>Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>
4.	1.	4.	18	001	Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4.	1.	4.	19		<b>Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan</b>
4.	1.	4.	19	001	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah
4.	1.	4.	19	002	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan
4.	1.	4.	19	003	Angsuran/Cicilan Penjualan Kios/Pasar
4.	1.	4.	20		<b>Pendapatan dari Kompensasi</b>
4.	1.	4.	20	001	Pendapatan dari Kompensasi
4.	1.	4.	21		<b>Pendapatan BLUD</b>
4.	1.	4.	21	001	Pendapatan BLUD RSUD RA Kartini
4.	1.	4.	21	002	Pendapatan BLUD Puskesmas
4.	1.	4.	22		<b>Pendapatan lainnya</b>
4.	1.	4.	22	001	Pendapatan lainnya
4.	2.				<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>
4.	2.	1.			<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>
4.	2.	1.	01.		<b>Pendapatan Dana Bagi Hasil</b>
4.	2.	1.	01.	001	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.	2.	1.	01.	002	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4.	2.	1.	01.	003	Pendapatan Bagi Hasil dari Cukai
4.	2.	1.	01.	004	Pendapatan Bagi Hasil dari SDA
4.	2.	1.	02.		<b>Pendapatan Dana Alokasi Umum</b>
4.	2.	1.	02.	001	Pendapatan Dana Alokasi Umum
4.	2.	1.	02.	002	Pendapatan Dana Alokasi Umum Tambahan
4.	2.	1.	03.		<b>Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik</b>
4.	2.	1.	03.	001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan
4.	2.	1.	03.	002	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
4.	2.	1.	03.	003	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Air Minum
4.	2.	1.	03.	004	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Sanitasi
4.	2.	1.	03.	005	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman
4.	2.	1.	03.	006	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Jalan
4.	2.	1.	03.	007	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Sosial
4.	2.	1.	03.	008	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pendidikan
4.	2.	1.	03.	009	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Kesehatan
4.	2.	1.	03.	010	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Air Minum
4.	2.	1.	03.	011	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Sanitasi
4.	2.	1.	03.	012	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi
4.	2.	1.	03.	013	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian
4.	2.	1.	03.	014	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan
4.	2.	1.	03.	015	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pasar
4.	2.	1.	03.	016	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah
4.	2.	1.	03.	017	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Transportasi Laut
4.	2.	1.	03.	018	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan
4.	2.	1.	03.	019	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Perumahan dan Permukiman
4.	2.	1.	03.	020	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pariwisata
4.	2.	1.	03.	021	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	2.	1.	03.	022	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan
4.	2.	1.	03.	023	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan
4.	2.	1.	03.	024	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman
4.	2.	1.	03.	025	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Air Minum
4.	2.	1.	03.	026	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Sanitasi
4.	2.	1.	03.	027	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Laut
4.	2.	1.	03.	028	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan
4.	2.	1.	04.		<b>Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>
4.	2.	1.	04.	001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
4.	2.	1.	04.	002	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru
4.	2.	1.	04.	003	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru
4.	2.	1.	04.	004	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
4.	2.	1.	04.	005	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas
4.	2.	1.	04.	006	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan
4.	2.	1.	04.	007	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB
4.	2.	1.	04.	008	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Khusus Guru
4.	2.	1.	04.	009	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
4.	2.	1.	04.	010	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i n y e c i k a n	U R A I A N
4.	2.	1.	04.	011	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum
4.	2.	1.	04.	012	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
4.	2.	1.	04.	013	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata
4.	2.	1.	05.		<b>Pendapatan Dana Insentif Daerah</b>
4.	2.	1.	05.	001	Pendapatan Dana Insentif Daerah
4.	2.	1.	06.		<b>Pendapatan Dana Otonomi Khusus</b>
4.	2.	1.	06.	001	Pendapatan Dana Otonomi Khusus
4.	2.	1.	07.		<b>Pendapatan Dana Keistimewaan</b>
4.	2.	1.	07.	001	Pendapatan Dana Keistimewaan
4.	2.	1.	08.		<b>Pendapatan Dana Desa</b>
4.	2.	1.	08.	001	Pendapatan Dana Desa
4.	2.	2.			<b>Pendapatan Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>
4.	2.	2.	01.		<b>Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>
4.	2.	2.	01.	001	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.	2.	2.	01.	002	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.	2.	2.	01.	003	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	2.	2.	01.	004	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.	2.	2.	01.	005	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.	2.	2.	02.		<b>Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Lainnya</b>
4.	2.	2.	02.	001	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Lainnya
4.	2.	2.	03.		<b>Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Lainnya</b>
4.	2.	2.	03.	001	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Lainnya
4.	2.	2.	04.		<b>Pendapatan Bagi Hasil Lainnya</b>
4.	2.	2.	04.	001	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
4.	2.	2.	05.		<b>Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>
4.	2.	2.	05.	001	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi
4.	2.	2.	06.		<b>Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lainnya</b>
4.	2.	2.	06.	001	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lainnya
4.	2.	2.	07.		<b>Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota Lainnya</b>
4.	2.	2.	07.	001	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota Lainnya
4.	3.				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>
4.	3.	1.			<b>Pendapatan Hibah</b>
4.	3.	1.	01.		<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>
4.	3.	1.	01.	001	Pendapatan Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah
4.	3.	1.	01.	002	Pendapatan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat
4.	3.	1.	01.	003	Pendapatan Dana BOS
4.	3.	1.	02.		<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya</b>
4.	3.	1.	02.	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4.	3.	1.	03.		<b>Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan</b>
4.	3.	1.	03.	001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4.	3.	1.	04.		<b>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c e k i k a n	U R A I A N
4.	3.	1.	04.	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga dalam Negeri
4.	3.	1.	04.	002	Pendapatan Hibah dari Organisasi Swasta dalam Negeri
4.	3.	1.	05.		<b>Pendapatan Hibah dari Luar Negeri</b>
4.	3.	1.	05.	001	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.	3.	1.	05.	002	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.	3.	1.	05.	003	Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya
4.	3	2.			<b>Pendapatan Dana Darurat</b>
4.	3	2.	01.		<b>Pendapatan Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam</b>
4.	3	2.	01.	001	Pendapatan Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.	3.	3			<b>Pendapatan Lainnya</b>
4.	3.	3.	01.		<b>Pendapatan Lainnya</b>
4.	3.	3.	01.	001	Pendapatan Lainnya
5.					<b>BELANJA</b>
5.	1.				<b>BELANJA OPERASI</b>
5.	1.	1.			<b>Belanja Pegawai</b>
5.	1.	1.	01.		<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>
5.	1.	1.	01.	001	Gaji Pokok ASN
5.	1.	1.	01.	002	Tunjangan Keluarga ASN
5.	1.	1.	01.	003	Tunjangan Jabatan ASN
5.	1.	1.	01.	004	Tunjangan Fungsional ASN
5.	1.	1.	01.	005	Tunjangan Fungsional Umum ASN
5.	1.	1.	01.	006	Tunjangan Beras ASN
5.	1.	1.	01.	007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5.	1.	1.	01.	008	Pembulatan Gaji ASN
5.	1.	1.	01.	009	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN
5.	1.	1.	01.	010	Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5.	1.	1.	01.	011	Jaminan Kematian ASN
5.	1.	1.	01.	012	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD
5.	1.	1.	01.	013	Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD
5.	1.	1.	01.	014	Belanja Tunjangan Pengamanan Persandian
5.	1.	1.	01.	015	Belanja Tunjangan Khusus Guru
5.	1.	1.	02.		<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>
5.	1.	1.	02.	001	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.	1.	1.	02.	002	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5.	1.	1.	02.	003	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.	1.	1.	02.	004	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.	1.	1.	02.	005	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5.	1.	1.	02.	006	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
5.	1.	1.	03.		<b>Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>
5.	1.	1.	03.	001	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Hotel
5.	1.	1.	03.	002	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Restoran
5.	1.	1.	03.	003	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Hiburan
5.	1.	1.	03.	004	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Reklame
5.	1.	1.	03.	005	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
5.	1.	1.	03.	006	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Parkir
5.	1.	1.	03.	007	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah
5.	1.	1.	03.	008	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5.	1.	1.	03.	009	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5.	1.	1.	03.	010	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5.	1.	1.	03.	011	Belanja Insentif Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5.	1.	1.	04.		<b>Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>
5.	1.	1.	04.	001	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum
5.	1.	1.	04.	002	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha
5.	1.	1.	04.	003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu
5.	1.	1.	05.		<b>Gaji dan Tunjangan DPRD</b>
5.	1.	1.	05.	001	Uang Representasi DPRD
5.	1.	1.	05.	002	Tunjangan Keluarga DPRD
5.	1.	1.	05.	003	Tunjangan Beras DPRD
5.	1.	1.	05.	004	Uang Paket DPRD
5.	1.	1.	05.	005	Tunjangan Jabatan DPRD
5.	1.	1.	05.	006	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5.	1.	1.	05.	007	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Lainnya
5.	1.	1.	05.	008	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DPRD
5.	1.	1.	05.	009	Iuran Premi Asuransi Kesehatan DPRD
5.	1.	1.	05.	010	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
5.	1.	1.	05.	011	Iuran Jaminan Kematian DPRD
5.	1.	1.	05.	012	Tunjangan Perumahan DPRD
5.	1.	1.	05.	013	Uang Jasa Pengabdian DPRD
5.	1.	1.	06.		<b>Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>
5.	1.	1.	06.	001	Gaji Pokok KDH/WKDH
5.	1.	1.	06.	002	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5.	1.	1.	06.	003	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5.	1.	1.	06.	004	Tunjangan Beras KDH/WKDH
5.	1.	1.	06.	005	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5.	1.	1.	06.	006	Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5.	1.	1.	06.	007	Iuran Premi Asuransi Kesehatan KDH/WKDH
5.	1.	1.	06.	008	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5.	1.	1.	06.	009	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5.	1.	1.	07.		<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>
5.	1.	1.	07.	001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.	1.	1.	07.	002	Belanja Operasional KDH/WKDH
5.	1.	1.	07.	003	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5.	1.	1.	07.	004	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5.	1.	1.	07.	005	Belanja Tunjangan Reses DPRD
5.	1.	1.	08.		<b>Honorarium PNS</b>
5.	1.	1.	08.	001	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
5.	1.	1.	08.	002	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.	1.	1.	08.	003	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
5.	1.	1.	09.		Honorarium Non PNS
5.	1.	1.	09.	001	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS
5.	1.	1.	10.		Uang Lembur
5.	1.	1.	10.	001	Belanja Uang Lembur PNS
5.	1.	1.	10.	002	Belanja Uang Lembur Non PNS
5.	1.	1.	11.		Belanja Pegawai Dana BOS
5.	1.	1.	11.	001	Belanja Pegawai Dana BOS
5.	1.	1.	12		Belanja Pegawai BLUD
5.	1.	1.	12	001	Belanja Pegawai BLUD
5.	1.	2.			Belanja Barang dan Jasa
5.	1.	2.	01.		Belanja Bahan
5.	1.	2.	01.	001	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi
5.	1.	2.	01.	002	Belanja Bahan Kimia
5.	1.	2.	01.	003	Belanja Bahan Peledak
5.	1.	2.	01.	004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
5.	1.	2.	01.	005	Belanja Bahan Baku
5.	1.	2.	01.	006	Belanja Bahan Kimia Nuklir
5.	1.	2.	01.	007	Belanja Barang Dalam Proses
5.	1.	2.	01.	008	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5.	1.	2.	01.	009	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5.	1.	2.	01.	010	Belanja Isi Tabung Gas
5.	1.	2.	01.	011	Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
5.	1.	2.	01.	012	Belanja Bahan Lainnya
5.	1.	2.	02.		Belanja Suku Cadang
5.	1.	2.	02.	001	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan
5.	1.	2.	02.	002	Belanja Suku Cadang Alat Besar
5.	1.	2.	02.	003	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran
5.	1.	2.	02.	004	Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium
5.	1.	2.	02.	005	Belanja Suku Cadang Alat Pemancar
5.	1.	2.	02.	006	Belanja Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
5.	1.	2.	02.	007	Belanja Suku Cadang Alat Pertanian
5.	1.	2.	02.	008	Belanja Suku Cadang Alat Bengkel
5.	1.	2.	02.	009	Belanja Suku Cadang Alat Persenjataan
5.	1.	2.	02.	010	Belanja Suku Cadang Lainnya
5.	1.	2.	03.		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
5.	1.	2.	03.	001	Belanja Alat Tulis Kantor
5.	1.	2.	03.	002	Belanja Kertas dan Cover
5.	1.	2.	03.	003	Belanja Bahan Cetak
5.	1.	2.	03.	004	Belanja Benda Pos
5.	1.	2.	03.	005	Belanja Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
5.	1.	2.	03.	006	Belanja Bahan Komputer
5.	1.	2.	03.	007	Belanja Perabot Kantor
5.	1.	2.	03.	008	Belanja Alat Listrik
5.	1.	2.	03.	009	Belanja Perlengkapan Dinas
5.	1.	2.	03.	010	Belanja Perlengkapan perorangan lapangan (KAPORLAP) dan Perlengkapan Satwa
5.	1.	2.	03.	011	Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
5.	1.	2.	03.	012	Belanja Souvenir/Cinderamata
5.	1.	2.	03.	013	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5.	1.	2.	04.		<b>Belanja Obat-obatan</b>
5.	1.	2.	04.	001	Belanja Obat
5.	1.	2.	04.	002	Belanja Obat-obatan Lainnya
5.	1.	2.	05.		<b>Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga</b>
5.	1.	2.	05.	001	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.	1.	2.	05.	002	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.	1.	2.	06.		<b>Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>
5.	1.	2.	06.	001	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.	1.	2.	07.		<b>Belanja Barang Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga</b>
5.	1.	2.	07.	001	Belanja barang cadangan energi (Air, BBM)
5.	1.	2.	07.	002	Belanja barang cadangan pangan
5.	1.	2.	08.		<b>Belanja Natura dan Pakan</b>
5.	1.	2.	08.	001	Belanja Natura (makanan/sembako, minuman dst)
5.	1.	2.	08.	002	Belanja Pakan (pakan hewan, pakan ikan dst)
5.	1.	2.	08.	003	Belanja Natura dan Pakan Lainnya
5.	1.	2.	09.		<b>Belanja Barang Untuk Penelitian</b>
5.	1.	2.	09.	001	Belanja Barang Untuk Penelitian Biologi
5.	1.	2.	09.	002	Belanja Barang Untuk Penelitian Biologi Lainnya
5.	1.	2.	09.	003	Belanja Barang Untuk Penelitian Teknologi
5.	1.	2.	09.	004	Belanja Barang Untuk Penelitian Lainnya
5.	1.	2.	10.		<b>Belanja Barang Untuk Proses Produksi</b>
5.	1.	2.	10.	001	Belanja Barang Untuk Proses Produksi
5.	1.	2.	10.	002	Belanja Barang Untuk Proses Produksi Lainnya
5.	1.	2.	11.		<b>Belanja Jasa Kantor</b>
5.	1.	2.	11.	001	Belanja telepon
5.	1.	2.	11.	002	Belanja air
5.	1.	2.	11.	003	Belanja listrik
5.	1.	2.	11.	004	Belanja Jasa pengumuman lelang
5.	1.	2.	11.	005	Belanja surat kabar/majalah
5.	1.	2.	11.	006	Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband)
5.	1.	2.	11.	007	Belanja paket/pengiriman
5.	1.	2.	11.	008	Belanja Sertifikasi
5.	1.	2.	11.	009	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.	1.	2.	11.	010	Belanja Jasa Penerangan Jalan Umum
5.	1.	2.	11.	011	Belanja Dokumentasi dan Publikasi
5.	1.	2.	11.	012	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan
5.	1.	2.	12.		<b>Belanja Jasa Pihak Ketiga</b>
5.	1.	2.	12.	001	Belanja Jasa Event Organizer
5.	1.	2.	12.	002	Belanja Jasa Pemusnahan
5.	1.	2.	12.	003	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya
5.	1.	2.	13.		<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>
5.	1.	2.	13.	001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.	1.	2.	13.	002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.	1.	2.	13.	003	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.	1.	2.	13.	004	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya
5.	1.	2.	14.		<b>Belanja Premi Asuransi</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
5.	1.	2.	14.	001	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.	1.	2.	14.	002	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
5.	1.	2.	14.	003	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.	1.	2.	15.		<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>
5.	1.	2.	15.	001	Belanja Jasa Servis
5.	1.	2.	15.	002	Belanja Penggantian Suku Cadang
5.	1.	2.	15.	003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5.	1.	2.	15.	004	Belanja Jasa KIR, PKB, BBNKB dan STNK
5.	1.	2.	16.		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>
5.	1.	2.	16.	001	Belanja Cetak
5.	1.	2.	16.	002	Belanja Penggandaan/fotokopi
5.	1.	2.	17.		<b>Belanja Sewa</b>
5.	1.	2.	17.	001	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas/gedung/kantor/tempat/ruang pertemuan
5.	1.	2.	17.	002	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat/Air/Udara
5.	1.	2.	17.	003	Belanja Sewa Alat Berat
5.	1.	2.	17.	004	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
5.	1.	2.	17.	005	Belanja Sewa Lainnya
5.	1.	2.	18.		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>
5.	1.	2.	18.	001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.	1.	2.	18.	002	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.	1.	2.	18.	003	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.	1.	2.	19.		<b>Belanja Pemulangan Pegawai</b>
5.	1.	2.	19.	001	Belanja pemulangan pegawai yang wafat dalam tugas
5.	1.	2.	20.		<b>Belanja Pemeliharaan</b>
5.	1.	2.	20.	001	Belanja Pemeliharaan Tanah
5.	1.	2.	20.	002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.	1.	2.	20.	003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.	1.	2.	20.	004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.	1.	2.	20.	005	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5.	1.	2.	20.	006	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya
5.	1.	2.	21.		<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>
5.	1.	2.	21.	001	Belanja Tugas Belajar D3
5.	1.	2.	21.	002	Belanja Tugas Belajar S1
5.	1.	2.	21.	003	Belanja Tugas Belajar S2
5.	1.	2.	21.	004	Belanja Tugas Belajar S3
5.	1.	2.	22.		<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis</b>
5.	1.	2.	22.	001	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5.	1.	2.	22.	002	Belanja sosialisasi
5.	1.	2.	22.	003	Belanja bimbingan teknis
5.	1.	2.	23.		<b>Belanja Pembayaran Jasa PNS</b>
5.	1.	2.	23.	001	Belanja Tenaga Ahli PNS
5.	1.	2.	23.	002	Belanja Narasumber PNS
5.	1.	2.	23.	003	Belanja Instruktur PNS
5.	1.	2.	23.	004	Belanja Moderator PNS
5.	1.	2.	23.	005	Belanja Jasa Tenaga Medis/ Paramedis PNS
5.	1.	2.	23.	006	Belanja Jasa PNS Lainnya
5.	1.	2.	24.		<b>Belanja Pembayaran Jasa Non PNS</b>
5.	1.	2.	24.	001	Belanja Tenaga Ahli Non PNS

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
5.	1.	2.	24.	002	Belanja Narasumber Non PNS
5.	1.	2.	24.	003	Belanja Instruktur Non PNS
5.	1.	2.	24.	004	Belanja Moderator Non PNS
5.	1.	2.	24.	005	Belanja Jasa Tenaga Medis/ Paramedis Non PNS
5.	1.	2.	24.	006	Belanja Jasa Non PNS Lainnya
5.	1.	2.	25.		<b>Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>
5.	1.	2.	25.	001	Uang untuk hadiah
5.	1.	2.	25.	002	Uang untuk penghargaan
5.	1.	2.	26.		<b>Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>
5.	1.	2.	26.	001	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga
5.	1.	2.	26.	002	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat
5.	1.	2.	27.		<b>Belanja Tamu Pemerintah Daerah</b>
5.	1.	2.	27.	001	Belanja Tamu Pemerintah Daerah
5.	1.	2.	28.		<b>Belanja Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)</b>
5.	1.	2.	28.	001	Belanja Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
5.	1.	2.	29.		<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>
5.	1.	2.	29.	001	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.	1.	2.	30.		<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>
5.	1.	2.	30.	001	Belanja Barang dan Jasa BOS
5.	1.	2.	30.		<b>Belanja Kontribusi Organisasi atau Asosiasi Pemerintah Daerah</b>
5.	1.	2.	30.	001	Belanja Kontribusi APKASI
5.	1.	3.			<b>Belanja Bunga</b>
5.	1.	3.	01.		<b>Belanja Bunga Utang Pinjaman</b>
5.	1.	3.	01.	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.	1.	3.	01.	002	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5.	1.	3.	01.	003	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.	1.	3.	01.	004	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.	1.	3.	02.		<b>Belanja Bunga Utang Obligasi</b>
5.	1.	3.	02.	001	Belanja Bunga Utang Obligasi
5.	1.	3.	03.		<b>Belanja Bunga Utang BLUD</b>
5.	1.	3.	03.	001	Belanja Bunga Utang BLUD
5.	1.	4.			<b>Belanja Subsidi</b>
5.	1.	4.	01.		<b>Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga</b>
5.	1.	4.	01.	001	Belanja Subsidi kepada BUMN
5.	1.	4.	01.	002	Belanja Subsidi kepada BUMD
5.	1.	4.	01.	003	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5.	1.	5.			<b>Belanja Hibah</b>
5.	1.	5.	01.		<b>Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</b>
5.	1.	5.	01.	001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5.	1.	5.	01.	002	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat di Daerah (Instansi Vertikal)
5.	1.	5.	02.		<b>Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah lainnya</b>
5.	1.	5.	02.	001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.	1.	5.	03.		<b>Belanja Hibah Uang kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN</b>



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
5.	1.	5.	03.	001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN
5.	1.	5.	03.	002	Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5.	1.	5.	04.		<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.</b>
5.	1.	5.	04.	001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga
5.	1.	5.	04.	002	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan
5.	1.	5.	05.		<b>Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</b>
5.	1.	5.	05.	001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.	1.	5.	05.	002	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat di Daerah (Instansi Vertikal)
5.	1.	5.	06.		<b>Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah lainnya</b>
5.	1.	5.	06.	001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah
5.	1.	5.	07.		<b>Belanja Hibah Barang kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN</b>
5.	1.	5.	07.	001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5.	1.	5.	07.	002	Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5.	1.	5.	08.		<b>Belanja Hibah Barang kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>
5.	1.	5.	08.	001	Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga
5.	1.	5.	08.	002	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan
5.	1.	5.	09.		<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>
5.	1.	5.	09.	001	Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)
5.	1.	5.	09.	002	Bantuan Keuangan kepada Partai Berkarya
5.	1.	5.	09.	003	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)
5.	1.	5.	09.	004	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat (PD)
5.	1.	5.	09.	005	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
5.	1.	5.	09.	006	Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5.	1.	5.	09.	007	Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
5.	1.	5.	09.	008	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5.	1.	5.	09.	009	Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
5.	1.	5.	09.	010	Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
5.	1.	5.	09.	011	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
5.	1.	5.	09.	012	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
5.	1.	6.			<b>Belanja Bantuan Sosial</b>
5.	1.	6.	01.		<b>Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat</b>
5.	1.	6.	01.	001	Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Individu
5.	1.	6.	01.	002	Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga
5.	1.	6.	01.	003	Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok
5.	1.	6.	01.	004	Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Masyarakat
5.	1.	6.	02.		<b>Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat</b>
5.	1.	6.	02.	001	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Individu
5.	1.	6.	02.	002	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Keluarga
5.	1.	6.	02.	003	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok
5.	1.	6.	02.	004	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Masyarakat
5.	2.				<b>BELANJA MODAL</b>



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
5.	2.	2	01.	002	Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Besar Apung
5.	2.	2	01.	003	Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Bantu
5.	2.	2	02.		<b>Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan</b>
5.	2.	2	02.	001	Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor
5.	2.	2	02.	002	Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5.	2.	2	02.	003	Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Apung Bermotor
5.	2.	2	02.	004	Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
5.	2.	2	02.	005	Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Udara Bermotor
5.	2.	2	02.	006	Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Udara Tak Bermotor
5.	2.	2	03.		<b>Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>
5.	2.	2	03.	001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
5.	2.	2	03.	002	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
5.	2.	2	03.	003	Belanja Modal alat ukur
5.	2.	2	04.		<b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>
5.	2.	2	04.	001	Belanja Modal alat pengolahan tanah dan tanaman
5.	2.	2	04.	002	Belanja Modal alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak
5.	2.	2	04.	003	Belanja Modal alat panen
5.	2.	2	04.	004	Belanja Modal alat penyimpan hasil percobaan pertanian
5.	2.	2	04.	005	Belanja Modal alat laboratorium pertanian
5.	2.	2	04.	006	Belanja Modal alat prosesing
5.	2.	2	04.	007	Belanja Modal alat pasca panen
5.	2.	2	04.	008	Belanja Modal alat produksi perikanan
5.	2.	2	04.	009	Belanja Modal alat-alat peternakan
5.	2.	2	04.	010	Belanja Modal alat pengolahan lainnya
5.	2.	2	05.		<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>
5.	2.	2	05.	001	Belanja Modal Alat Kantor
5.	2.	2	05.	002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5.	2.	2	05.	003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.	2.	2	06.		<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>
5.	2.	2	06.	001	Belanja Modal Alat Studio
5.	2.	2	06.	002	Belanja Modal Alat Komunikasi
5.	2.	2	06.	003	Belanja Modal Alat Pemancar
5.	2.	2	06.	004	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
5.	2.	2	07.		<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>
5.	2.	2	07.	001	Belanja Modal Alat Kedokteran
5.	2.	2	07.	002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5.	2.	2	08.		<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>
5.	2.	2	08.	001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5.	2.	2	08.	002	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5.	2.	2	08.	003	Belanja Modal Alat Peraga Sekolah
5.	2.	2	08.	004	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
5.	2.	2	08.	005	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
5.	2.	2	08.	006	Belanja Modal Raditation Application and Non Destructif Testing Laboratory Lainnya
5.	2.	2	08.	007	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5.	2.	2	08.	008	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
5.	2.	2	08.	009	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
5.	2.	2	09.		<b>Belanja Modal Persenjataan</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
5.	2.	2	09.	001	Belanja Modal Senjata Api
5.	2.	2	09.	002	Belanja Modal Persenjataan Non Senjata Api
5.	2.	2	09.	003	Belanja Modal Senjata Sinar
5.	2.	3	09.	004	Alat Khusus Kepolisian
5.	2.	2	10.		<b>Belanja Modal Komputer</b>
5.	2.	2	10.	001	Belanja Modal Komputer Unit
5.	2.	2	10.	002	Belanja Modal Peralatan Komputer
5.	2.	2	11.		<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>
5.	2.	2	11.	001	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi
5.	2.	2	11.	002	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika
5.	2.	2	12.		<b>Belanja Modal Alat Pengeboran</b>
5.	2.	2	12.	001	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin
5.	2.	2	12.	002	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
5.	2.	2	13.		<b>Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian</b>
5.	2.	2	13.	001	Belanja Modal Alat Sumur
5.	2.	2	13.	002	Belanja Modal Alat Produksi
5.	2.	2	13.	003	Belanja Modal Alat Pengolahan dan Pemurnian
5.	2.	2	14.		<b>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</b>
5.	2.	2	14.	001	Belanja Modal Alat Deteksi
5.	2.	2	14.	002	Belanja Modal Alat Pelindung
5.	2.	2	14.	003	Belanja Modal Alat SAR
5.	2.	2	14.	004	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan
5.	2.	2	15.		<b>Belanja Modal Alat Peraga</b>
5.	2.	2	15.	001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
5.	2.	2	16.		<b>Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi</b>
5.	2.	2	16.	001	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
5.	2.	2	17.		<b>Belanja Modal Rambu-Rambu</b>
5.	2.	2	17.	001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu lintas Darat
5.	2.	2	17.	002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu lintas Udara
5.	2.	2	17.	003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu lintas Air
5.	2.	2	18.		<b>Belanja Modal Peralatan Olah Raga</b>
5.	2.	2	18.	001	Belanja Modal Peralatan Olah Raga
5.	2.	2	19.		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>
5.	2.	2	19.	001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5.	2.	2	20.		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</b>
5.	2.	2	20.	001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5.	2.	3			<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
5.	2.	3	01.		<b>Belanja modal Bangunan Gedung</b>
5.	2.	3	01.	001	Belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.	2.	3	01.	002	Belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5.	2.	3	02.		<b>Belanja modal Monumen</b>
5.	2.	3	02.	001	Belanja modal Candi
5.	2.	3	02.	002	Belanja modal Tugu Peringatan
5.	2.	3	02.	003	Belanja modal Prasasti
5.	2.	3	02.	004	Belanja modal Monumen Lainnya
5.	2.	3	03.		<b>Belanja modal Bangunan Menara</b>
5.	2.	3	03.	001	Belanja modal Bangunan Menara
5.	2.	3	04.		<b>Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
5.	2.	3	04.	001	Belanja modal Tugu/Tanda Batas
5.	2.	3	05.		<b>Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD</b>
5.	2.	3	05.	001	Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD
5.	2.	3	06.		<b>Belanja Modal Bangunan dan Gedung BOS</b>
5.	2.	3	06.	001	Belanja Modal Bangunan dan Gedung BOS
5.	2.				
5.	2.	4			<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>
5.	2.	4	01.		<b>Belanja modal Jalan dan Jembatan</b>
5.	2.	4	01.	001	Belanja modal Jalan
5.	2.	4	01.	002	Belanja modal Jembatan
5.	2.	4	02.		<b>Belanja modal Bangunan Air</b>
5.	2.	4	02.	001	Belanja modal Bangunan Air Irigasi
5.	2.	4	02.	002	Belanja modal Bangunan Air Pasang Surut
5.	2.	4	02.	003	Belanja modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
5.	2.	4	02.	004	Belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penganggulangan Bencana Alam
5.	2.	4	02.	005	Belanja modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5.	2.	4	02.	006	Belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
5.	2.	4	02.	007	Belanja modal Bangunan Air Kotor
5.	2.	4	03.		<b>Belanja modal Instalasi</b>
5.	2.	4	03.	001	Belanja modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
5.	2.	4	03.	002	Belanja modal Instalasi Air Kotor
5.	2.	4	03.	003	Belanja modal Instalasi Pengolahan Sampah
5.	2.	4	03.	004	Belanja modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5.	2.	4	03.	005	Belanja modal Instalasi Pembangkit Listrik
5.	2.	4	03.	006	Belanja modal Instalasi Gardu Listrik
5.	2.	4	03.	007	Belanja modal Instalasi Pertahanan
5.	2.	4	03.	008	Belanja modal Instalasi Gas
5.	2.	4	03.	009	Belanja modal Instalasi Pengaman
5.	2.	4	03.	010	Belanja modal Instalasi Lainnya
5.	2.	4	04.		<b>Belanja modal Jaringan</b>
5.	2.	4	04.	001	Belanja modal Jaringan Air Minum
5.	2.	4	04.	002	Belanja modal Jaringan Listrik
5.	2.	4	04.	003	Belanja modal Jaringan Telepon
5.	2.	4	04.	004	Belanja modal Jaringan Gas
5.	2.	4	05.		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD</b>
5.	2.	4	05.	001	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
5.	2.	4	06.		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS</b>
5.	2.	4	06.	001	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS
5.	2.	5			<b>BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA</b>
5.	2.	5	01.		<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>
5.	2.	5	01.	001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5.	2.	5	01.	002	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
5.	2.	5	01.	003	Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan
5.	2.	5	01.	004	Belanja Modal Musik
5.	2.	5	01.	005	Belanja Modal Karya Grafika

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i n y e c i k a n	U R A I A N
5.	2.	5	02.		<b>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga</b>
5.	2.	5	02.	001	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
5.	2.	5	02.	002	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
5.	2.	5	02.	003	Belanja Modal Tanda Penghargaan
5.	2.	5	03.		<b>Belanja Modal Hewan</b>
5.	2.	5	03.	001	Belanja Modal Hewan Peliharaan
5.	2.	5	03.	002	Belanja Modal Hewan Ternak
5.	2.	5	03.	003	Belanja Modal Hewan Lainnya
5.	2.	5	03.	004	Belanja Modal Biota Perairan
5.	2.	5	04.		<b>Belanja Modal Tanaman</b>
5.	2.	5	04.	001	Belanja Modal Tanaman
5.	2.	5	05.		<b>Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya</b>
5.	2.	5	05.	001	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5.	2.	5	06.		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD</b>
5.	2.	5	06.	001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5.	2.	5	07.		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS</b>
5.	2.	5	07.	001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
5.	2.	6			<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>
5.	2.	6	01.		<b>Aset Tak Berwujud</b>
5.	2.	6	01.	001	Goodwill
5.	2.	6	01.	002	Lisensi dan Franchise
5.	2.	6	01.	003	Hak Cipta
5.	2.	6	01.	004	Hak Paten
5.	2.	6	01.	005	Software
5.	2.	6	01.	006	Kajian
5.	2.	6	01.	007	Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
5.	2.	6	01.	008	Aset Tidak Berwujud Lainnya
5.	2.	6	02.		<b>Aset Lainnya BLUD</b>
5.	2.	6	02.	001	Aset Lainnya BLUD
5.	2.	6	03.		<b>Aset Lainnya BOS</b>
5.	2.	6	03.	001	Aset Lainnya BOS
5.	3.				<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>
5.	3.	1.			<b>Belanja Tidak Terduga</b>
5.	3.	1.	01		<b>Belanja Tidak Terduga</b>
5.	3.	1.	01	001	Belanja Tidak Terduga
6.					<b>TRANSFER</b>
6.	1.				<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>
6.	1.	1.			<b>Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>
6.	1.	1.	01.		<b>Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat</b>
6.	1.	1.	01.	001	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah Pusat
6.	1.	1.	01.	002	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah Provinsi
6.	1.	1.	01.	003	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah Pusat
6.	1.	1.	01.	004	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
6.	1.	1.	02.		<b>Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lainnya</b>
6.	1.	1.	02.	001	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Lainnya
6.	1.	1.	02.	002	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Lainnya
6.	1.	1.	02.	003	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Lainnya
6.	1.	1.	02.	004	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kota Lainnya
6.	1.	1.	03.		<b>Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa</b>
6.	1.	1.	03.	001	Bagi Hasil kepada Desa Bangsri
6.	1.	1.	03.	002	Bagi Hasil kepada Desa Banjar Agung
6.	1.	1.	03.	003	Bagi Hasil kepada Desa Banjaran
6.	1.	1.	03.	004	Bagi Hasil kepada Desa Bondo
6.	1.	1.	03.	005	Bagi Hasil kepada Desa Guyangan
6.	1.	1.	03.	006	Bagi Hasil kepada Desa Jeruk Wangi
6.	1.	1.	03.	007	Bagi Hasil kepada Desa KedungLeper
6.	1.	1.	03.	008	Bagi Hasil kepada Desa Kepuk
6.	1.	1.	03.	009	Bagi Hasil kepada Desa Papasan
6.	1.	1.	03.	010	Bagi Hasil kepada Desa Srikandang
6.	1.	1.	03.	011	Bagi Hasil kepada Desa Tengguli
6.	1.	1.	03.	012	Bagi Hasil kepada Desa Wedelan
6.	1.	1.	03.	013	Bagi Hasil kepada Desa Bantrung
6.	1.	1.	03.	014	Bagi Hasil kepada Desa Batealit
6.	1.	1.	03.	015	Bagi Hasil kepada Desa Bawu
6.	1.	1.	03.	016	Bagi Hasil kepada Desa Bringin
6.	1.	1.	03.	017	Bagi Hasil kepada Desa Geneng
6.	1.	1.	03.	018	Bagi Hasil kepada Desa Mindahan
6.	1.	1.	03.	019	Bagi Hasil kepada Desa Mindahan Kidul
6.	1.	1.	03.	020	Bagi Hasil kepada Desa Ngasem
6.	1.	1.	03.	021	Bagi Hasil kepada Desa Pekalongan
6.	1.	1.	03.	022	Bagi Hasil kepada Desa Raguklampitan
6.	1.	1.	03.	023	Bagi Hasil kepada Desa Somosari
6.	1.	1.	03.	024	Bagi Hasil kepada Desa Bandungharjo
6.	1.	1.	03.	025	Bagi Hasil kepada Desa Banyumanis
6.	1.	1.	03.	026	Bagi Hasil kepada Desa Blingoh
6.	1.	1.	03.	027	Bagi Hasil kepada Desa Clering
6.	1.	1.	03.	028	Bagi Hasil kepada Desa Jugo
6.	1.	1.	03.	029	Bagi Hasil kepada Desa Sumberrejo
6.	1.	1.	03.	030	Bagi Hasil kepada Desa Tulakan
6.	1.	1.	03.	031	Bagi Hasil kepada Desa Ujungwatu
6.	1.	1.	03.	032	Bagi Hasil kepada Desa Bandengan
6.	1.	1.	03.	033	Bagi Hasil kepada Desa KedungCino
6.	1.	1.	03.	034	Bagi Hasil kepada Desa Kuwasen
6.	1.	1.	03.	035	Bagi Hasil kepada Desa Mulyoharjo
6.	1.	1.	03.	036	Bagi Hasil kepada Desa Wonorejo
6.	1.	1.	03.	037	Bagi Hasil kepada Desa Bakalan
6.	1.	1.	03.	038	Bagi Hasil kepada Desa BandungRejo
6.	1.	1.	03.	039	Bagi Hasil kepada Desa Banyuputih
6.	1.	1.	03.	040	Bagi Hasil kepada Desa BatuKali
6.	1.	1.	03.	041	Bagi Hasil kepada Desa Damarjati
6.	1.	1.	03.	042	Bagi Hasil kepada Desa Kriyan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
6.	1.	1.	03.	043	Bagi Hasil kepada Desa Manyargading
6.	1.	1.	03.	044	Bagi Hasil kepada Desa Margoyoso
6.	1.	1.	03.	045	Bagi Hasil kepada Desa Pendosawalan
6.	1.	1.	03.	046	Bagi Hasil kepada Desa Purwogondo
6.	1.	1.	03.	047	Bagi Hasil kepada Desa Robayan
6.	1.	1.	03.	048	Bagi Hasil kepada Desa Sendang
6.	1.	1.	03.	049	Bagi Hasil kepada Desa KarimunJawa
6.	1.	1.	03.	050	Bagi Hasil kepada Desa Kemujan
6.	1.	1.	03.	051	Bagi Hasil kepada Desa Nyamuk
6.	1.	1.	03.	052	Bagi Hasil kepada Desa Parang
6.	1.	1.	03.	053	Bagi Hasil kepada Desa Bugel
6.	1.	1.	03.	054	Bagi Hasil kepada Desa Bulak Baru
6.	1.	1.	03.	055	Bagi Hasil kepada Desa Dongos
6.	1.	1.	03.	056	Bagi Hasil kepada Desa Jondang
6.	1.	1.	03.	057	Bagi Hasil kepada Desa Kalianyar
6.	1.	1.	03.	058	Bagi Hasil kepada Desa Karangaji
6.	1.	1.	03.	059	Bagi Hasil kepada Desa Kedung Malang
6.	1.	1.	03.	060	Bagi Hasil kepada Desa Kerso
6.	1.	1.	03.	061	Bagi Hasil kepada Desa Menganti
6.	1.	1.	03.	062	Bagi Hasil kepada Desa Panggung
6.	1.	1.	03.	063	Bagi Hasil kepada Desa Rau
6.	1.	1.	03.	064	Bagi Hasil kepada Desa Sowan Kidul
6.	1.	1.	03.	065	Bagi Hasil kepada Desa Sowan Lor
6.	1.	1.	03.	066	Bagi Hasil kepada Desa Sukosono
6.	1.	1.	03.	067	Bagi Hasil kepada Desa Surodadi
6.	1.	1.	03.	068	Bagi Hasil kepada Desa Tanggultlare
6.	1.	1.	03.	069	Bagi Hasil kepada Desa Tedunan
6.	1.	1.	03.	070	Bagi Hasil kepada Desa Wanusobo
6.	1.	1.	03.	071	Bagi Hasil kepada Desa Bumiharjo
6.	1.	1.	03.	072	Bagi Hasil kepada Desa Damarwulan
6.	1.	1.	03.	073	Bagi Hasil kepada Desa Gelang
6.	1.	1.	03.	074	Bagi Hasil kepada Desa Jlegong
6.	1.	1.	03.	075	Bagi Hasil kepada Desa Kaligarang
6.	1.	1.	03.	076	Bagi Hasil kepada Desa Kelet
6.	1.	1.	03.	077	Bagi Hasil kepada Desa Keling
6.	1.	1.	03.	078	Bagi Hasil kepada Desa Klepu
6.	1.	1.	03.	079	Bagi Hasil kepada Desa Kunir
6.	1.	1.	03.	080	Bagi Hasil kepada Desa Tempur
6.	1.	1.	03.	081	Bagi Hasil kepada Desa Tunahan
6.	1.	1.	03.	082	Bagi Hasil kepada Desa Watuaji
6.	1.	1.	03.	083	Bagi Hasil kepada Desa Balong
6.	1.	1.	03.	084	Bagi Hasil kepada Desa Bucu
6.	1.	1.	03.	085	Bagi Hasil kepada Desa Cepogo
6.	1.	1.	03.	086	Bagi Hasil kepada Desa Dermolo
6.	1.	1.	03.	087	Bagi Hasil kepada Desa Dudakawu
6.	1.	1.	03.	088	Bagi Hasil kepada Desa Jinggotan
6.	1.	1.	03.	089	Bagi Hasil kepada Desa Kaliaman
6.	1.	1.	03.	090	Bagi Hasil kepada Desa Kancilan
6.	1.	1.	03.	091	Bagi Hasil kepada Desa Pendem



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	1.	1.	03.	092	Bagi Hasil kepada Desa Sumanding
6.	1.	1.	03.	093	Bagi Hasil kepada Desa Tubanan
6.	1.	1.	03.	094	Bagi Hasil kepada Desa Bandung
6.	1.	1.	03.	095	Bagi Hasil kepada Desa Buaran
6.	1.	1.	03.	096	Bagi Hasil kepada Desa Bungu
6.	1.	1.	03.	097	Bagi Hasil kepada Desa Datar
6.	1.	1.	03.	098	Bagi Hasil kepada Desa Jebol
6.	1.	1.	03.	099	Bagi Hasil kepada Desa Kuanyar
6.	1.	1.	03.	100	Bagi Hasil kepada Desa Mayong Kidul
6.	1.	1.	03.	101	Bagi Hasil kepada Desa Mayong Lor
6.	1.	1.	03.	102	Bagi Hasil kepada Desa Ngroto
6.	1.	1.	03.	103	Bagi Hasil kepada Desa Pancur
6.	1.	1.	03.	104	Bagi Hasil kepada Desa Paren
6.	1.	1.	03.	105	Bagi Hasil kepada Desa Pelang
6.	1.	1.	03.	106	Bagi Hasil kepada Desa Pelemkerep
6.	1.	1.	03.	107	Bagi Hasil kepada Desa Pule
6.	1.	1.	03.	108	Bagi Hasil kepada Desa Rajekwesi
6.	1.	1.	03.	109	Bagi Hasil kepada Desa Sengon Bugel
6.	1.	1.	03.	110	Bagi Hasil kepada Desa Singorojo
6.	1.	1.	03.	111	Bagi Hasil kepada Desa Tigajuru
6.	1.	1.	03.	112	Bagi Hasil kepada Desa Jambu
6.	1.	1.	03.	113	Bagi Hasil kepada Desa Jambu Timur
6.	1.	1.	03.	114	Bagi Hasil kepada Desa Karanggondang
6.	1.	1.	03.	115	Bagi Hasil kepada Desa Mororejo
6.	1.	1.	03.	116	Bagi Hasil kepada Desa Sekuro
6.	1.	1.	03.	117	Bagi Hasil kepada Desa Sinanggul
6.	1.	1.	03.	118	Bagi Hasil kepada Desa Srobyong
6.	1.	1.	03.	119	Bagi Hasil kepada Desa Suwawal
6.	1.	1.	03.	120	Bagi Hasil kepada Desa Bategede
6.	1.	1.	03.	121	Bagi Hasil kepada Desa BendanPete
6.	1.	1.	03.	122	Bagi Hasil kepada Desa Blimbingrejo
6.	1.	1.	03.	123	Bagi Hasil kepada Desa Daren
6.	1.	1.	03.	124	Bagi Hasil kepada Desa Dorang
6.	1.	1.	03.	125	Bagi Hasil kepada Desa Gemiring Kidul
6.	1.	1.	03.	126	Bagi Hasil kepada Desa Gemiring Lor
6.	1.	1.	03.	127	Bagi Hasil kepada Desa Jatisari
6.	1.	1.	03.	128	Bagi Hasil kepada Desa Karangnongko
6.	1.	1.	03.	129	Bagi Hasil kepada Desa Muryolobo
6.	1.	1.	03.	130	Bagi Hasil kepada Desa Nalumsari
6.	1.	1.	03.	131	Bagi Hasil kepada Desa Ngetuk
6.	1.	1.	03.	132	Bagi Hasil kepada Desa Pringtulis
6.	1.	1.	03.	133	Bagi Hasil kepada Desa Tritis
6.	1.	1.	03.	134	Bagi Hasil kepada Desa Tunggul Pandean
6.	1.	1.	03.	135	Bagi Hasil kepada Desa Bulungan
6.	1.	1.	03.	136	Bagi Hasil kepada Desa Kawak
6.	1.	1.	03.	137	Bagi Hasil kepada Desa Lebak
6.	1.	1.	03.	138	Bagi Hasil kepada Desa Mambak
6.	1.	1.	03.	139	Bagi Hasil kepada Desa Plajan
6.	1.	1.	03.	140	Bagi Hasil kepada Desa Slagi

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	1.	1.	03.	141	Bagi Hasil kepada Desa Suwawal Timur
6.	1.	1.	03.	142	Bagi Hasil kepada Desa Tanjung
6.	1.	1.	03.	143	Bagi Hasil kepada Desa Gemulung
6.	1.	1.	03.	144	Bagi Hasil kepada Desa Gerdu
6.	1.	1.	03.	145	Bagi Hasil kepada Desa Kaliombo
6.	1.	1.	03.	146	Bagi Hasil kepada Desa KarangRandu
6.	1.	1.	03.	147	Bagi Hasil kepada Desa Krasak
6.	1.	1.	03.	148	Bagi Hasil kepada Desa Lebuawu
6.	1.	1.	03.	149	Bagi Hasil kepada Desa Ngeling
6.	1.	1.	03.	150	Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Kulon
6.	1.	1.	03.	151	Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Wetan
6.	1.	1.	03.	152	Bagi Hasil kepada Desa Pulodarat
6.	1.	1.	03.	153	Bagi Hasil kepada Desa Rengging
6.	1.	1.	03.	154	Bagi Hasil kepada Desa Troso
6.	1.	1.	03.	155	Bagi Hasil kepada Desa Demangan
6.	1.	1.	03.	156	Bagi Hasil kepada Desa Kecapi
6.	1.	1.	03.	157	Bagi Hasil kepada Desa Krapyak
6.	1.	1.	03.	158	Bagi Hasil kepada Desa Langon
6.	1.	1.	03.	159	Bagi Hasil kepada Desa Mangunan
6.	1.	1.	03.	160	Bagi Hasil kepada Desa Mantingan
6.	1.	1.	03.	161	Bagi Hasil kepada Desa Ngabul
6.	1.	1.	03.	162	Bagi Hasil kepada Desa Peteyekan
6.	1.	1.	03.	163	Bagi Hasil kepada Desa Platar
6.	1.	1.	03.	164	Bagi Hasil kepada Desa Semat
6.	1.	1.	03.	165	Bagi Hasil kepada Desa Senenan
6.	1.	1.	03.	166	Bagi Hasil kepada Desa Sukodono
6.	1.	1.	03.	167	Bagi Hasil kepada Desa Tahunan
6.	1.	1.	03.	168	Bagi Hasil kepada Desa TegalSambi
6.	1.	1.	03.	169	Bagi Hasil kepada Desa TelukAwur
6.	1.	1.	03.	170	Bagi Hasil kepada Desa Brantak Sekarjati
6.	1.	1.	03.	171	Bagi Hasil kepada Desa Bugo
6.	1.	1.	03.	172	Bagi Hasil kepada Desa Gedangan
6.	1.	1.	03.	173	Bagi Hasil kepada Desa Gidangelo
6.	1.	1.	03.	174	Bagi Hasil kepada Desa Guwo Sobokerto
6.	1.	1.	03.	175	Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Kulon
6.	1.	1.	03.	176	Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Wetan
6.	1.	1.	03.	177	Bagi Hasil kepada Desa Karanganyar
6.	1.	1.	03.	178	Bagi Hasil kepada Desa Kedung Sarimulyo
6.	1.	1.	03.	179	Bagi Hasil kepada Desa Kendeng Sidalit
6.	1.	1.	03.	180	Bagi Hasil kepada Desa Ketileng Singolelo
6.	1.	1.	03.	181	Bagi Hasil kepada Desa Sidigede
6.	1.	1.	03.	182	Bagi Hasil kepada Desa Teluk Wetan
6.	1.	1.	03.	183	Bagi Hasil kepada Desa Ujung Pandan
6.	1.	1.	03.	184	Bagi Hasil kepada Desa Welahan
6.	1.	1.	03.	185	Bagi Hasil kepada TPI
6.	1.	2.			Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa
6.	1.	2.	01.		Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten Lainnya

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	1.	2.	01.	001	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten Lainnya
6.	1.	2.	02.		<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kota Lainnya</b>
6.	1.	2.	02.	001	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kota Lainnya
6.	1.	2.	03.		<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa</b>
6.	1.	2.	03.	001	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa
6.	2.				<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>
6.	2.	01.			<b>Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah</b>
6.	2.	01.	01		<b>Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi;</b>
6.	2.	01.	01.	001	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
6.	2.	01.	02		<b>Transfer Bantuan keuangan Kepada kabupaten/kota Lainnya</b>
6.	2.	01.	02	001	Transfer Bantuan keuangan kepada Kabupaten Lainnya
6.	2.	01.	02	002	Transfer Bantuan keuangan kepada Kota Lainnya
6.	2.	02.			Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa
6.	2.	02.	01.		<b>Transfer Alokasi Dana Desa</b>
6.	2.	02.	01.	001	Alokasi Dana Desa Bangsri
6.	2.	02.	01.	002	Alokasi Dana Desa Banjar Agung
6.	2.	02.	01.	003	Alokasi Dana Desa Banjaran
6.	2.	02.	01.	004	Alokasi Dana Desa Bondo
6.	2.	02.	01.	005	Alokasi Dana Desa Guyangan
6.	2.	02.	01.	006	Alokasi Dana Desa Jerukwangi
6.	2.	02.	01.	007	Alokasi Dana Desa Kedungleper
6.	2.	02.	01.	008	Alokasi Dana Desa Kepuk
6.	2.	02.	01.	009	Alokasi Dana Desa Papasan
6.	2.	02.	01.	010	Alokasi Dana Desa Srikandang
6.	2.	02.	01.	011	Alokasi Dana Desa Tengguli
6.	2.	02.	01.	012	Alokasi Dana Desa Wedelan
6.	2.	02.	01.	013	Alokasi Dana Desa Bantrung
6.	2.	02.	01.	014	Alokasi Dana Desa Batealit
6.	2.	02.	01.	015	Alokasi Dana Desa Bawu
6.	2.	02.	01.	016	Alokasi Dana Desa Bringin
6.	2.	02.	01.	017	Alokasi Dana Desa Geneng
6.	2.	02.	01.	018	Alokasi Dana Desa Mindahan
6.	2.	02.	01.	019	Alokasi Dana Desa Mindahan Kidul
6.	2.	02.	01.	020	Alokasi Dana Desa Ngasem
6.	2.	02.	01.	021	Alokasi Dana Desa Pekalongan
6.	2.	02.	01.	022	Alokasi Dana Desa Raguklampitan
6.	2.	02.	01.	023	Alokasi Dana Desa Somosari
6.	2.	02.	01.	024	Alokasi Dana Desa Bandungharjo
6.	2.	02.	01.	025	Alokasi Dana Desa Banyumanis
6.	2.	02.	01.	026	Alokasi Dana Desa Blingoh
6.	2.	02.	01.	027	Alokasi Dana Desa Clering
6.	2.	02.	01.	028	Alokasi Dana Desa Jugo
6.	2.	02.	01.	029	Alokasi Dana Desa Sumberrejo
6.	2.	02.	01.	030	Alokasi Dana Desa Tulakan
6.	2.	02.	01.	031	Alokasi Dana Desa Ujungwatu
6.	2.	02.	01.	032	Alokasi Dana Desa Bandengan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	01.	033	Alokasi Dana Desa KedungCino
6.	2.	02.	01.	034	Alokasi Dana Desa Kuwasen
6.	2.	02.	01.	035	Alokasi Dana Desa Mulyoharjo
6.	2.	02.	01.	036	Alokasi Dana Desa Wonorejo
6.	2.	02.	01.	037	Alokasi Dana Desa Bakalan
6.	2.	02.	01.	038	Alokasi Dana Desa Bandungrejo
6.	2.	02.	01.	039	Alokasi Dana Desa Banyuputih
6.	2.	02.	01.	040	Alokasi Dana Desa Batukali
6.	2.	02.	01.	041	Alokasi Dana Desa Damarjati
6.	2.	02.	01.	042	Alokasi Dana Desa Kriyan
6.	2.	02.	01.	043	Alokasi Dana Desa Manyargading
6.	2.	02.	01.	044	Alokasi Dana Desa Margoyoso
6.	2.	02.	01.	045	Alokasi Dana Desa Pendosawalan
6.	2.	02.	01.	046	Alokasi Dana Desa Purwogondo
6.	2.	02.	01.	047	Alokasi Dana Desa Robayan
6.	2.	02.	01.	048	Alokasi Dana Desa Sendang
6.	2.	02.	01.	049	Alokasi Dana Desa KarimunJawa
6.	2.	02.	01.	050	Alokasi Dana Desa Kemujan
6.	2.	02.	01.	051	Alokasi Dana Desa Nyamuk
6.	2.	02.	01.	052	Alokasi Dana Desa Parang
6.	2.	02.	01.	053	Alokasi Dana Desa Bugel
6.	2.	02.	01.	054	Alokasi Dana Desa Bulak Baru
6.	2.	02.	01.	055	Alokasi Dana Desa Dongos
6.	2.	02.	01.	056	Alokasi Dana Desa Jondang
6.	2.	02.	01.	057	Alokasi Dana Desa Kalianyar
6.	2.	02.	01.	058	Alokasi Dana Desa Karangaji
6.	2.	02.	01.	059	Alokasi Dana Desa Kedungmalang
6.	2.	02.	01.	060	Alokasi Dana Desa Kerso
6.	2.	02.	01.	061	Alokasi Dana Desa Menganti
6.	2.	02.	01.	062	Alokasi Dana Desa Panggung
6.	2.	02.	01.	063	Alokasi Dana Desa Rau
6.	2.	02.	01.	064	Alokasi Dana Desa Sowan Kidul
6.	2.	02.	01.	065	Alokasi Dana Desa Sowan Lor
6.	2.	02.	01.	066	Alokasi Dana Desa Sukosono
6.	2.	02.	01.	067	Alokasi Dana Desa Surodadi
6.	2.	02.	01.	068	Alokasi Dana Desa Tanggultlare
6.	2.	02.	01.	069	Alokasi Dana Desa Tedunan
6.	2.	02.	01.	070	Alokasi Dana Desa Wanusobo
6.	2.	02.	01.	071	Alokasi Dana Desa Bumiharjo
6.	2.	02.	01.	072	Alokasi Dana Desa Damarwulan
6.	2.	02.	01.	073	Alokasi Dana Desa Gelang
6.	2.	02.	01.	074	Alokasi Dana Desa Jlegong
6.	2.	02.	01.	075	Alokasi Dana Desa Kaligarang
6.	2.	02.	01.	076	Alokasi Dana Desa Kelet
6.	2.	02.	01.	077	Alokasi Dana Desa Keling
6.	2.	02.	01.	078	Alokasi Dana Desa Klepu
6.	2.	02.	01.	079	Alokasi Dana Desa Kunir
6.	2.	02.	01.	080	Alokasi Dana Desa Tempur
6.	2.	02.	01.	081	Alokasi Dana Desa Tunahan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	01.	082	Alokasi Dana Desa Watuaji
6.	2.	02.	01.	083	Alokasi Dana Desa Balong
6.	2.	02.	01.	084	Alokasi Dana Desa Bucu
6.	2.	02.	01.	085	Alokasi Dana Desa Cepogo
6.	2.	02.	01.	086	Alokasi Dana Desa Dermolo
6.	2.	02.	01.	087	Alokasi Dana Desa Dudakawu
6.	2.	02.	01.	088	Alokasi Dana Desa Jinggotan
6.	2.	02.	01.	089	Alokasi Dana Desa Kaliaman
6.	2.	02.	01.	090	Alokasi Dana Desa Kancilan
6.	2.	02.	01.	091	Alokasi Dana Desa Pendem
6.	2.	02.	01.	092	Alokasi Dana Desa Sumanding
6.	2.	02.	01.	093	Alokasi Dana Desa Tubanan
6.	2.	02.	01.	094	Alokasi Dana Desa Bandung
6.	2.	02.	01.	095	Alokasi Dana Desa Buaran
6.	2.	02.	01.	096	Alokasi Dana Desa Bungu
6.	2.	02.	01.	097	Alokasi Dana Desa Datar
6.	2.	02.	01.	098	Alokasi Dana Desa Jebol
6.	2.	02.	01.	099	Alokasi Dana Desa Kuanyar
6.	2.	02.	01.	100	Alokasi Dana Desa Mayong Kidul
6.	2.	02.	01.	101	Alokasi Dana Desa Mayong Lor
6.	2.	02.	01.	102	Alokasi Dana Desa Ngroto
6.	2.	02.	01.	103	Alokasi Dana Desa Pancur
6.	2.	02.	01.	104	Alokasi Dana Desa Paren
6.	2.	02.	01.	105	Alokasi Dana Desa Pelang
6.	2.	02.	01.	106	Alokasi Dana Desa Pelemkerep
6.	2.	02.	01.	107	Alokasi Dana Desa Pule
6.	2.	02.	01.	108	Alokasi Dana Desa Rajekwesi
6.	2.	02.	01.	109	Alokasi Dana Desa Sengonbugel
6.	2.	02.	01.	110	Alokasi Dana Desa Singorojo
6.	2.	02.	01.	111	Alokasi Dana Desa Tigajuru
6.	2.	02.	01.	112	Alokasi Dana Desa Jambu
6.	2.	02.	01.	113	Alokasi Dana Desa Jambu Timur
6.	2.	02.	01.	114	Alokasi Dana Desa Karanggondang
6.	2.	02.	01.	115	Alokasi Dana Desa Mororejo
6.	2.	02.	01.	116	Alokasi Dana Desa Sekuro
6.	2.	02.	01.	117	Alokasi Dana Desa Sinanggul
6.	2.	02.	01.	118	Alokasi Dana Desa Srobyong
6.	2.	02.	01.	119	Alokasi Dana Desa Suwawal
6.	2.	02.	01.	120	Alokasi Dana Desa Bategede
6.	2.	02.	01.	121	Alokasi Dana Desa BendanPete
6.	2.	02.	01.	122	Alokasi Dana Desa Blimbingrejo
6.	2.	02.	01.	123	Alokasi Dana Desa Daren
6.	2.	02.	01.	124	Alokasi Dana Desa Dorang
6.	2.	02.	01.	125	Alokasi Dana Desa Gemiring Kidul
6.	2.	02.	01.	126	Alokasi Dana Desa Gemiring Lor
6.	2.	02.	01.	127	Alokasi Dana Desa Jatisari
6.	2.	02.	01.	128	Alokasi Dana Desa Karangnongko
6.	2.	02.	01.	129	Alokasi Dana Desa Muryolobo
6.	2.	02.	01.	130	Alokasi Dana Desa Nalumsari

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	01.	131	Alokasi Dana Desa Ngetuk
6.	2.	02.	01.	132	Alokasi Dana Desa Pringtulis
6.	2.	02.	01.	133	Alokasi Dana Desa Tritis
6.	2.	02.	01.	134	Alokasi Dana Desa Tunggulpandean
6.	2.	02.	01.	135	Alokasi Dana Desa Bulungan
6.	2.	02.	01.	136	Alokasi Dana Desa Kawak
6.	2.	02.	01.	137	Alokasi Dana Desa Lebak
6.	2.	02.	01.	138	Alokasi Dana Desa Mambak
6.	2.	02.	01.	139	Alokasi Dana Desa Plajan
6.	2.	02.	01.	140	Alokasi Dana Desa Slagi
6.	2.	02.	01.	141	Alokasi Dana Desa Suwawal Timur
6.	2.	02.	01.	142	Alokasi Dana Desa Tanjung
6.	2.	02.	01.	143	Alokasi Dana Desa Gemulung
6.	2.	02.	01.	144	Alokasi Dana Desa Gerdu
6.	2.	02.	01.	145	Alokasi Dana Desa Kaliombo
6.	2.	02.	01.	146	Alokasi Dana Desa Karangrandu
6.	2.	02.	01.	147	Alokasi Dana Desa Krasak
6.	2.	02.	01.	148	Alokasi Dana Desa Lebuawu
6.	2.	02.	01.	149	Alokasi Dana Desa Ngeling
6.	2.	02.	01.	150	Alokasi Dana Desa Pecangaan Kulon
6.	2.	02.	01.	151	Alokasi Dana Desa Pecangaan Wetan
6.	2.	02.	01.	152	Alokasi Dana Desa Pulodarat
6.	2.	02.	01.	153	Alokasi Dana Desa Rengging
6.	2.	02.	01.	154	Alokasi Dana Desa Troso
6.	2.	02.	01.	155	Alokasi Dana Desa Demangan
6.	2.	02.	01.	156	Alokasi Dana Desa Kecapi
6.	2.	02.	01.	157	Alokasi Dana Desa Krapyak
6.	2.	02.	01.	158	Alokasi Dana Desa Langon
6.	2.	02.	01.	159	Alokasi Dana Desa Mangunan
6.	2.	02.	01.	160	Alokasi Dana Desa Mantingan
6.	2.	02.	01.	161	Alokasi Dana Desa Ngabul
6.	2.	02.	01.	162	Alokasi Dana Desa Petekeyan
6.	2.	02.	01.	163	Alokasi Dana Desa Platar
6.	2.	02.	01.	164	Alokasi Dana Desa Semat
6.	2.	02.	01.	165	Alokasi Dana Desa Senenan
6.	2.	02.	01.	166	Alokasi Dana Desa Sukodono
6.	2.	02.	01.	167	Alokasi Dana Desa Tahunan
6.	2.	02.	01.	168	Alokasi Dana Desa Tegalsambi
6.	2.	02.	01.	169	Alokasi Dana Desa TelukAwur
6.	2.	02.	01.	170	Alokasi Dana Desa Brantaksekarjati
6.	2.	02.	01.	171	Alokasi Dana Desa Bugo
6.	2.	02.	01.	172	Alokasi Dana Desa Gedangan
6.	2.	02.	01.	173	Alokasi Dana Desa Gidangelo
6.	2.	02.	01.	174	Alokasi Dana Desa Guwosobokerto
6.	2.	02.	01.	175	Alokasi Dana Desa Kalipucangkulon
6.	2.	02.	01.	176	Alokasi Dana Desa Kalipucangwetan
6.	2.	02.	01.	177	Alokasi Dana Desa Karanganyar
6.	2.	02.	01.	178	Alokasi Dana Desa Kedungsarimulyo
6.	2.	02.	01.	179	Alokasi Dana Desa Kendengsidialit

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	01.	180	Alokasi Dana Desa Ketilengsingolelo
6.	2.	02.	01.	181	Alokasi Dana Desa Sidigede
6.	2.	02.	01.	182	Alokasi Dana Desa Teluk Wetan
6.	2.	02.	01.	183	Alokasi Dana Desa Ujungpandan
6.	2.	02.	01.	184	Alokasi Dana Desa Welahan
6.	2.	02.	02.		<b>Transfer Dana Desa</b>
6.	2.	02.	02.	001	Dana Desa Bangsri
6.	2.	02.	02.	002	Dana Desa Banjar Agung
6.	2.	02.	02.	003	Dana Desa Banjaran
6.	2.	02.	02.	004	Dana Desa Bondo
6.	2.	02.	02.	005	Dana Desa Guyangan
6.	2.	02.	02.	006	Dana Desa Jerukwangi
6.	2.	02.	02.	007	Dana Desa Kedungleper
6.	2.	02.	02.	008	Dana Desa Kepuk
6.	2.	02.	02.	009	Dana Desa Papasan
6.	2.	02.	02.	010	Dana Desa Srikandang
6.	2.	02.	02.	011	Dana Desa Tengguli
6.	2.	02.	02.	012	Dana Desa Wedelan
6.	2.	02.	02.	013	Dana Desa Bantrung
6.	2.	02.	02.	014	Dana Desa Batealit
6.	2.	02.	02.	015	Dana Desa Bawu
6.	2.	02.	02.	016	Dana Desa Bringin
6.	2.	02.	02.	017	Dana Desa Geneng
6.	2.	02.	02.	018	Dana Desa Mindahan
6.	2.	02.	02.	019	Dana Desa Mindahan Kidul
6.	2.	02.	02.	020	Dana Desa Ngasem
6.	2.	02.	02.	021	Dana Desa Pekalongan
6.	2.	02.	02.	022	Dana Desa Raguklampitan
6.	2.	02.	02.	023	Dana Desa Somosari
6.	2.	02.	02.	024	Dana Desa Bandungharjo
6.	2.	02.	02.	025	Dana Desa Banyumanis
6.	2.	02.	02.	026	Dana Desa Blingoh
6.	2.	02.	02.	027	Dana Desa Clering
6.	2.	02.	02.	028	Dana Desa Jugo
6.	2.	02.	02.	029	Dana Desa Sumberrejo
6.	2.	02.	02.	030	Dana Desa Tulakan
6.	2.	02.	02.	031	Dana Desa Ujungwatu
6.	2.	02.	02.	032	Dana Desa Bandengan
6.	2.	02.	02.	033	Dana Desa KedungCino
6.	2.	02.	02.	034	Dana Desa Kuwasen
6.	2.	02.	02.	035	Dana Desa Mulyoharjo
6.	2.	02.	02.	036	Dana Desa Wonorejo
6.	2.	02.	02.	037	Dana Desa Bakalan
6.	2.	02.	02.	038	Dana Desa Bandungrejo
6.	2.	02.	02.	039	Dana Desa Banyuputih
6.	2.	02.	02.	040	Dana Desa Batukali
6.	2.	02.	02.	041	Dana Desa Damarjati
6.	2.	02.	02.	042	Dana Desa Kriyan
6.	2.	02.	02.	043	Dana Desa Manyargading

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	02.	044	Dana Desa Margoyoso
6.	2.	02.	02.	045	Dana Desa Pendosawalan
6.	2.	02.	02.	046	Dana Desa Purwogondo
6.	2.	02.	02.	047	Dana Desa Robayan
6.	2.	02.	02.	048	Dana Desa Sendang
6.	2.	02.	02.	049	Dana Desa KarimunJawa
6.	2.	02.	02.	050	Dana Desa Kemujan
6.	2.	02.	02.	051	Dana Desa Nyamuk
6.	2.	02.	02.	052	Dana Desa Parang
6.	2.	02.	02.	053	Dana Desa Bugel
6.	2.	02.	02.	054	Dana Desa Bulak Baru
6.	2.	02.	02.	055	Dana Desa Dongos
6.	2.	02.	02.	056	Dana Desa Jondang
6.	2.	02.	02.	057	Dana Desa Kalianyar
6.	2.	02.	02.	058	Dana Desa Karangaji
6.	2.	02.	02.	059	Dana Desa Kedungmalang
6.	2.	02.	02.	060	Dana Desa Kerso
6.	2.	02.	02.	061	Dana Desa Menganti
6.	2.	02.	02.	062	Dana Desa Panggung
6.	2.	02.	02.	063	Dana Desa Rau
6.	2.	02.	02.	064	Dana Desa Sowon Kidul
6.	2.	02.	02.	065	Dana Desa Sowon Lor
6.	2.	02.	02.	066	Dana Desa Sukosono
6.	2.	02.	02.	067	Dana Desa Surodadi
6.	2.	02.	02.	068	Dana Desa Tanggultlare
6.	2.	02.	02.	069	Dana Desa Tedunan
6.	2.	02.	02.	070	Dana Desa Wanusobo
6.	2.	02.	02.	071	Dana Desa Bumiharjo
6.	2.	02.	02.	072	Dana Desa Damarwulan
6.	2.	02.	02.	073	Dana Desa Gelang
6.	2.	02.	02.	074	Dana Desa Jlegong
6.	2.	02.	02.	075	Dana Desa Kaligarang
6.	2.	02.	02.	076	Dana Desa Kelet
6.	2.	02.	02.	077	Dana Desa Keling
6.	2.	02.	02.	078	Dana Desa Klepu
6.	2.	02.	02.	079	Dana Desa Kunir
6.	2.	02.	02.	080	Dana Desa Tempur
6.	2.	02.	02.	081	Dana Desa Tunahan
6.	2.	02.	02.	082	Dana Desa Watuaji
6.	2.	02.	02.	083	Dana Desa Balong
6.	2.	02.	02.	084	Dana Desa Bucu
6.	2.	02.	02.	085	Dana Desa Cepogo
6.	2.	02.	02.	086	Dana Desa Dermolo
6.	2.	02.	02.	087	Dana Desa Dudakawu
6.	2.	02.	02.	088	Dana Desa Jinggotan
6.	2.	02.	02.	089	Dana Desa Kaliaman
6.	2.	02.	02.	090	Dana Desa Kancilan
6.	2.	02.	02.	091	Dana Desa Pendem
6.	2.	02.	02.	092	Dana Desa Sumanding



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	02.	093	Dana Desa Tubanan
6.	2.	02.	02.	094	Dana Desa Bandung
6.	2.	02.	02.	095	Dana Desa Buaran
6.	2.	02.	02.	096	Dana Desa Bungu
6.	2.	02.	02.	097	Dana Desa Datar
6.	2.	02.	02.	098	Dana Desa Jebol
6.	2.	02.	02.	099	Dana Desa Kuanyar
6.	2.	02.	02.	100	Dana Desa Mayong Kidul
6.	2.	02.	02.	101	Dana Desa Mayong Lor
6.	2.	02.	02.	102	Dana Desa Ngroto
6.	2.	02.	02.	103	Dana Desa Pancur
6.	2.	02.	02.	104	Dana Desa Paren
6.	2.	02.	02.	105	Dana Desa Pelang
6.	2.	02.	02.	106	Dana Desa Pelemkerep
6.	2.	02.	02.	107	Dana Desa Pule
6.	2.	02.	02.	108	Dana Desa Rajekwesi
6.	2.	02.	02.	109	Dana Desa Sengonbugel
6.	2.	02.	02.	110	Dana Desa Singorojo
6.	2.	02.	02.	111	Dana Desa Tigajuru
6.	2.	02.	02.	112	Dana Desa Jambu
6.	2.	02.	02.	113	Dana Desa Jambu Timur
6.	2.	02.	02.	114	Dana Desa Karanggondang
6.	2.	02.	02.	115	Dana Desa Mororejo
6.	2.	02.	02.	116	Dana Desa Sekuro
6.	2.	02.	02.	117	Dana Desa Sinanggul
6.	2.	02.	02.	118	Dana Desa Srobyong
6.	2.	02.	02.	119	Dana Desa Suwawal
6.	2.	02.	02.	120	Dana Desa Bategede
6.	2.	02.	02.	121	Dana Desa BendanPete
6.	2.	02.	02.	122	Dana Desa Blimbingrejo
6.	2.	02.	02.	123	Dana Desa Daren
6.	2.	02.	02.	124	Dana Desa Dorang
6.	2.	02.	02.	125	Dana Desa Gemiring Kidul
6.	2.	02.	02.	126	Dana Desa Gemiring Lor
6.	2.	02.	02.	127	Dana Desa Jatisari
6.	2.	02.	02.	128	Dana Desa Karangnongko
6.	2.	02.	02.	129	Dana Desa Muryolobo
6.	2.	02.	02.	130	Dana Desa Nalumsari
6.	2.	02.	02.	131	Dana Desa Ngetuk
6.	2.	02.	02.	132	Dana Desa Pringtulis
6.	2.	02.	02.	133	Dana Desa Tritis
6.	2.	02.	02.	134	Dana Desa Tunggulpandean
6.	2.	02.	02.	135	Dana Desa Bulungan
6.	2.	02.	02.	136	Dana Desa Kawak
6.	2.	02.	02.	137	Dana Desa Lebak
6.	2.	02.	02.	138	Dana Desa Mambak
6.	2.	02.	02.	139	Dana Desa Plajan
6.	2.	02.	02.	140	Dana Desa Slagi
6.	2.	02.	02.	141	Dana Desa Suwawal Timur

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	02.	142	Dana Desa Tanjung
6.	2.	02.	02.	143	Dana Desa Gemulung
6.	2.	02.	02.	144	Dana Desa Gerdu
6.	2.	02.	02.	145	Dana Desa Kaliombo
6.	2.	02.	02.	146	Dana Desa Karangrandu
6.	2.	02.	02.	147	Dana Desa Krasak
6.	2.	02.	02.	148	Dana Desa Lebuawu
6.	2.	02.	02.	149	Dana Desa Ngeling
6.	2.	02.	02.	150	Dana Desa Pecangaan Kulon
6.	2.	02.	02.	151	Dana Desa Pecangaan Wetan
6.	2.	02.	02.	152	Dana Desa Pulodarat
6.	2.	02.	02.	153	Dana Desa Rengging
6.	2.	02.	02.	154	Dana Desa Troso
6.	2.	02.	02.	155	Dana Desa Demangan
6.	2.	02.	02.	156	Dana Desa Kecapi
6.	2.	02.	02.	157	Dana Desa Krapyak
6.	2.	02.	02.	158	Dana Desa Langon
6.	2.	02.	02.	159	Dana Desa Mangunan
6.	2.	02.	02.	160	Dana Desa Mantingan
6.	2.	02.	02.	161	Dana Desa Ngabul
6.	2.	02.	02.	162	Dana Desa Petekeyan
6.	2.	02.	02.	163	Dana Desa Platar
6.	2.	02.	02.	164	Dana Desa Semat
6.	2.	02.	02.	165	Dana Desa Senenan
6.	2.	02.	02.	166	Dana Desa Sukodono
6.	2.	02.	02.	167	Dana Desa Tahunan
6.	2.	02.	02.	168	Dana Desa Tegalsambi
6.	2.	02.	02.	169	Dana Desa TelukAwur
6.	2.	02.	02.	170	Dana Desa Brantaksekarjati
6.	2.	02.	02.	171	Dana Desa Bugo
6.	2.	02.	02.	172	Dana Desa Gedangan
6.	2.	02.	02.	173	Dana Desa Gidangelo
6.	2.	02.	02.	174	Dana Desa Guwosobokerto
6.	2.	02.	02.	175	Dana Desa Kalipucangkulon
6.	2.	02.	02.	176	Dana Desa Kalipucangwetan
6.	2.	02.	02.	177	Dana Desa Karanganyar
6.	2.	02.	02.	178	Dana Desa Kedungsarimulyo
6.	2.	02.	02.	179	Dana Desa Kendengsidialit
6.	2.	02.	02.	180	Dana Desa Ketilengsingolelo
6.	2.	02.	02.	181	Dana Desa Sidigede
6.	2.	02.	02.	182	Dana Desa Teluk Wetan
6.	2.	02.	02.	183	Dana Desa Ujungpandan
6.	2.	02.	02.	184	Dana Desa Welahan
6.	2.	02.	03.		<b>Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa</b>
6.	2.	02.	03.	001	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bangsri
6.	2.	02.	03.	002	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Banjar Agung
6.	2.	02.	03.	003	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Banjaran
6.	2.	02.	03.	004	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bondo
6.	2.	02.	03.	005	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Guyangan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	03.	006	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jerukwangi
6.	2.	02.	03.	007	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kedungleper
6.	2.	02.	03.	008	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kepuk
6.	2.	02.	03.	009	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Papasan
6.	2.	02.	03.	010	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Srikandang
6.	2.	02.	03.	011	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tengguli
6.	2.	02.	03.	012	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Wedelan
6.	2.	02.	03.	013	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bantrung
6.	2.	02.	03.	014	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Batealit
6.	2.	02.	03.	015	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bawu
6.	2.	02.	03.	016	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bringin
6.	2.	02.	03.	017	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Geneng
6.	2.	02.	03.	018	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mindahan
6.	2.	02.	03.	019	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mindahan Kidul
6.	2.	02.	03.	020	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngasem
6.	2.	02.	03.	021	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pekalongan
6.	2.	02.	03.	022	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Raguklampitan
6.	2.	02.	03.	023	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Somosari
6.	2.	02.	03.	024	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bandungharjo
6.	2.	02.	03.	025	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Banyumanis
6.	2.	02.	03.	026	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Blingoh
6.	2.	02.	03.	027	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Clering
6.	2.	02.	03.	028	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jugo
6.	2.	02.	03.	029	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sumberrejo
6.	2.	02.	03.	030	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tulakan
6.	2.	02.	03.	031	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ujungwatu
6.	2.	02.	03.	032	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bandengan
6.	2.	02.	03.	033	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa KedungCino
6.	2.	02.	03.	034	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kuwasen
6.	2.	02.	03.	035	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mulyoharjo
6.	2.	02.	03.	036	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Wonorejo
6.	2.	02.	03.	037	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bakalan
6.	2.	02.	03.	038	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bandungrejo
6.	2.	02.	03.	039	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Banyuputih
6.	2.	02.	03.	040	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Batukali
6.	2.	02.	03.	041	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Damarjati
6.	2.	02.	03.	042	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kriyan
6.	2.	02.	03.	043	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Manyargading
6.	2.	02.	03.	044	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Margoyoso
6.	2.	02.	03.	045	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pendosawalan
6.	2.	02.	03.	046	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Purwogondo
6.	2.	02.	03.	047	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Robayan
6.	2.	02.	03.	048	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sendang
6.	2.	02.	03.	049	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa KarimunJawa
6.	2.	02.	03.	050	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kemujan
6.	2.	02.	03.	051	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Nyamuk
6.	2.	02.	03.	052	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Parang
6.	2.	02.	03.	053	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bugel
6.	2.	02.	03.	054	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bulak Baru

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	03.	055	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Dongos
6.	2.	02.	03.	056	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jondang
6.	2.	02.	03.	057	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kalianyar
6.	2.	02.	03.	058	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karangaji
6.	2.	02.	03.	059	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kedungmalang
6.	2.	02.	03.	060	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kerso
6.	2.	02.	03.	061	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Menganti
6.	2.	02.	03.	062	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Panggung
6.	2.	02.	03.	063	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Rau
6.	2.	02.	03.	064	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sowon Kidul
6.	2.	02.	03.	065	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sowon Lor
6.	2.	02.	03.	066	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sukosono
6.	2.	02.	03.	067	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Surodadi
6.	2.	02.	03.	068	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tanggultlare
6.	2.	02.	03.	069	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tedunan
6.	2.	02.	03.	070	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Wanusobo
6.	2.	02.	03.	071	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bumiharjo
6.	2.	02.	03.	072	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Damarwulan
6.	2.	02.	03.	073	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gelang
6.	2.	02.	03.	074	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jlegong
6.	2.	02.	03.	075	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kaligarang
6.	2.	02.	03.	076	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kelet
6.	2.	02.	03.	077	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Keling
6.	2.	02.	03.	078	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Klepu
6.	2.	02.	03.	079	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kunir
6.	2.	02.	03.	080	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tempur
6.	2.	02.	03.	081	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tunahan
6.	2.	02.	03.	082	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Watuaji
6.	2.	02.	03.	083	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Balong
6.	2.	02.	03.	084	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bucu
6.	2.	02.	03.	085	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Cepogo
6.	2.	02.	03.	086	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Dermolo
6.	2.	02.	03.	087	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Dudakawu
6.	2.	02.	03.	088	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jinggotan
6.	2.	02.	03.	089	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kaliaman
6.	2.	02.	03.	090	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kancilan
6.	2.	02.	03.	091	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pendem
6.	2.	02.	03.	092	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sumanding
6.	2.	02.	03.	093	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tubanan
6.	2.	02.	03.	094	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bandung
6.	2.	02.	03.	095	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Buaran
6.	2.	02.	03.	096	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bungu
6.	2.	02.	03.	097	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Datar
6.	2.	02.	03.	098	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jebol
6.	2.	02.	03.	099	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kuanyar
6.	2.	02.	03.	100	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mayong Kidul
6.	2.	02.	03.	101	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mayong Lor
6.	2.	02.	03.	102	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngroto
6.	2.	02.	03.	103	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pancur

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	02.	03.	104	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Paren
6.	2.	02.	03.	105	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pelang
6.	2.	02.	03.	106	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pelemkerep
6.	2.	02.	03.	107	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pule
6.	2.	02.	03.	108	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Rajekwesi
6.	2.	02.	03.	109	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sengonbugel
6.	2.	02.	03.	110	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Singorojo
6.	2.	02.	03.	111	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tigajuru
6.	2.	02.	03.	112	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jambu
6.	2.	02.	03.	113	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jambu Timur
6.	2.	02.	03.	114	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karanggondang
6.	2.	02.	03.	115	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mororejo
6.	2.	02.	03.	116	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sekuro
6.	2.	02.	03.	117	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sinanggul
6.	2.	02.	03.	118	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Srobyong
6.	2.	02.	03.	119	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Suwawal
6.	2.	02.	03.	120	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bategede
6.	2.	02.	03.	121	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa BendanPete
6.	2.	02.	03.	122	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Blimbingrejo
6.	2.	2.	03.	123	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Daren
6.	2.	2.	03.	124	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Dorang
6.	2.	2.	03.	125	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gemiring Kidul
6.	2.	2.	03.	126	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gemiring Lor
6.	2.	2.	03.	127	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jatisari
6.	2.	2.	03.	128	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karangnongko
6.	2.	2.	03.	129	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Muryolobo
6.	2.	2.	03.	130	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Nalumsari
6.	2.	2.	03.	131	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngetuk
6.	2.	2.	03.	132	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pringtulis
6.	2.	2.	03.	133	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tritis
6.	2.	2.	03.	134	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tunggulpandean
6.	2.	2.	03.	135	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bulungan
6.	2.	2.	03.	136	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kawak
6.	2.	2.	03.	137	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Lebak
6.	2.	2.	03.	138	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mambak
6.	2.	2.	03.	139	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Plajan
6.	2.	2.	03.	140	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Slagi
6.	2.	2.	03.	141	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Suwawal Timur
6.	2.	2.	03.	142	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tanjung
6.	2.	2.	03.	143	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gemulung
6.	2.	2.	03.	144	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gerdu
6.	2.	2.	03.	145	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kaliombo
6.	2.	2.	03.	146	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karangrandu
6.	2.	2.	03.	147	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Krasak
6.	2.	2.	03.	148	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Lebuawu
6.	2.	2.	03.	149	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngeling
6.	2.	2.	03.	150	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pecangaan Kulon
6.	2.	2.	03.	151	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pecangaan Wetan
6.	2.	2.	03.	152	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pulodarat

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R i b n y e c i k a n	U R A I A N
6.	2.	2.	03.	153	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Rengging
6.	2.	2.	03.	154	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Troso
6.	2.	2.	03.	155	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Demangan
6.	2.	2.	03.	156	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kecapi
6.	2.	2.	03.	157	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Krapyak
6.	2.	2.	03.	158	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Langon
6.	2.	2.	03.	159	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mangunan
6.	2.	2.	03.	160	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mantingan
6.	2.	2.	03.	161	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngabul
6.	2.	2.	03.	162	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Petekeyan
6.	2.	2.	03.	163	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Platar
6.	2.	2.	03.	164	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Semat
6.	2.	2.	03.	165	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Senenan
6.	2.	2.	03.	166	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sukodono
6.	2.	2.	03.	167	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahunan
6.	2.	2.	03.	168	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tegalsambi
6.	2.	2.	03.	169	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa TelukAwur
6.	2.	2.	03.	170	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Brantaksekarjati
6.	2.	2.	03.	171	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bugo
6.	2.	2.	03.	172	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gedangan
6.	2.	2.	03.	173	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gidangelo
6.	2.	2.	03.	174	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Guwosobokerto
6.	2.	2.	03.	175	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kalipucangkulon
6.	2.	2.	03.	176	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kalipucangwetan
6.	2.	2.	03.	177	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karanganyar
6.	2.	2.	03.	178	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kedungsarimulyo
6.	2.	2.	03.	179	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kendengsidialit
6.	2.	2.	03.	180	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ketilengsingolelo
6.	2.	2.	03.	181	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sidigede
6.	2.	2.	03.	182	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Teluk Wetan
6.	2.	2.	03.	183	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ujungpandan
6.	2.	2.	03.	184	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Welahan
7.					<b>PEMBIAYAAN</b>
7.	1.				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>
7.	1.	1.			<b>Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya</b>
7.	1.	1.	01.		<b>Pelampauan Penerimaan PAD</b>
7.	1.	1.	01.	001	Pajak Daerah
7.	1.	1.	01.	002	Retribusi Daerah
7.	1.	1.	01.	003	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.	1.	1.	01.	004	Lain-lain PAD yang Sah
7.	1.	1.	02.		<b>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer</b>
7.	1.	1.	02.	001	Transfer Pemerintah Pusat
7.	1.	1.	02.	002	Pendapatan Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
7.	1.	1.	03.		<b>Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>
7.	1.	1.	03.	001	Pendapatan Hibah
7.	1.	1.	03.	002	Pendapatan Dana Darurat
7.	1.	1.	03.	003	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
7.	1.	1.	04.		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
7.	1.	1.	04.	001	Sisa Penghematan Belanja Operasi
7.	1.	1.	04.	002	Sisa Penghematan Belanja Modal
7.	1.	1.	04.	003	Sisa Penghematan Belanja Tak Terduga
7.	1.	1.	04.	004	Sisa Penghematan Transfer
7.	1.	2.			Pencairan Dana Cadangan
7.	1.	2.	01.		Pencairan Dana Cadangan
7.	1.	2.	01.	001	Pencairan Dana Cadangan
7.	1.	3.			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.	1.	3.	01.		Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
7.	1.	3.	01.	001	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
7.	1.	3.	02.		Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak Ketiga
7.	1.	3.	02.	001	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
7.	1.	4.			Pinjaman Dalam Negeri
7.	1.	4.	01.		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7.	1.	4.	01.	001	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7.	1.	4.	02.		Pinjaman Dalam Negeri dari pemerintah daerah lain
7.	1.	4.	02.	001	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah daerah lain
7.	1.	4.	03.		Pinjaman Dalam Negeri dari lembaga keuangan bank
7.	1.	4.	03.	001	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bank
7.	1.	4.	04.		Pinjaman Dalam Negeri dari lembaga keuangan bukan bank
7.	1.	4.	04.	001	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga keuangan bukan bank
7.	1.	4.	05.		Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
7.	1.	4.	05.	001	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
7.	1.	4.	06.		Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
7.	1.	4.	06.	001	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
7.	1.	5.			penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
7.	1.	5.	01.		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7.	1.	5.	01.	001	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7.	1.	5.	02.		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7.	1.	5.	02.	001	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7.	1.	5.	03.		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7.	1.	5.	03.	001	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7.	1.	6.			Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
7.	1.	6.	01.		Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
7.	1.	6.	01.	001	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
7.	2.				PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.	2.	1.			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7.	2.	1.	01.		Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7.	2.	1.	01.	001	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7.	2.	1.	02.		Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i n y e c i k a n	U R A I A N
7.	2.	1.	02.	001	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah daerah lain
7.	2.	1.	03.		<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank</b>
7.	2.	1.	03.	001	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
7.	2.	1.	04.		<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank</b>
7.	2.	1.	04.	001	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan bukan bank
7.	2.	1.	05.		<b>Pelunasan/pembelian kembali Obligasi Daerah</b>
7.	2.	1.	05.	001	Pelunasan/pembelian kembali Obligasi Daerah
7.	2.	1.	06.		<b>Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya</b>
7.	2.	1.	06.	001	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
7.	2.	2.			<b>Penyertaan Modal Daerah</b>
7.	2.	2.	01.		<b>Penyertaan Modal pada BUMN</b>
7.	2.	2.	01.	001	Penyertaan Modal pada BUMN
7.	2.	2.	02.		<b>Penyertaan Modal pada BUMD</b>
7.	2.	2.	02.	001	Penyertaan Modal pada BUMD
7.	2.	2.	03.		<b>Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta</b>
7.	2.	2.	03.	001	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7.	2.	3.			<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
7.	2.	3.	01.		<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
7.	2.	3.	01.	001	Pembentukan Dana Cadangan
7.	2.	4.			<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>
7.	2.	4.	01.		<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara</b>
7.	2.	4.	01.	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7.	2.	4.	02.		<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah</b>
7.	2.	4.	02.	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7.	2.	4.	03.		<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>
7.	2.	4.	03.	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7.	2.	5.			<b>Pengeluaran Pembiayaan lainnya</b>
7.	2.	5.	01.		<b>Pengeluaran Pembiayaan lainnya</b>
7.	2.	5.	01.	001	Pengeluaran Pembiayaan lainnya
8.					<b>PENDAPATAN-LO</b>
8.	1.				<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>
8.	1.	1.			<b>Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>
8.	1.	1.	01.		<b>Pendapatan Pajak Hotel - LO</b>
8.	1.	1.	01.	001	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima Berlian - LO
8.	1.	1.	01.	002	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima - LO
8.	1.	1.	01.	003	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Empat - LO
8.	1.	1.	01.	004	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga - LO
8.	1.	1.	01.	005	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua - LO
8.	1.	1.	01.	006	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu - LO
8.	1.	1.	01.	007	Pendapatan Pajak Hotel Melati - LO
8.	1.	1.	01.	008	Pendapatan Pajak Motel - LO
8.	1.	1.	01.	009	Pendapatan Pajak Losmen - LO
8.	1.	1.	01.	010	Pendapatan Pajak Gubug Pariwisata - LO
8.	1.	1.	01.	011	Pendapatan Pajak Wisma Pariwisata - LO



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
8.	1.	1.	01.	012	Pendapatan Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO
8.	1.	1.	01.	013	Pendapatan Pajak Rumah Kos - LO
8.	1.	1.	01.	014	Pendapatan Pajak Cottage - LO
8.	1.	1.	01.	015	Pendapatan Pajak Pesanggrahan/ Hostel - LO
8.					
8.	1.	1.	02.		<b>Pendapatan Pajak Restoran - LO</b>
8.	1.	1.	02.	001	Pendapatan Pajak Restoran - LO
8.	1.	1.	02.	002	Pendapatan Pajak Rumah Makan - LO
8.	1.	1.	02.	003	Pendapatan Pajak Kafetaria - LO
8.	1.	1.	02.	004	Pendapatan Pajak Kantin - LO
8.	1.	1.	02.	005	Pendapatan Pajak Jasa Boga/Katering - LO
8.	1.	1.	02.	006	Pendapatan Pajak Warung - LO
8.	1.	1.	02.	007	Pendapatan Pajak Bar - LO
8.					
8.	1.	1.	03.		<b>Pendapatan Pajak Hiburan</b>
8.	1.	1.	03.	001	Pendapatan Pajak Tontonan Film - LO
8.	1.	1.	03.	002	Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana - LO
8.	1.	1.	03.	003	Pendapatan Pajak Kontes Kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya - LO
8.	1.	1.	03.	004	Pendapatan Pajak Pameran - LO
8.	1.	1.	03.	005	Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya - LO
8.	1.	1.	03.	006	Pendapatan Pajak Sirkus, Akrobat dan Sulap - LO
8.	1.	1.	03.	007	Pendapatan Pajak Permainan Bilyar, Golf dan Bowling - LO
8.	1.	1.	03.	008	Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan - LO
8.	1.	1.	03.	009	Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LO
8.	1.	1.	03.	010	Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga - LO
8.					
8.	1.	1.	04.		<b>Pendapatan Pajak Reklame - LO</b>
8.	1.	1.	04.	001	Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya - LO
8.	1.	1.	04.	002	Pendapatan Pajak Reklame Kain - LO
8.	1.	1.	04.	003	Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker - LO
8.	1.	1.	04.	004	Pendapatan Pajak Reklame Selebaran - LO
8.	1.	1.	04.	005	Pendapatan Pajak Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan - LO
8.	1.	1.	04.	006	Pendapatan Pajak Reklame Udara - LO
8.	1.	1.	04.	007	Pendapatan Pajak Reklame Apung - LO
8.	1.	1.	04.	008	Pendapatan Pajak Reklame Suara - LO
8.	1.	1.	04.	009	Pendapatan Pajak Reklame Film/ Slide - LO
8.	1.	1.	04.	010	Pendapatan Pajak Reklame Peragaan - LO
8.	1.	1.	05.		<b>Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO</b>
8.	1.	1.	05.	001	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO
8.	1.	1.	06.		<b>Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO</b>
8.	1.	1.	06.	001	Pendapatan Pajak Asbes - LO
8.	1.	1.	06.	002	Pendapatan Pajak Batu Tulis - LO
8.	1.	1.	06.	003	Pendapatan Pajak Batu Setengah Permata - LO
8.	1.	1.	06.	004	Pendapatan Pajak Batu Kapur - LO
8.	1.	1.	06.	005	Pendapatan Pajak Batu Apung - LO
8.	1.	1.	06.	006	Pendapatan Pajak Batu Permata - LO

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i n y e c e k i k a n	U R A I A N
8.	1.	1.	06.	007	Pendapatan Pajak Bentonit - LO
8.	1.	1.	06.	008	Pendapatan Pajak Dolomit - LO
8.	1.	1.	06.	009	Pendapatan Pajak Feldspar - LO
8.	1.	1.	06.	010	Pendapatan Pajak Garam Batu (halite) - LO
8.	1.	1.	06.	011	Pendapatan Pajak Grafit - LO
8.	1.	1.	06.	012	Pendapatan Pajak Granit/Andesit - LO
8.	1.	1.	06.	013	Pendapatan Pajak Gips - LO
8.	1.	1.	06.	014	Pendapatan Pajak Kalsit - LO
8.	1.	1.	06.	015	Pendapatan Pajak Kaolin - LO
8.	1.	1.	06.	016	Pendapatan Pajak Leusit - LO
8.	1.	1.	06.	017	Pendapatan Pajak Magnesit - LO
8.	1.	1.	06.	018	Pendapatan Pajak Mika - LO
8.	1.	1.	06.	019	Pendapatan Pajak Marmer - LO
8.	1.	1.	06.	020	Pendapatan Pajak Nitrat - LO
8.	1.	1.	06.	021	Pendapatan Pajak Opsidien - LO
8.	1.	1.	06.	022	Pendapatan Pajak Oker - LO
8.	1.	1.	06.	023	Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil - LO
8.	1.	1.	06.	024	Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa - LO
8.	1.	1.	06.	025	Pendapatan Pajak Perlit - LO
8.	1.	1.	06.	026	Pendapatan Pajak Phospat - LO
8.	1.	1.	06.	027	Pendapatan Pajak Talk - LO
8.	1.	1.	06.	028	Pendapatan Pajak Tanah Serap (fullers earth) - LO
8.	1.	1.	06.	029	Pendapatan Pajak Tanah Diatome - LO
8.	1.	1.	06.	030	Pendapatan Pajak Tanah Liat - LO
8.	1.	1.	06.	031	Pendapatan Pajak Tawas (alum) - LO
8.	1.	1.	06.	032	Pendapatan Pajak Tras - LO
8.	1.	1.	06.	033	Pendapatan Pajak Yarosif - LO
8.	1.	1.	06.	034	Pendapatan Pajak Zeolit - LO
8.	1.	1.	06.	035	Pendapatan Pajak Basal - LO
8.	1.	1.	06.	036	Pendapatan Pajak Trakkit - LO
8.	1.	1.	06.	037	Pendapatan Pajak Tanah Urug - LO
8.	1.	1.	06.	038	Pendapatan Pajak Andesit - LO
8.	1.	1.	06.	039	Mineral bukan logam dan lainnya - LO
8.	1.	1.	07.		<b>Pendapatan Pajak Parkir - LO</b>
8.	1.	1.	07.	001	Pendapatan Pajak Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Luar Badan Jalan dan Penitipan Kendaraan Bermotor - LO
8.	1.	1.	08.		<b>Pendapatan Pajak Air Tanah - LO</b>
8.	1.	1.	08.	001	Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah - LO
8.	1.	1.	09.		<b>Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet - LO</b>
8.	1.	1.	09.	001	Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet - LO
8.	1.	1.	10.		<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO</b>
8.	1.	1.	10.	001	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8.	1.	1.	11.		<b>Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO</b>
8.	1.	1.	11.	001	Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8.	1.	1.	11.	002	Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Baru Atas Tanah dan Bangunan - LO

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
8.	1.	2.			<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>
8.	1.	2.	01.		<b>Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO</b>
8.	1.	2.	01.	001	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8.	1.	2.	01.	002	Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8.	1.	2.	01.	003	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8.	1.	2.	01.	004	Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8.	1.	2.	01.	005	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8.	1.	2.	01.	006	Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8.	1.	2.	01.	007	Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8.	1.	2.	01.	008	Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8.	1.	2.	01.	009	Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8.	1.	2.	01.	010	Pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8.	1.	2.	01.	011	Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8.	1.	2.	01.	012	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8.	1.	2.	01.	013	Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8.	1.	2.	02.		<b>Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO</b>
8.	1.	2.	02.	001	Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8.	1.	2.	02.	002	Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO
8.	1.	2.	02.	003	Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8.	1.	2.	02.	004	Pendapatan Retribusi Terminal - LO
8.	1.	2.	02.	005	Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8.	1.	2.	02.	006	Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8.	1.	2.	02.	007	Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8.	1.	2.	02.	008	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8.	1.	2.	02.	009	Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO
8.	1.	2.	02.	010	Pendapatan Retribusi Penyeberangan di Air - LO
8.	1.	2.	02.	011	Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8.	1.	2.	03.		<b>Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LO</b>
8.	1.	2.	03.	001	Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan - LO
8.	1.	2.	03.	002	Pendapatan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8.	1.	2.	03.	003	Pendapatan Retribusi Ijin Trayek - LO
8.	1.	2.	03.	004	Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan - LO
8.	1.	2.	03.	005	Pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) - LO
8.	1.	3.			<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</b>
8.	1.	3.	01.		<b>Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD - LO</b>
8.	1.	3.	01.	001	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng - LO
8.	1.	3.	01.	002	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha - LO
8.	1.	3.	01.	003	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara - LO
8.	1.	3.	01.	004	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha - LO
8.	1.	3.	01.	005	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Jepara - LO
8.	1.	3.	02.		<b>Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c e k i k a n	U R A I A N
8.	1.	3.	02.	001	Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN - LO
8.	1.	3.	03.		<b>Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta - LO</b>
8.	1.	3.	03.	001	Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta - LO
8.	1.	3.	04.		<b>Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LO</b>
8.	1.	3.	04.	001	Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LO
8.	1.	4.			<b>Lain-lain PAD yang Sah - LO</b>
8.	1.	4.	01.		<b>Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO</b>
8.	1.	4.	01.	001	Hasil Penjualan Tanah- LO
8.	1.	4.	01.	002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO
8.	1.	4.	01.	003	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8.	1.	4.	01.	004	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8.	1.	4.	01.	005	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
8.	1.	4.	01.	006	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8.	1.	4.	02.		<b>Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO</b>
8.	1.	4.	02.	001	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD Sewa - LO
8.	1.	4.	02.	002	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD Kerjasama - LO
8.	1.	4.	02.	003	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD Bangun Guna Serah (BGS)/Build Operate Transfer (BOT) - LO
8.	1.	4.	02.	004	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan BMD Bangun Serah Guna (BSG)/Build Transfer Operate (BTO) - LO
8.	1.	4.	03.		<b>Pendapatan Jasa Giro - LO</b>
8.	1.	4.	03.	001	Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah - LO
8.	1.	4.	03.	002	Pendapatan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran - LO
8.	1.	4.	03.	003	Pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8.	1.	4.	04.		<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO</b>
8.	1.	4.	04.	001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO
8.	1.	4.	05.		<b>Pendapatan Bunga - LO</b>
8.	1.	4.	05.	001	Pendapatan Bunga Deposito - LO
8.	1.	4.	05.	002	Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman - LO
8.	1.	4.	05.	003	Pendapatan Bunga Lainnya - LO
8.	1.	4.	06.		<b>Pendapatan Dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO</b>
8.	1.	4.	06.	001	Pendapatan dari Tuntutan Perbendaharaan - LO
8.	1.	4.	06.	002	Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8.	1.	4.	07.		<b>Pendapatan Komisi dan Potongan - LO</b>
8.	1.	4.	07.	001	Pendapatan Komisi - LO
8.	1.	4.	07.	002	Pendapatan Potongan - LO
8.	1.	4.	08.		<b>Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing - LO</b>
8.	1.	4.	08.	001	Pendapatan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8.	1.	4.	09.		<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO</b>
8.	1.	4.	09.	001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8.	1.	4.	10		<b>Pendapatan Bunga Pajak - LO</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
8.	1.	4.	10	001	Pendapatan Bunga Pajak Hotel - LO
8.	1.	4.	10	002	Pendapatan Bunga Pajak Restoran - LO
8.	1.	4.	10	003	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan - LO
8.	1.	4.	10	004	Pendapatan Bunga Pajak Reklame - LO
8.	1.	4.	10	005	Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan - LO
8.	1.	4.	10	006	Pendapatan Bunga Pajak Parkir - LO
8.	1.	4.	10	007	Pendapatan Bunga Pajak Air Bawah Tanah - LO
8.	1.	4.	10	008	Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet - LO
8.	1.	4.	10	009	Pendapatan Bunga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8.	1.	4.	10	010	Pendapatan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8.	1.	4.	10	011	Pendapatan Bunga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8.	1.	4.	11		<b>Pendapatan Denda Pajak - LO</b>
8.	1.	4.	11	001	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8.	1.	4.	11	002	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8.	1.	4.	11	003	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8.	1.	4.	11	004	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8.	1.	4.	11	005	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8.	1.	4.	11	006	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8.	1.	4.	11	007	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah - LO
8.	1.	4.	11	008	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8.	1.	4.	11	009	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8.	1.	4.	11	010	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8.	1.	4.	11	011	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8.	1.	4.	12		<b>Pendapatan Bunga Retribusi - LO</b>
8.	1.	4.	12	001	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum - LO
8.	1.	4.	12	002	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha - LO
8.	1.	4.	12	003	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu - LO
8.	1.	4.	13		<b>Pendapatan Denda Retribusi - LO</b>
8.	1.	4.	13	001	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO
8.	1.	4.	13	002	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO
8.	1.	4.	13	003	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - LO
8.	1.	4.	14		<b>Pendapatan Denda Lainnya- LO</b>
8.	1.	4.	14	001	Pendapatan Denda Pelanggaran Peraturan Daerah- LO
8.	1.	4.	14	002	Pendapatan Denda Sewa- LO
8.	1.	4.	14	003	Pendapatan Denda Kerjasama- LO
8.	1.	4.	14	004	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah (BGS)/Build Operate Transfer (BOT)- LO
8.	1.	4.	14	005	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna (BSG)/Build Transfer Operate (BTO)- LO
8.	1.	4.	15		<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO</b>
8.	1.	4.	15	001	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8.	1.	4.	15	002	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8.	1.	4.	15	003	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman - LO
8.	1.	4.	16		<b>Pendapatan dari Pengembalian - LO</b>
8.	1.	4.	16	001	Pendapatan dari Pengembalian PPh 21 tahun sebelumnya- LO
8.	1.	4.	16	002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Daerah tahun sebelumnya - LO

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b j e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
8.	1.	4.	16	003	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya - LO
8.	1.	4.	17		<b>Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO</b>
8.	1.	4.	17	001	Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum- LO
8.	1.	4.	18		<b>Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan- LO</b>
8.	1.	4.	18	001	Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan- LO
8.	1.	4.	19		<b>Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO</b>
8.	1.	4.	19	001	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah - LO
8.	1.	4.	19	002	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan - LO
8.	1.	4.	19	003	Angsuran/Cicilan Penjualan Kios/Pasar- LO
8.	1.	4.	20		<b>Pendapatan dari Kompensasi</b>
8.	1.	4.	20	001	Pendapatan dari Kompensasi- LO
8.	1.	4.	21		<b>Pendapatan BLUD - LO</b>
8.	1.	4.	21	001	Pendapatan BLUD RSU RA Kartini - LO
8.	1.	4.	21	002	Pendapatan BLUD Puskesmas - LO
8.	1.	4.	22		<b>Pendapatan lainnya - LO</b>
8.	1.	4.	22	001	Pendapatan lainnya - LO
8.	2.				<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>
8.	2.	1.			<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO</b>
8.	2.	1.	01.		<b>Pendapatan Dana Bagi Hasil - LO</b>
8.	2.	1.	01.	001	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO
8.	2.	1.	01.	002	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
8.	2.	1.	01.	003	Pendapatan Bagi Hasil dari Cukai - LO
8.	2.	1.	01.	004	Pendapatan Bagi Hasil dari SDA - LO
8.	2.	1.	02.		<b>Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO</b>
8.	2.	1.	02.	001	Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO
8.	2.	1.	02.	002	Pendapatan Dana Alokasi Umum Tambahan - LO
8.	2.	1.	03.		<b>Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik - LO</b>
8.	2.	1.	03.	001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan - LO
8.	2.	1.	03.	002	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - LO
8.	2.	1.	03.	003	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Air Minum - LO
8.	2.	1.	03.	004	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Sanitasi - LO
8.	2.	1.	03.	005	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman - LO
8.	2.	1.	03.	006	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Jalan - LO
8.	2.	1.	03.	007	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Sosial - LO
8.	2.	1.	03.	008	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pendidikan - LO
8.	2.	1.	03.	009	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Kesehatan - LO
8.	2.	1.	03.	010	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Air Minum - LO
8.	2.	1.	03.	011	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Sanitasi - LO
8.	2.	1.	03.	012	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi - LO
8.	2.	1.	03.	013	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian - LO
8.	2.	1.	03.	014	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan - LO
8.	2.	1.	03.	015	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pasar - LO
8.	2.	1.	03.	016	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah - LO

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
8.	2.	1.	03.	017	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Transportasi Laut - LO
8.	2.	1.	03.	018	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8.	2.	1.	03.	019	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Perumahan dan Permukiman - LO
8.	2.	1.	03.	020	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pariwisata - LO
8.	2.	1.	03.	021	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - LO
8.	2.	1.	03.	022	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan - LO
8.	2.	1.	03.	023	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan - LO
8.	2.	1.	03.	024	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman - LO
8.	2.	1.	03.	025	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Air Minum - LO
8.	2.	1.	03.	026	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Sanitasi - LO
8.	2.	1.	03.	027	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Laut - LO
8.	2.	1.	03.	028	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8.	2.	1.	04.		<b>Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO</b>
8.	2.	1.	04.	001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LO
8.	2.	1.	04.	002	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru - LO
8.	2.	1.	04.	003	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru - LO
8.	2.	1.	04.	004	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan - LO
8.	2.	1.	04.	005	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas
8.	2.	1.	04.	006	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan - LO
8.	2.	1.	04.	007	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB - LO
8.	2.	1.	04.	008	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Khusus Guru - LO
8.	2.	1.	04.	009	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO
8.	2.	1.	04.	010	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LO
8.	2.	1.	04.	011	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum - LO
8.	2.	1.	04.	012	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - LO
8.	2.	1.	04.	013	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata - LO
8.	2.	1.	05.		<b>Pendapatan Dana Insentif Daerah - LO</b>
8.	2.	1.	05.	001	Pendapatan Dana Insentif Daerah - LO
8.	2.	1.	06.		<b>Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO</b>
8.	2.	1.	06.	001	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
8.	2.	1.	07.		<b>Pendapatan Dana Keistimewaan - LO</b>
8.	2.	1.	07.	001	Pendapatan Dana Keistimewaan - LO
8.	2.	1.	08.		<b>Pendapatan Dana Desa - LO</b>
8.	2.	1.	08.	001	Pendapatan Dana Desa - LO

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
8.	2.	2.			Pendapatan Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8.	2.	2.	01.		Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO
8.	2.	2.	01.	001	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8.	2.	2.	01.	002	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8.	2.	2.	01.	003	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8.	2.	2.	01.	004	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO
8.	2.	2.	01.	005	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO
8.	2.	2.	02.		Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Lainnya - LO
8.	2.	2.	02.	001	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Lainnya - LO
8.	2.	2.	03.		Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Lainnya - LO
8.	2.	2.	03.	001	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Lainnya - LO
8.	2.	2.	04.		Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8.	2.	2.	04.	001	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8.	2.	2.	05.		Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO
8.	2.	2.	05.	001	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO
8.	2.	2.	06.		Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lainnya - LO
8.	2.	2.	06.	001	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lainnya - LO
8.	2.	2.	07.		Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota Lainnya - LO
8.	2.	2.	07.	001	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota Lainnya - LO
8.	3.				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
8.	3.	1.			Pendapatan Hibah - LO
8.	3.	1.	01.		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO
8.	3.	1.	01.	001	Pendapatan Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah - LO
8.	3.	1.	01.	002	Pendapatan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat - LO
8.	3.	1.	01.	003	Pendapatan Dana BOS - LO
8.	3.	1.	02.		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8.	3.	1.	02.	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8.	3.	1.	03.		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO
8.	3.	1.	03.	001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO
8.	3.	1.	04.		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8.	3.	1.	04.	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga dalam Negeri - LO
8.	3.	1.	04.	002	Pendapatan Hibah dari Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8.	3.	1.	05.		Pendapatan Hibah dari Luar Negeri - LO
8.	3.	1.	05.	001	Pendapatan Hibah dari Bilateral - LO
8.	3.	1.	05.	002	Pendapatan Hibah dari Multilateral - LO
8.	3.	1.	05.	003	Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya - LO
8.	3.	2.			Pendapatan Dana Darurat - LO
8.	3.	2.	01.		Pendapatan Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8.	3.	2.	01.	001	Pendapatan Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8.	3.	3.			Pendapatan Lainnya - LO
8.	3.	3.	01.		Pendapatan Lainnya - LO
8.	3.	3.	01.	001	Pendapatan Lainnya - LO



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i a n	U R A I A N
9.					<b>Beban</b>
9.	1.				<b>Beban Operasi</b>
9.	1.	1.			<b>Beban Pegawai</b>
9.	1.	1.	01.		<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>
9.	1.	1.	01.	001	Gaji Pokok ASN
9.	1.	1.	01.	002	Tunjangan Keluarga ASN
9.	1.	1.	01.	003	Tunjangan Jabatan ASN
9.	1.	1.	01.	004	Tunjangan Fungsional ASN
9.	1.	1.	01.	005	Tunjangan Fungsional Umum ASN
9.	1.	1.	01.	006	Tunjangan Beras ASN
9.	1.	1.	01.	007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
9.	1.	1.	01.	008	Pembulatan Gaji ASN
9.	1.	1.	01.	009	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN
9.	1.	1.	01.	010	Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
9.	1.	1.	01.	011	Jaminan Kematian ASN
9.	1.	1.	01.	012	Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD
9.	1.	1.	01.	013	Beban Tambahan Penghasilan Guru PNSD
9.	1.	1.	01.	014	Beban Tunjangan Pengamanan Persandian
9.	1.	1.	01.	015	Beban Tunjangan Khusus Guru
9.	1.	1.	02.		<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS</b>
9.	1.	1.	02.	001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
9.	1.	1.	02.	002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
9.	1.	1.	02.	003	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
9.	1.	1.	02.	004	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
9.	1.	1.	02.	005	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
9.	1.	1.	02.	006	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
9.	1.	1.	03.		<b>Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>
9.	1.	1.	03.	001	Beban Insentif Pemungutan Pajak Hotel
9.	1.	1.	03.	002	Beban Insentif Pemungutan Pajak Restoran
9.	1.	1.	03.	003	Beban Insentif Pemungutan Pajak Hiburan
9.	1.	1.	03.	004	Beban Insentif Pemungutan Pajak Reklame
9.	1.	1.	03.	005	Beban Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
9.	1.	1.	03.	006	Beban Insentif Pemungutan Pajak Parkir
9.	1.	1.	03.	007	Beban Insentif Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah
9.	1.	1.	03.	008	Beban Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
9.	1.	1.	03.	009	Beban Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9.	1.	1.	03.	010	Beban Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
9.	1.	1.	03.	011	Beban Insentif Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9.	1.	1.	04.		<b>Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>
9.	1.	1.	04.	001	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum
9.	1.	1.	04.	002	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha
9.	1.	1.	04.	003	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu
9.	1.	1.	05.		<b>Gaji dan Tunjangan DPRD</b>
9.	1.	1.	05.	001	Uang Representasi DPRD
9.	1.	1.	05.	002	Tunjangan Keluarga DPRD
9.	1.	1.	05.	003	Tunjangan Beras DPRD
9.	1.	1.	05.	004	Uang Paket DPRD

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	1.	1.	05.	005	Tunjangan Jabatan DPRD
9.	1.	1.	05.	006	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
9.	1.	1.	05.	007	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Lainnya
9.	1.	1.	05.	008	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DPRD
9.	1.	1.	05.	009	Iuran Premi Asuransi Kesehatan DPRD
9.	1.	1.	05.	010	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
9.	1.	1.	05.	011	Iuran Jaminan Kematian DPRD
9.	1.	1.	05.	012	Tunjangan Perumahan DPRD
9.	1.	1.	05.	013	Uang Jasa Pengabdian DPRD
9.	1.	1.	06.		<b>Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>
9.	1.	1.	06.	001	Gaji Pokok KDH/WKDH
9.	1.	1.	06.	002	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
9.	1.	1.	06.	003	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
9.	1.	1.	06.	004	Tunjangan Beras KDH/WKDH
9.	1.	1.	06.	005	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
9.	1.	1.	06.	006	Pembulatan Gaji KDH/WKDH
9.	1.	1.	06.	007	Iuran Premi Asuransi Kesehatan KDH/WKDH
9.	1.	1.	06.	008	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
9.	1.	1.	06.	009	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
9.	1.	1.	07.		<b>Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>
9.	1.	1.	07.	001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
9.	1.	1.	07.	002	Beban Operasional KDH/WKDH
9.	1.	1.	07.	003	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
9.	1.	1.	07.	004	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
9.	1.	1.	07.	005	Beban Tunjangan Reses DPRD
9.	1.	1.	08.		<b>Honorarium PNS</b>
9.	1.	1.	08.	001	Beban Honorarium Pengelola Keuangan
9.	1.	1.	08.	002	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.	1.	1.	08.	003	Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
9.	1.	1.	09.		<b>Honorarium Non PNS</b>
9.	1.	1.	09.	001	Beban Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS
9.	1.	1.	10.		<b>Uang Lembur</b>
9.	1.	1.	10.	001	Beban Uang Lembur PNS
9.	1.	1.	10.	002	Beban Uang Lembur Non PNS
9.	1.	1.	11.		<b>Beban Pegawai Dana BOS</b>
9.	1.	1.	11.	001	Beban Pegawai Dana BOS
9.	1.	1.	12.		<b>Beban Pegawai BLUD</b>
9.	1.	1.	12.	001	Beban Pegawai BLUD
9.	1.	2.			<b>Beban Persediaan</b>
9.	1.	2.	01.		<b>Beban Bahan</b>
9.	1.	2.	01.	001	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi
9.	1.	2.	01.	002	Beban Bahan Kimia
9.	1.	2.	01.	003	Beban Bahan Peledak
9.	1.	2.	01.	004	Beban Bahan Bakar dan Pelumas
9.	1.	2.	01.	005	Beban Bahan Baku
9.	1.	2.	01.	006	Beban Bahan Kimia Nuklir
9.	1.	2.	01.	007	Beban Barang Dalam Proses

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	1.	2.	01.	008	Beban Bahan/Bibit Tanaman
9.	1.	2.	01.	009	Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran
9.	1.	2.	01.	010	Beban Isi Tabung Gas
9.	1.	2.	01.	011	Beban Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
9.	1.	2.	01.	012	Beban Bahan Lainnya
9.	1.	2.	02.		<b>Beban Suku Cadang</b>
9.	1.	2.	02.	001	Beban Suku Cadang Alat Angkutan
9.	1.	2.	02.	002	Beban Suku Cadang Alat Besar
9.	1.	2.	02.	003	Beban Suku Cadang Alat Kedokteran
9.	1.	2.	02.	004	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium
9.	1.	2.	02.	005	Beban Suku Cadang Alat Pemancar
9.	1.	2.	02.	006	Beban Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
9.	1.	2.	02.	007	Beban Suku Cadang Alat Pertanian
9.	1.	2.	02.	008	Beban Suku Cadang Alat Bengkel
9.	1.	2.	02.	009	Beban Suku Cadang Alat Persenjataan
9.	1.	2.	02.	010	Beban Suku Cadang Lainnya
9.	1.	2.	03.		<b>Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>
9.	1.	2.	03.	001	Beban Alat Tulis Kantor
9.	1.	2.	03.	002	Beban Kertas dan Cover
9.	1.	2.	03.	003	Beban Bahan Cetak
9.	1.	2.	03.	004	Beban Benda Pos
9.	1.	2.	03.	005	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
9.	1.	2.	03.	006	Beban Bahan Komputer
9.	1.	2.	03.	007	Beban Perabot Kantor
9.	1.	2.	03.	008	Beban Alat Listrik
9.	1.	2.	03.	009	Beban Perlengkapan Dinas
9.	1.	2.	03.	010	Beban Perlengkapan perorangan lapangan (KAPORLAP) dan Perlengkapan Satwa
9.	1.	2.	03.	011	Beban Perlengkapan Pendukung Olahraga
9.	1.	2.	03.	012	Beban Souvenir/Cinderamata
9.	1.	2.	03.	013	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
9.	1.	2.	04.		<b>Beban Obat-obatan</b>
9.	1.	2.	04.	001	Beban Obat
9.	1.	2.	04.	002	Beban Obat-obatan Lainnya
9.	1.	2.	05.		<b>Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga</b>
9.	1.	2.	05.	001	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9.	1.	2.	05.	002	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9.	1.	2.	06.		<b>Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>
9.	1.	2.	06.	001	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9.	1.	2.	07.		<b>Beban Barang Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga</b>
9.	1.	2.	07.	001	Beban barang cadangan energi (Air, BBM)
9.	1.	2.	07.	002	Beban barang cadangan pangan
9.	1.	2.	08.		<b>Beban Natura dan Pakan</b>
9.	1.	2.	08.	001	Beban Natura (makanan/sembako, minuman dst)
9.	1.	2.	08.	002	Beban Pakan (pakan hewan, pakan ikan dst)
9.	1.	2.	08.	003	Beban Natura dan Pakan Lainnya
9.	1.	2.	09.		<b>Beban Barang Untuk Penelitian</b>
9.	1.	2.	09.	001	Beban Barang Untuk Penelitian Biologi
9.	1.	2.	09.	002	Beban Barang Untuk Penelitian Biologi Lainnya
9.	1.	2.	09.	003	Beban Barang Untuk Penelitian Teknologi

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	1.	2.	09.	004	Beban Barang Untuk Penelitian Lainnya
9.	1.	2.	10.		<b>Beban Barang Untuk Proses Produksi</b>
9.	1.	2.	10.	001	Beban Barang Untuk Proses Produksi
9.	1.	2.	10.	002	Beban Barang Untuk Proses Produksi Lainnya
9.	1.	2.	10.		<b>Beban Cetak</b>
9.	1.	2.	10.	001	Beban Cetak
9.	1.	3.			<b>Beban Jasa</b>
9.	1.	3.	01.		<b>Beban Jasa Kantor</b>
9.	1.	3.	01.	001	Beban telepon
9.	1.	3.	01.	002	Beban air
9.	1.	3.	01.	003	Beban listrik
9.	1.	3.	01.	004	Beban Jasa pengumuman lelang
9.	1.	3.	01.	005	Beban surat kabar/majalah
9.	1.	3.	01.	006	Beban jasa internet (sewa hosting dan broadband)
9.	1.	3.	01.	007	Beban paket/pengiriman
9.	1.	3.	01.	008	Beban Sertifikasi
9.	1.	3.	01.	009	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9.	1.	3.	01.	010	Beban Jasa Penerangan Jalan Umum
9.	1.	3.	01.	011	Beban Dokumentasi dan Publikasi
9.	1.	3.	01.	012	Beban Jasa Pemeriksaan Kesehatan
9.	1.	3.	02.		<b>Beban Jasa Pihak Ketiga</b>
9.	1.	3.	02.	001	Beban Jasa Event Organizer
9.	1.	3.	02.	002	Beban Jasa Pemusnahan
9.	1.	3.	02.	003	Beban Jasa Pihak Ketiga Lainnya
9.	1.	3.	03.		<b>Beban Jasa Konsultansi</b>
9.	1.	3.	03.	001	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
9.	1.	3.	03.	002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
9.	1.	3.	03.	003	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
9.	1.	3.	03.	004	Beban Jasa Konsultansi Lainnya
9.	1.	3.	04.		<b>Beban Premi Asuransi</b>
9.	1.	3.	04.	001	Beban Premi Asuransi Kesehatan
9.	1.	3.	04.	002	Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan
9.	1.	3.	04.	003	Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9.	1.	3.	05.		<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>
9.	1.	3.	05.	001	Beban Jasa Servis
9.	1.	3.	05.	002	Beban Penggantian Suku Cadang
9.	1.	3.	05.	003	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
9.	1.	3.	05.	004	Beban Jasa KIR, PKB, BBNKB dan STNK
9.	1.	3.	06.		<b>Beban Penggandaan</b>
9.	1.	3.	06.	001	Beban Penggandaan/fotokopi
9.	1.	3.	07.		<b>Beban Sewa</b>
9.	1.	3.	07.	001	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas/gedung/kantor/tempat/ruang pertemuan
9.	1.	3.	07.	002	Beban sewa Sarana Mobilitas Darat/Air/Udara
9.	1.	3.	07.	003	Beban Sewa Alat Berat
9.	1.	3.	07.	004	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan
9.	1.	3.	07.	005	Beban Sewa Lainnya
9.	1.	3.	08.		<b>Beban Beasiswa Pendidikan PNS</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	1.	3.	08.	001	Beban Tugas Belajar D3
9.	1.	3.	08.	002	Beban Tugas Belajar S1
9.	1.	3.	08.	003	Beban Tugas Belajar S2
9.	1.	3.	08.	004	Beban Tugas Belajar S3
9.	1.	3.	09.		<b>Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>
9.	1.	3.	09.	001	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan
9.	1.	3.	09.	002	Beban sosialisasi
9.	1.	3.	09.	003	Beban bimbingan teknis
9.	1.	3.	10.		<b>Beban Pembayaran Jasa PNS</b>
9.	1.	3.	10.	001	Beban Tenaga Ahli PNS
9.	1.	3.	10.	002	Beban Narasumber PNS
9.	1.	3.	10.	003	Beban Instruktur PNS
9.	1.	3.	10.	004	Beban Moderator PNS
9.	1.	3.	10.	005	Beban Jasa Tenaga Medis/ Paramedis PNS
9.	1.	3.	10.	006	Beban Jasa PNS Lainnya
9.	1.	3.	11.		<b>Beban Pembayaran Jasa Non PNS</b>
9.	1.	3.	11.	001	Beban Tenaga Ahli Non PNS
9.	1.	3.	11.	002	Beban Narasumber Non PNS
9.	1.	3.	11.	003	Beban Instruktur Non PNS
9.	1.	3.	11.	004	Beban Moderator Non PNS
9.	1.	3.	11.	005	Beban Jasa Tenaga Medis/ Paramedis Non PNS
9.	1.	3.	11.	006	Beban Jasa Non PNS Lainnya
9.	1.	3.	12.		<b>Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>
9.	1.	3.	12.	001	Uang untuk hadiah
9.	1.	3.	12.	002	Uang untuk penghargaan
9.	1.	3.	13.		<b>Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga/Masya</b>
9.	1.	3.	13.	001	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga
9.	1.	3.	13.	002	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat
9.	1.	3.	14.		<b>Beban Tamu Pemerintah Daerah</b>
9.	1.	3.	14.	001	Beban Tamu Pemerintah Daerah
9.	1.	3.	15.		Beban Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
9.	1.	3.	15.	001	<b>Beban Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)</b>
9.	1.	3.	16.		Beban Barang dan Jasa BLUD
9.	1.	3.	16.	001	Beban Barang dan Jasa BLUD
9.	1.	3.	17.		<b>Beban Barang dan Jasa BOS</b>
9.	1.	3.	17.	001	Beban Barang dan Jasa BOS
9.	1.	3.	18.		<b>Beban Kontribusi Organisasi atau Asosiasi Pemerintah Daerah</b>
9.	1.	3.	18.	001	Beban Kontribusi APKASI
9.	1.	4.			<b>Beban Perjalanan Dinas</b>
9.	1.	4.	01.		<b>Beban Perjalanan Dinas</b>
9.	1.	4.	01.	001	Beban perjalanan dinas dalam daerah
9.	1.	4.	01.	002	Beban perjalanan dinas luar daerah
9.	1.	4.	01.	003	Beban perjalanan dinas luar negeri
9.	1.	4.	02.		<b>Beban Pemulangan Pegawai</b>
9.	1.	4.	02.	001	Beban pemulangan pegawai yang wafat dalam tugas
9.	1.	5.			<b>Beban Pemeliharaan</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	1.	5.	01.		<b>Beban Pemeliharaan</b>
9.	1.	5.	01.	001	Beban Pemeliharaan Tanah
9.	1.	5.	01.	002	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9.	1.	5.	01.	003	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9.	1.	5.	01.	004	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9.	1.	5.	01.	005	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9.	1.	5.	01.	006	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya
9.	1.	6.			<b>Beban Bunga</b>
9.	1.	6.	01.		<b>Beban Bunga Utang Pinjaman</b>
9.	1.	6.	01.	001	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9.	1.	6.	01.	002	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9.	1.	6.	01.	003	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9.	1.	6.	01.	004	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9.	1.	6.	02.		<b>Beban Bunga Utang Obligasi</b>
9.	1.	6.	02.	001	Beban Bunga Utang Obligasi
9.	1.	6.	03.		<b>Beban Bunga Utang BLUD</b>
9.	1.	6.	03.	001	Beban Bunga Utang BLUD
9.	1.	7.			<b>Beban Subsidi</b>
9.	1.	7.	01.		<b>Beban Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga</b>
9.	1.	7.	01.	001	Beban Subsidi kepada BUMN
9.	1.	7.	01.	002	Beban Subsidi kepada BUMD
9.	1.	7.	01.	003	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
9.	1.	8.			<b>Beban Hibah</b>
9.	1.	8.	01.		<b>Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</b>
9.	1.	8.	01.	001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
9.	1.	8.	01.	002	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat di Daerah (Instansi Vertikal)
9.	1.	8.	02.		<b>Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah lainnya</b>
9.	1.	8.	02.	001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah lainnya
9.	1.	8.	03.		<b>Beban Hibah Uang kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN</b>
9.	1.	8.	03.	001	Beban Hibah Uang kepada BUMN
9.	1.	8.	03.	002	Beban Hibah Uang kepada BUMD
9.	1.	8.	04.		<b>Beban Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.</b>
9.	1.	8.	04.	001	Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga
9.	1.	8.	04.	002	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan
9.	1.	8.	05.		<b>Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</b>
9.	1.	8.	05.	001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
9.	1.	8.	05.	002	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat di Daerah (Instansi Vertikal)
9.	1.	8.	06.		<b>Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah lainnya</b>
9.	1.	8.	06.	001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah
9.	1.	8.	07.		<b>Beban Hibah Barang kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN</b>
9.	1.	8.	07.	001	Beban Hibah Barang kepada BUMN
9.	1.	8.	07.	002	Beban Hibah Barang kepada BUMD
9.	1.	8.	08.		<b>Beban Hibah Barang kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	1.	8.	08.	001	Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga
9.	1.	8.	08.	002	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan
9.	1.	8.	09.		<b>Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>
9.	1.	8.	09.	001	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)
9.	1.	8.	09.	002	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Berkarya
9.	1.	8.	09.	003	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)
9.	1.	8.	09.	004	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat (PD)
9.	1.	8.	09.	005	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
9.	1.	8.	09.	006	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)
9.	1.	8.	09.	007	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
9.	1.	8.	09.	008	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	1.	8.	09.	009	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9.	1.	8.	09.	010	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
9.	1.	8.	09.	011	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
9.	1.	8.	09.	012	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9.	1.	9.			<b>Beban Bantuan Sosial</b>
9.	1.	9.	01.		<b>Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat</b>
9.	1.	9.	01.	001	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu
9.	1.	9.	01.	002	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga
9.	1.	9.	01.	003	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok
9.	1.	9.	01.	004	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Masyarakat
9.	1.	9.	02.		<b>Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat</b>
9.	1.	9.	02.	001	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu
9.	1.	9.	02.	002	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Keluarga
9.	1.	9.	02.	003	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok
9.	1.	9.	02.	004	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Masyarakat
9.	1.	10.			<b>Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi</b>
9.	1.	10.	01.		<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
9.	1.	10.	01.	001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar
9.	1.	10.	01.	002	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu
9.	1.	10.	01.	003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Udara Tak Bermotor
9.	1.	10.	01.	004	Akumulasi Penyusutan Alat ukur
9.	1.	10.	01.	005	Akumulasi Penyusutan Alat pengolahan lainnya
9.	1.	10.	01.	006	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9.	1.	10.	01.	007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi
9.	1.	10.	01.	008	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum
9.	1.	10.	01.	009	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
9.	1.	10.	01.	010	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian
9.	1.	10.	01.	011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
9.	1.	10.	01.	012	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika
9.	1.	10.	01.	013	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin
9.	1.	10.	01.	014	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan dan Pemurnian
9.	1.	10.	01.	015	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
9.	1.	10.	01.	016	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
9.	1.	10.	01.	017	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
9.	1.	10.	01.	018	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	1.	10.	01.	019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga
9.	1.	10.	02.		<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
9.	1.	10.	02.	001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
9.	1.	10.	02.	002	Akumulasi Penyusutan Monumen
9.	1.	10.	02.	003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
9.	1.	10.	02.	004	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9.	1.	10.	03.		<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
9.	1.	10.	03.	001	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
9.	1.	10.	03.	002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
9.	1.	10.	03.	003	Akumulasi Penyusutan Instalasi
9.	1.	10.	03.	004	Akumulasi Penyusutan Jaringan
9.	1.	10.	04.		<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
9.	1.	10.	04.	001	Akumulasi Penyusutan Bahan Perpustakaan
9.	1.	10.	04.	002	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga
9.	1.	10.	04.	003	Akumulasi Penyusutan Hewan
9.	1.	10.	04.	004	Akumulasi Penyusutan Tanaman
9.	1.	10.	04.	005	Akumulasi Penyusutan Barang Koleksi Non Budaya
9.	1.	10.	05.		<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>
9.	1.	10.	05.	001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9.	1.	10.	06.		<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>
9.	1.	10.	06.	001	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
9.	1.	11.			<b>Penyisihan Piutang</b>
9.	1.	11.	01.		<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>
9.	1.	11.	01.	001	Penyisihan Piutang Pajak
9.	1.	11.	01.	002	Penyisihan Piutang Retribusi
9.	1.	11.	01.	003	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.	1.	11.	01.	004	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9.	1.	11.	01.	005	Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
9.	1.	11.	01.	006	Penyisihan Piutang Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
9.	1.	11.	01.	007	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
9.	1.	11.	01.	008	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Lainnya
9.	1.	11.	01.	009	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Lainnya
9.	1.	11.	01.	010	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Lainnya
9.	1.	11.	01.	011	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan dari Provinsi
9.	1.	11.	01.	012	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lainnya
9.	1.	11.	01.	013	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan dari Kota Lainnya
9.	1.	11.	02.		<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>
9.	1.	11.	02.	001	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9.	1.	11.	02.	002	Penyisihan Piutang Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lain
9.	2.				<b>Beban Tidak Terduga</b>
9.	2.	1.			<b>Beban Tidak Terduga</b>
9.	2.	1.	01		<b>Beban Tidak Terduga</b>
9.	2.	1.	01	001	Beban Tidak Terduga
9.	3.				<b>Beban TRANSFER</b>
9.	3.	1.			<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>
9.	3.	1.	01.		<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pa</b>



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i b n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	1.	01.	001	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah Pusat
9.	3.	1.	01.	002	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah Provinsi
9.	3.	1.	01.	003	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah Pusat
9.	3.	1.	01.	004	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi
9.	3.	1.	02.		<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lainnya</b>
9.	3.	1.	02.	001	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Lainnya
9.	3.	1.	02.	002	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Lainnya
9.	3.	1.	02.	003	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Lainnya
9.	3.	1.	02.	004	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kota Lainnya
9.	3.	1.	03.		<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa</b>
9.	3.	1.	03.	001	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bangsri
9.	3.	1.	03.	002	Beban Bagi Hasil kepada Desa Banjar Agung
9.	3.	1.	03.	003	Beban Bagi Hasil kepada Desa Banjaran
9.	3.	1.	03.	004	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bondo
9.	3.	1.	03.	005	Beban Bagi Hasil kepada Desa Guyangan
9.	3.	1.	03.	006	Beban Bagi Hasil kepada Desa Jeruk Wangi
9.	3.	1.	03.	007	Beban Bagi Hasil kepada Desa KedungLeper
9.	3.	1.	03.	008	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kepuk
9.	3.	1.	03.	009	Beban Bagi Hasil kepada Desa Papasan
9.	3.	1.	03.	010	Beban Bagi Hasil kepada Desa Srikandang
9.	3.	1.	03.	011	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tengguli
9.	3.	1.	03.	012	Beban Bagi Hasil kepada Desa Wedelan
9.	3.	1.	03.	013	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bantrung
9.	3.	1.	03.	014	Beban Bagi Hasil kepada Desa Batealit
9.	3.	1.	03.	015	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bawu
9.	3.	1.	03.	016	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bringin
9.	3.	1.	03.	017	Beban Bagi Hasil kepada Desa Geneng
9.	3.	1.	03.	018	Beban Bagi Hasil kepada Desa Mindahan
9.	3.	1.	03.	019	Beban Bagi Hasil kepada Desa Mindahan Kidul
9.	3.	1.	03.	020	Beban Bagi Hasil kepada Desa Ngasem
9.	3.	1.	03.	021	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pekalongan
9.	3.	1.	03.	022	Beban Bagi Hasil kepada Desa Raguklampitan
9.	3.	1.	03.	023	Beban Bagi Hasil kepada Desa Somosari
9.	3.	1.	03.	024	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bandungharjo
9.	3.	1.	03.	025	Beban Bagi Hasil kepada Desa Banyumanis
9.	3.	1.	03.	026	Beban Bagi Hasil kepada Desa Blingoh
9.	3.	1.	03.	027	Beban Bagi Hasil kepada Desa Clering
9.	3.	1.	03.	028	Beban Bagi Hasil kepada Desa Jugo
9.	3.	1.	03.	029	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sumberrejo
9.	3.	1.	03.	030	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tulakan
9.	3.	1.	03.	031	Beban Bagi Hasil kepada Desa Ujungwatu
9.	3.	1.	03.	032	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bandengan
9.	3.	1.	03.	033	Beban Bagi Hasil kepada Desa KedungCino
9.	3.	1.	03.	034	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kuwasen
9.	3.	1.	03.	035	Beban Bagi Hasil kepada Desa Mulyoharjo
9.	3.	1.	03.	036	Beban Bagi Hasil kepada Desa Wonorejo
9.	3.	1.	03.	037	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bakalan
9.	3.	1.	03.	038	Beban Bagi Hasil kepada Desa BandungRejo
9.	3.	1.	03.	039	Beban Bagi Hasil kepada Desa Banyuputih

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	1.	03.	040	Beban Bagi Hasil kepada Desa BatuKali
9.	3.	1.	03.	041	Beban Bagi Hasil kepada Desa Damarjati
9.	3.	1.	03.	042	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kriyan
9.	3.	1.	03.	043	Beban Bagi Hasil kepada Desa Manyargading
9.	3.	1.	03.	044	Beban Bagi Hasil kepada Desa Margoyoso
9.	3.	1.	03.	045	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pendosawalan
9.	3.	1.	03.	046	Beban Bagi Hasil kepada Desa Purwogondo
9.	3.	1.	03.	047	Beban Bagi Hasil kepada Desa Robayan
9.	3.	1.	03.	048	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sendang
9.	3.	1.	03.	049	Beban Bagi Hasil kepada Desa KarimunJawa
9.	3.	1.	03.	050	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kemujan
9.	3.	1.	03.	051	Beban Bagi Hasil kepada Desa Nyamuk
9.	3.	1.	03.	052	Beban Bagi Hasil kepada Desa Parang
9.	3.	1.	03.	053	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bugel
9.	3.	1.	03.	054	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bulak Baru
9.	3.	1.	03.	055	Beban Bagi Hasil kepada Desa Dongos
9.	3.	1.	03.	056	Beban Bagi Hasil kepada Desa Jondang
9.	3.	1.	03.	057	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kalianyar
9.	3.	1.	03.	058	Beban Bagi Hasil kepada Desa Karangaji
9.	3.	1.	03.	059	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kedung Malang
9.	3.	1.	03.	060	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kerso
9.	3.	1.	03.	061	Beban Bagi Hasil kepada Desa Menganti
9.	3.	1.	03.	062	Beban Bagi Hasil kepada Desa Panggung
9.	3.	1.	03.	063	Beban Bagi Hasil kepada Desa Rau
9.	3.	1.	03.	064	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sowon Kidul
9.	3.	1.	03.	065	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sowon Lor
9.	3.	1.	03.	066	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sukosono
9.	3.	1.	03.	067	Beban Bagi Hasil kepada Desa Surodadi
9.	3.	1.	03.	068	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tanggultlare
9.	3.	1.	03.	069	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tedunan
9.	3.	1.	03.	070	Beban Bagi Hasil kepada Desa Wanusobo
9.	3.	1.	03.	071	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bumiharjo
9.	3.	1.	03.	072	Beban Bagi Hasil kepada Desa Damarwulan
9.	3.	1.	03.	073	Beban Bagi Hasil kepada Desa Gelang
9.	3.	1.	03.	074	Beban Bagi Hasil kepada Desa Jlegong
9.	3.	1.	03.	075	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kaligarang
9.	3.	1.	03.	076	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kelet
9.	3.	1.	03.	077	Beban Bagi Hasil kepada Desa Keling
9.	3.	1.	03.	078	Beban Bagi Hasil kepada Desa Klepu
9.	3.	1.	03.	079	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kunir
9.	3.	1.	03.	080	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tempur
9.	3.	1.	03.	081	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tunahan
9.	3.	1.	03.	082	Beban Bagi Hasil kepada Desa Watuaji
9.	3.	1.	03.	083	Beban Bagi Hasil kepada Desa Balong
9.	3.	1.	03.	084	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bucu
9.	3.	1.	03.	085	Beban Bagi Hasil kepada Desa Cepogo
9.	3.	1.	03.	086	Beban Bagi Hasil kepada Desa Dermolo
9.	3.	1.	03.	087	Beban Bagi Hasil kepada Desa Dudakawu
9.	3.	1.	03.	088	Beban Bagi Hasil kepada Desa Jinggotan

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	1.	03.	089	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kaliaman
9.	3.	1.	03.	090	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kancilan
9.	3.	1.	03.	091	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pendem
9.	3.	1.	03.	092	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sumanding
9.	3.	1.	03.	093	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tubanan
9.	3.	1.	03.	094	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bandung
9.	3.	1.	03.	095	Beban Bagi Hasil kepada Desa Buaran
9.	3.	1.	03.	096	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bungu
9.	3.	1.	03.	097	Beban Bagi Hasil kepada Desa Datar
9.	3.	1.	03.	098	Beban Bagi Hasil kepada Desa Jebol
9.	3.	1.	03.	099	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kuanyar
9.	3.	1.	03.	100	Beban Bagi Hasil kepada Desa Mayong Kidul
9.	3.	1.	03.	101	Beban Bagi Hasil kepada Desa Mayong Lor
9.	3.	1.	03.	102	Beban Bagi Hasil kepada Desa Ngroto
9.	3.	1.	03.	103	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pancur
9.	3.	1.	03.	104	Beban Bagi Hasil kepada Desa Paren
9.	3.	1.	03.	105	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pelang
9.	3.	1.	03.	106	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pelemkerep
9.	3.	1.	03.	107	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pule
9.	3.	1.	03.	108	Beban Bagi Hasil kepada Desa Rajekwesi
9.	3.	1.	03.	109	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sengon Bugel
9.	3.	1.	03.	110	Beban Bagi Hasil kepada Desa Singorojo
9.	3.	1.	03.	111	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tigajuru
9.	3.	1.	03.	112	Beban Bagi Hasil kepada Desa Jambu
9.	3.	1.	03.	113	Beban Bagi Hasil kepada Desa Jambu Timur
9.	3.	1.	03.	114	Beban Bagi Hasil kepada Desa Karanggondang
9.	3.	1.	03.	115	Beban Bagi Hasil kepada Desa Mororejo
9.	3.	1.	03.	116	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sekuro
9.	3.	1.	03.	117	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sinanggul
9.	3.	1.	03.	118	Beban Bagi Hasil kepada Desa Srobyong
9.	3.	1.	03.	119	Beban Bagi Hasil kepada Desa Suwawal
9.	3.	1.	03.	120	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bategede
9.	3.	1.	03.	121	Beban Bagi Hasil kepada Desa BendanPete
9.	3.	1.	03.	122	Beban Bagi Hasil kepada Desa Blimbingrejo
9.	3.	1.	03.	123	Beban Bagi Hasil kepada Desa Daren
9.	3.	1.	03.	124	Beban Bagi Hasil kepada Desa Dorang
9.	3.	1.	03.	125	Beban Bagi Hasil kepada Desa Gemiring Kidul
9.	3.	1.	03.	126	Beban Bagi Hasil kepada Desa Gemiring Lor
9.	3.	1.	03.	127	Beban Bagi Hasil kepada Desa Jatisari
9.	3.	1.	03.	128	Beban Bagi Hasil kepada Desa Karangnongko
9.	3.	1.	03.	129	Beban Bagi Hasil kepada Desa Muryolobo
9.	3.	1.	03.	130	Beban Bagi Hasil kepada Desa Nalumsari
9.	3.	1.	03.	131	Beban Bagi Hasil kepada Desa Ngetuk
9.	3.	1.	03.	132	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pringtulis
9.	3.	1.	03.	133	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tritis
9.	3.	1.	03.	134	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tunggul Pandean
9.	3.	1.	03.	135	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bulungan
9.	3.	1.	03.	136	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kawak
9.	3.	1.	03.	137	Beban Bagi Hasil kepada Desa Lebak

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	1.	03.	138	Beban Bagi Hasil kepada Desa Mambak
9.	3.	1.	03.	139	Beban Bagi Hasil kepada Desa Plajan
9.	3.	1.	03.	140	Beban Bagi Hasil kepada Desa Slagi
9.	3.	1.	03.	141	Beban Bagi Hasil kepada Desa Suwawal Timur
9.	3.	1.	03.	142	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tanjung
9.	3.	1.	03.	143	Beban Bagi Hasil kepada Desa Gemulung
9.	3.	1.	03.	144	Beban Bagi Hasil kepada Desa Gerdu
9.	3.	1.	03.	145	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kaliombo
9.	3.	1.	03.	146	Beban Bagi Hasil kepada Desa KarangRandu
9.	3.	1.	03.	147	Beban Bagi Hasil kepada Desa Krasak
9.	3.	1.	03.	148	Beban Bagi Hasil kepada Desa Lebuawu
9.	3.	1.	03.	149	Beban Bagi Hasil kepada Desa Ngeling
9.	3.	1.	03.	150	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Kulon
9.	3.	1.	03.	151	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Wetan
9.	3.	1.	03.	152	Beban Bagi Hasil kepada Desa Pulodarat
9.	3.	1.	03.	153	Beban Bagi Hasil kepada Desa Rengging
9.	3.	1.	03.	154	Beban Bagi Hasil kepada Desa Troso
9.	3.	1.	03.	155	Beban Bagi Hasil kepada Desa Demangan
9.	3.	1.	03.	156	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kecapi
9.	3.	1.	03.	157	Beban Bagi Hasil kepada Desa Krapyak
9.	3.	1.	03.	158	Beban Bagi Hasil kepada Desa Langon
9.	3.	1.	03.	159	Beban Bagi Hasil kepada Desa Mangunan
9.	3.	1.	03.	160	Beban Bagi Hasil kepada Desa Mantingan
9.	3.	1.	03.	161	Beban Bagi Hasil kepada Desa Ngabul
9.	3.	1.	03.	162	Beban Bagi Hasil kepada Desa Peteyekan
9.	3.	1.	03.	163	Beban Bagi Hasil kepada Desa Platar
9.	3.	1.	03.	164	Beban Bagi Hasil kepada Desa Semat
9.	3.	1.	03.	165	Beban Bagi Hasil kepada Desa Senenan
9.	3.	1.	03.	166	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sukodono
9.	3.	1.	03.	167	Beban Bagi Hasil kepada Desa Tahunan
9.	3.	1.	03.	168	Beban Bagi Hasil kepada Desa TegalSambi
9.	3.	1.	03.	169	Beban Bagi Hasil kepada Desa TelukAwur
9.	3.	1.	03.	170	Beban Bagi Hasil kepada Desa Brantak Sekarjati
9.	3.	1.	03.	171	Beban Bagi Hasil kepada Desa Bugo
9.	3.	1.	03.	172	Beban Bagi Hasil kepada Desa Gedangan
9.	3.	1.	03.	173	Beban Bagi Hasil kepada Desa Gidangelo
9.	3.	1.	03.	174	Beban Bagi Hasil kepada Desa Guwo Sobokerto
9.	3.	1.	03.	175	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Kulon
9.	3.	1.	03.	176	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Wetan
9.	3.	1.	03.	177	Beban Bagi Hasil kepada Desa Karanganyar
9.	3.	1.	03.	178	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kedung Sarimulyo
9.	3.	1.	03.	179	Beban Bagi Hasil kepada Desa Kendeng Sidialit
9.	3.	1.	03.	180	Beban Bagi Hasil kepada Desa Ketileng Singolelo
9.	3.	1.	03.	181	Beban Bagi Hasil kepada Desa Sidigede
9.	3.	1.	03.	182	Beban Bagi Hasil kepada Desa Teluk Wetan
9.	3.	1.	03.	183	Beban Bagi Hasil kepada Desa Ujung Pandan
9.	3.	1.	03.	184	Beban Bagi Hasil kepada Desa Welahan
9.	3.	1.	03.	185	Beban Bagi Hasil kepada TPI
9.	3.	1.	04.		Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k e a n	U R A I A N
9.	3.	1.	04.	001	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten Lainnya
9.	3.	1.	04.	002	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kota Lainnya
9.	3.	1.	04.	003	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa
9.	3.	2.			<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan</b>
9.	3.	2.	01		<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>
9.	3.	2.	01	001	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi;
9.	3.	2.	01.	001	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
9.	3.	2.	02		<b>Beban Transfer Bantuan keuangan Kepada kabupaten/kota Lainnya</b>
9.	3.	2.	02	001	Beban Transfer Bantuan keuangan kepada Kabupaten Lainnya
9.	3.	2.	02	002	Beban Transfer Bantuan keuangan kepada Kota Lainnya
9.	3.	2.	03		<b>Beban Transfer Alokasi Dana Desa</b>
9.	3.	2.	03	001	Beban Alokasi Dana Desa Bangsri
9.	3.	2.	03	002	Beban Alokasi Dana Desa Banjar Agung
9.	3.	2.	03	003	Beban Alokasi Dana Desa Banjaran
9.	3.	2.	03	004	Beban Alokasi Dana Desa Bondo
9.	3.	2.	03	005	Beban Alokasi Dana Desa Guyangan
9.	3.	2.	03	006	Beban Alokasi Dana Desa Jerukwangi
9.	3.	2.	03	007	Beban Alokasi Dana Desa Kedungleper
9.	3.	2.	03	008	Beban Alokasi Dana Desa Kepuk
9.	3.	2.	03	009	Beban Alokasi Dana Desa Papasan
9.	3.	2.	03	010	Beban Alokasi Dana Desa Srikandang
9.	3.	2.	03	011	Beban Alokasi Dana Desa Tengguli
9.	3.	2.	03	012	Beban Alokasi Dana Desa Wedelan
9.	3.	2.	03	013	Beban Alokasi Dana Desa Bantrung
9.	3.	2.	03	014	Beban Alokasi Dana Desa Batealit
9.	3.	2.	03	015	Beban Alokasi Dana Desa Bawu
9.	3.	2.	03	016	Beban Alokasi Dana Desa Bringin
9.	3.	2.	03	017	Beban Alokasi Dana Desa Geneng
9.	3.	2.	03	018	Beban Alokasi Dana Desa Mindahan
9.	3.	2.	03	019	Beban Alokasi Dana Desa Mindahan Kidul
9.	3.	2.	03	020	Beban Alokasi Dana Desa Ngasem
9.	3.	2.	03	021	Beban Alokasi Dana Desa Pekalongan
9.	3.	2.	03	022	Beban Alokasi Dana Desa Raguklampitan
9.	3.	2.	03	023	Beban Alokasi Dana Desa Somosari
9.	3.	2.	03	024	Beban Alokasi Dana Desa Bandungharjo
9.	3.	2.	03	025	Beban Alokasi Dana Desa Banyumanis
9.	3.	2.	03	026	Beban Alokasi Dana Desa Blingoh
9.	3.	2.	03	027	Beban Alokasi Dana Desa Clering
9.	3.	2.	03	028	Beban Alokasi Dana Desa Jugo
9.	3.	2.	03	029	Beban Alokasi Dana Desa Sumberrejo
9.	3.	2.	03	030	Beban Alokasi Dana Desa Tulakan
9.	3.	2.	03	031	Beban Alokasi Dana Desa Ujungwatu
9.	3.	2.	03	032	Beban Alokasi Dana Desa Bandengan
9.	3.	2.	03	033	Beban Alokasi Dana Desa KedungCino
9.	3.	2.	03	034	Beban Alokasi Dana Desa Kuwasen
9.	3.	2.	03	035	Beban Alokasi Dana Desa Mulyoharjo
9.	3.	2.	03	036	Beban Alokasi Dana Desa Wonorejo
9.	3.	2.	03	037	Beban Alokasi Dana Desa Bakalan
9.	3.	2.	03	038	Beban Alokasi Dana Desa Bandungrejo

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	03	039	Beban Alokasi Dana Desa Banyuputih
9.	3.	2.	03	040	Beban Alokasi Dana Desa Batukali
9.	3.	2.	03	041	Beban Alokasi Dana Desa Damarjati
9.	3.	2.	03	042	Beban Alokasi Dana Desa Kriyan
9.	3.	2.	03	043	Beban Alokasi Dana Desa Manyargading
9.	3.	2.	03	044	Beban Alokasi Dana Desa Margoyoso
9.	3.	2.	03	045	Beban Alokasi Dana Desa Pendosawalan
9.	3.	2.	03	046	Beban Alokasi Dana Desa Purwogondo
9.	3.	2.	03	047	Beban Alokasi Dana Desa Robayan
9.	3.	2.	03	048	Beban Alokasi Dana Desa Sendang
9.	3.	2.	03	049	Beban Alokasi Dana Desa KarimunJawa
9.	3.	2.	03	050	Beban Alokasi Dana Desa Kemujan
9.	3.	2.	03	051	Beban Alokasi Dana Desa Nyamuk
9.	3.	2.	03	052	Beban Alokasi Dana Desa Parang
9.	3.	2.	03	053	Beban Alokasi Dana Desa Bugel
9.	3.	2.	03	054	Beban Alokasi Dana Desa Bulak Baru
9.	3.	2.	03	055	Beban Alokasi Dana Desa Dongos
9.	3.	2.	03	056	Beban Alokasi Dana Desa Jondang
9.	3.	2.	03	057	Beban Alokasi Dana Desa Kalianyar
9.	3.	2.	03	058	Beban Alokasi Dana Desa Karangaji
9.	3.	2.	03	059	Beban Alokasi Dana Desa Kedungmalang
9.	3.	2.	03	060	Beban Alokasi Dana Desa Kerso
9.	3.	2.	03	061	Beban Alokasi Dana Desa Menganti
9.	3.	2.	03	062	Beban Alokasi Dana Desa Panggung
9.	3.	2.	03	063	Beban Alokasi Dana Desa Rau
9.	3.	2.	03	064	Beban Alokasi Dana Desa Sowan Kidul
9.	3.	2.	03	065	Beban Alokasi Dana Desa Sowan Lor
9.	3.	2.	03	066	Beban Alokasi Dana Desa Sukosono
9.	3.	2.	03	067	Beban Alokasi Dana Desa Surodadi
9.	3.	2.	03	068	Beban Alokasi Dana Desa Tanggultlare
9.	3.	2.	03	069	Beban Alokasi Dana Desa Tedunan
9.	3.	2.	03	070	Beban Alokasi Dana Desa Wanusobo
9.	3.	2.	03	071	Beban Alokasi Dana Desa Bumiharjo
9.	3.	2.	03	072	Beban Alokasi Dana Desa Damarwulan
9.	3.	2.	03	073	Beban Alokasi Dana Desa Gelang
9.	3.	2.	03	074	Beban Alokasi Dana Desa Jlegong
9.	3.	2.	03	075	Beban Alokasi Dana Desa Kaligarang
9.	3.	2.	03	076	Beban Alokasi Dana Desa Kelet
9.	3.	2.	03	077	Beban Alokasi Dana Desa Keling
9.	3.	2.	03	078	Beban Alokasi Dana Desa Klepu
9.	3.	2.	03	079	Beban Alokasi Dana Desa Kunir
9.	3.	2.	03	080	Beban Alokasi Dana Desa Tempur
9.	3.	2.	03	081	Beban Alokasi Dana Desa Tunahan
9.	3.	2.	03	082	Beban Alokasi Dana Desa Watuaji
9.	3.	2.	03	083	Beban Alokasi Dana Desa Balong
9.	3.	2.	03	084	Beban Alokasi Dana Desa Bucu
9.	3.	2.	03	085	Beban Alokasi Dana Desa Cepogo
9.	3.	2.	03	086	Beban Alokasi Dana Desa Dermolo
9.	3.	2.	03	087	Beban Alokasi Dana Desa Dudakawu

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i a n	U R A I A N
9.	3.	2.	03	088	Beban Alokasi Dana Desa Jinggotan
9.	3.	2.	03	089	Beban Alokasi Dana Desa Kaliaman
9.	3.	2.	03	090	Beban Alokasi Dana Desa Kancilan
9.	3.	2.	03	091	Beban Alokasi Dana Desa Pendem
9.	3.	2.	03	092	Beban Alokasi Dana Desa Sumanding
9.	3.	2.	03	093	Beban Alokasi Dana Desa Tubanan
9.	3.	2.	03	094	Beban Alokasi Dana Desa Bandung
9.	3.	2.	03	095	Beban Alokasi Dana Desa Buaran
9.	3.	2.	03	096	Beban Alokasi Dana Desa Bungu
9.	3.	2.	03	097	Beban Alokasi Dana Desa Datar
9.	3.	2.	03	098	Beban Alokasi Dana Desa Jebol
9.	3.	2.	03	099	Beban Alokasi Dana Desa Kuanyar
9.	3.	2.	03	100	Beban Alokasi Dana Desa Mayong Kidul
9.	3.	2.	03	101	Beban Alokasi Dana Desa Mayong Lor
9.	3.	2.	03	102	Beban Alokasi Dana Desa Ngroto
9.	3.	2.	03	103	Beban Alokasi Dana Desa Pancur
9.	3.	2.	03	104	Beban Alokasi Dana Desa Paren
9.	3.	2.	03	105	Beban Alokasi Dana Desa Pelang
9.	3.	2.	03	106	Beban Alokasi Dana Desa Pelemkerep
9.	3.	2.	03	107	Beban Alokasi Dana Desa Pule
9.	3.	2.	03	108	Beban Alokasi Dana Desa Rajekwesi
9.	3.	2.	03	109	Beban Alokasi Dana Desa Sengonbugel
9.	3.	2.	03	110	Beban Alokasi Dana Desa Singorojo
9.	3.	2.	03	111	Beban Alokasi Dana Desa Tigajuru
9.	3.	2.	03	112	Beban Alokasi Dana Desa Jambu
9.	3.	2.	03	113	Beban Alokasi Dana Desa Jambu Timur
9.	3.	2.	03	114	Beban Alokasi Dana Desa Karanggondang
9.	3.	2.	03	115	Beban Alokasi Dana Desa Mororejo
9.	3.	2.	03	116	Beban Alokasi Dana Desa Sekuro
9.	3.	2.	03	117	Beban Alokasi Dana Desa Sinanggul
9.	3.	2.	03	118	Beban Alokasi Dana Desa Srobyong
9.	3.	2.	03	119	Beban Alokasi Dana Desa Suwawal
9.	3.	2.	03	120	Beban Alokasi Dana Desa Bategede
9.	3.	2.	03	121	Beban Alokasi Dana Desa BendanPete
9.	3.	2.	03	122	Beban Alokasi Dana Desa Blimbingrejo
9.	3.	2.	03	123	Beban Alokasi Dana Desa Daren
9.	3.	2.	03	124	Beban Alokasi Dana Desa Dorang
9.	3.	2.	03	125	Beban Alokasi Dana Desa Gemiring Kidul
9.	3.	2.	03	126	Beban Alokasi Dana Desa Gemiring Lor
9.	3.	2.	03	127	Beban Alokasi Dana Desa Jatisari
9.	3.	2.	03	128	Beban Alokasi Dana Desa Karangnongko
9.	3.	2.	03	129	Beban Alokasi Dana Desa Muryolobo
9.	3.	2.	03	130	Beban Alokasi Dana Desa Nalumsari
9.	3.	2.	03	131	Beban Alokasi Dana Desa Ngetuk
9.	3.	2.	03	132	Beban Alokasi Dana Desa Pringtulis
9.	3.	2.	03	133	Beban Alokasi Dana Desa Tritis
9.	3.	2.	03	134	Beban Alokasi Dana Desa Tunggulpandean
9.	3.	2.	03	135	Beban Alokasi Dana Desa Bulungan
9.	3.	2.	03	136	Beban Alokasi Dana Desa Kawak

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	03	137	Beban Alokasi Dana Desa Lebak
9.	3.	2.	03	138	Beban Alokasi Dana Desa Mambak
9.	3.	2.	03	139	Beban Alokasi Dana Desa Plajan
9.	3.	2.	03	140	Beban Alokasi Dana Desa Slagi
9.	3.	2.	03	141	Beban Alokasi Dana Desa Suwawal Timur
9.	3.	2.	03	142	Beban Alokasi Dana Desa Tanjung
9.	3.	2.	03	143	Beban Alokasi Dana Desa Gemulung
9.	3.	2.	03	144	Beban Alokasi Dana Desa Gerdu
9.	3.	2.	03	145	Beban Alokasi Dana Desa Kaliombo
9.	3.	2.	03	146	Beban Alokasi Dana Desa Karangrandu
9.	3.	2.	03	147	Beban Alokasi Dana Desa Krasak
9.	3.	2.	03	148	Beban Alokasi Dana Desa Lebuawu
9.	3.	2.	03	149	Beban Alokasi Dana Desa Ngeling
9.	3.	2.	03	150	Beban Alokasi Dana Desa Pecangaan Kulon
9.	3.	2.	03	151	Beban Alokasi Dana Desa Pecangaan Wetan
9.	3.	2.	03	152	Beban Alokasi Dana Desa Pulodarat
9.	3.	2.	03	153	Beban Alokasi Dana Desa Rengging
9.	3.	2.	03	154	Beban Alokasi Dana Desa Troso
9.	3.	2.	03	155	Beban Alokasi Dana Desa Demangan
9.	3.	2.	03	156	Beban Alokasi Dana Desa Kecapi
9.	3.	2.	03	157	Beban Alokasi Dana Desa Krapyak
9.	3.	2.	03	158	Beban Alokasi Dana Desa Langon
9.	3.	2.	03	159	Beban Alokasi Dana Desa Mangunan
9.	3.	2.	03	160	Beban Alokasi Dana Desa Mantingan
9.	3.	2.	03	161	Beban Alokasi Dana Desa Ngabul
9.	3.	2.	03	162	Beban Alokasi Dana Desa Petekeyan
9.	3.	2.	03	163	Beban Alokasi Dana Desa Platar
9.	3.	2.	03	164	Beban Alokasi Dana Desa Semat
9.	3.	2.	03	165	Beban Alokasi Dana Desa Senenan
9.	3.	2.	03	166	Beban Alokasi Dana Desa Sukodono
9.	3.	2.	03	167	Beban Alokasi Dana Desa Tahunan
9.	3.	2.	03	168	Beban Alokasi Dana Desa Tegalsambi
9.	3.	2.	03	169	Beban Alokasi Dana Desa TelukAwur
9.	3.	2.	03	170	Beban Alokasi Dana Desa Brantaksekarjati
9.	3.	2.	03	171	Beban Alokasi Dana Desa Bugo
9.	3.	2.	03	172	Beban Alokasi Dana Desa Gedangan
9.	3.	2.	03	173	Beban Alokasi Dana Desa Gidangelo
9.	3.	2.	03	174	Beban Alokasi Dana Desa Guwosobokerto
9.	3.	2.	03	175	Beban Alokasi Dana Desa Kalipucangkulon
9.	3.	2.	03	176	Beban Alokasi Dana Desa Kalipucangwetan
9.	3.	2.	03	177	Beban Alokasi Dana Desa Karanganyar
9.	3.	2.	03	178	Beban Alokasi Dana Desa Kedungsarimulyo
9.	3.	2.	03	179	Beban Alokasi Dana Desa Kendengsidialit
9.	3.	2.	03	180	Beban Alokasi Dana Desa Ketilengsingolelo
9.	3.	2.	03	181	Beban Alokasi Dana Desa Sidigede
9.	3.	2.	03	182	Beban Alokasi Dana Desa Teluk Wetan
9.	3.	2.	03	183	Beban Alokasi Dana Desa Ujungpandan
9.	3.	2.	03	184	Beban Alokasi Dana Desa Welahan
9.	3.	2.	04.		Beban Transfer Dana Desa



A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	04.	001	Beban Dana Desa Bangsri
9.	3.	2.	04.	002	Beban Dana Desa Banjar Agung
9.	3.	2.	04.	003	Beban Dana Desa Banjaran
9.	3.	2.	04.	004	Beban Dana Desa Bondo
9.	3.	2.	04.	005	Beban Dana Desa Guyangan
9.	3.	2.	04.	006	Beban Dana Desa Jerukwangi
9.	3.	2.	04.	007	Beban Dana Desa Kedungleper
9.	3.	2.	04.	008	Beban Dana Desa Kepuk
9.	3.	2.	04.	009	Beban Dana Desa Papasan
9.	3.	2.	04.	010	Beban Dana Desa Srikandang
9.	3.	2.	04.	011	Beban Dana Desa Tengguli
9.	3.	2.	04.	012	Beban Dana Desa Wedelan
9.	3.	2.	04.	013	Beban Dana Desa Bantrung
9.	3.	2.	04.	014	Beban Dana Desa Batealit
9.	3.	2.	04.	015	Beban Dana Desa Bawu
9.	3.	2.	04.	016	Beban Dana Desa Bringin
9.	3.	2.	04.	017	Beban Dana Desa Geneng
9.	3.	2.	04.	018	Beban Dana Desa Mindahan
9.	3.	2.	04.	019	Beban Dana Desa Mindahan Kidul
9.	3.	2.	04.	020	Beban Dana Desa Ngasem
9.	3.	2.	04.	021	Beban Dana Desa Pekalongan
9.	3.	2.	04.	022	Beban Dana Desa Raguklampitan
9.	3.	2.	04.	023	Beban Dana Desa Somosari
9.	3.	2.	04.	024	Beban Dana Desa Bandungharjo
9.	3.	2.	04.	025	Beban Dana Desa Banyumanis
9.	3.	2.	04.	026	Beban Dana Desa Blingoh
9.	3.	2.	04.	027	Beban Dana Desa Clering
9.	3.	2.	04.	028	Beban Dana Desa Jugo
9.	3.	2.	04.	029	Beban Dana Desa Sumberrejo
9.	3.	2.	04.	030	Beban Dana Desa Tulakan
9.	3.	2.	04.	031	Beban Dana Desa Ujungwatu
9.	3.	2.	04.	032	Beban Dana Desa Bandengan
9.	3.	2.	04.	033	Beban Dana Desa KedungCino
9.	3.	2.	04.	034	Beban Dana Desa Kuwasen
9.	3.	2.	04.	035	Beban Dana Desa Mulyoharjo
9.	3.	2.	04.	036	Beban Dana Desa Wonorejo
9.	3.	2.	04.	037	Beban Dana Desa Bakalan
9.	3.	2.	04.	038	Beban Dana Desa Bandungrejo
9.	3.	2.	04.	039	Beban Dana Desa Banyuputih
9.	3.	2.	04.	040	Beban Dana Desa Batukali
9.	3.	2.	04.	041	Beban Dana Desa Damarjati
9.	3.	2.	04.	042	Beban Dana Desa Kriyan
9.	3.	2.	04.	043	Beban Dana Desa Manyargading
9.	3.	2.	04.	044	Beban Dana Desa Margoyoso
9.	3.	2.	04.	045	Beban Dana Desa Pendosawalan
9.	3.	2.	04.	046	Beban Dana Desa Purwogondo
9.	3.	2.	04.	047	Beban Dana Desa Robayan
9.	3.	2.	04.	048	Beban Dana Desa Sendang
9.	3.	2.	04.	049	Beban Dana Desa KarimunJawa

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	04.	050	Beban Dana Desa Kemujan
9.	3.	2.	04.	051	Beban Dana Desa Nyamuk
9.	3.	2.	04.	052	Beban Dana Desa Parang
9.	3.	2.	04.	053	Beban Dana Desa Bugel
9.	3.	2.	04.	054	Beban Dana Desa Bulak Baru
9.	3.	2.	04.	055	Beban Dana Desa Dongos
9.	3.	2.	04.	056	Beban Dana Desa Jondang
9.	3.	2.	04.	057	Beban Dana Desa Kalianyar
9.	3.	2.	04.	058	Beban Dana Desa Karangaji
9.	3.	2.	04.	059	Beban Dana Desa Kedungmalang
9.	3.	2.	04.	060	Beban Dana Desa Kerso
9.	3.	2.	04.	061	Beban Dana Desa Menganti
9.	3.	2.	04.	062	Beban Dana Desa Panggung
9.	3.	2.	04.	063	Beban Dana Desa Rau
9.	3.	2.	04.	064	Beban Dana Desa Sowan Kidul
9.	3.	2.	04.	065	Beban Dana Desa Sowan Lor
9.	3.	2.	04.	066	Beban Dana Desa Sukosono
9.	3.	2.	04.	067	Beban Dana Desa Surodadi
9.	3.	2.	04.	068	Beban Dana Desa Tanggultlare
9.	3.	2.	04.	069	Beban Dana Desa Tedunan
9.	3.	2.	04.	070	Beban Dana Desa Wanusobo
9.	3.	2.	04.	071	Beban Dana Desa Bumiharjo
9.	3.	2.	04.	072	Beban Dana Desa Damarwulan
9.	3.	2.	04.	073	Beban Dana Desa Gelang
9.	3.	2.	04.	074	Beban Dana Desa Jlegong
9.	3.	2.	04.	075	Beban Dana Desa Kaligarang
9.	3.	2.	04.	076	Beban Dana Desa Kelet
9.	3.	2.	04.	077	Beban Dana Desa Keling
9.	3.	2.	04.	078	Beban Dana Desa Klepu
9.	3.	2.	04.	079	Beban Dana Desa Kunir
9.	3.	2.	04.	080	Beban Dana Desa Tempur
9.	3.	2.	04.	081	Beban Dana Desa Tunahan
9.	3.	2.	04.	082	Beban Dana Desa Watuaji
9.	3.	2.	04.	083	Beban Dana Desa Balong
9.	3.	2.	04.	084	Beban Dana Desa Bucu
9.	3.	2.	04.	085	Beban Dana Desa Cepogo
9.	3.	2.	04.	086	Beban Dana Desa Dermolo
9.	3.	2.	04.	087	Beban Dana Desa Dudakawu
9.	3.	2.	04.	088	Beban Dana Desa Jinggotan
9.	3.	2.	04.	089	Beban Dana Desa Kaliaman
9.	3.	2.	04.	090	Beban Dana Desa Kancilan
9.	3.	2.	04.	091	Beban Dana Desa Pendem
9.	3.	2.	04.	092	Beban Dana Desa Sumanding
9.	3.	2.	04.	093	Beban Dana Desa Tubanan
9.	3.	2.	04.	094	Beban Dana Desa Bandung
9.	3.	2.	04.	095	Beban Dana Desa Buaran
9.	3.	2.	04.	096	Beban Dana Desa Bungu
9.	3.	2.	04.	097	Beban Dana Desa Datar
9.	3.	2.	04.	098	Beban Dana Desa Jebol

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	04.	099	Beban Dana Desa Kuanyar
9.	3.	2.	04.	100	Beban Dana Desa Mayong Kidul
9.	3.	2.	04.	101	Beban Dana Desa Mayong Lor
9.	3.	2.	04.	102	Beban Dana Desa Ngroto
9.	3.	2.	04.	103	Beban Dana Desa Pancur
9.	3.	2.	04.	104	Beban Dana Desa Paren
9.	3.	2.	04.	105	Beban Dana Desa Pelang
9.	3.	2.	04.	106	Beban Dana Desa Pelemkerep
9.	3.	2.	04.	107	Beban Dana Desa Pule
9.	3.	2.	04.	108	Beban Dana Desa Rajekwesi
9.	3.	2.	04.	109	Beban Dana Desa Sengonbugel
9.	3.	2.	04.	110	Beban Dana Desa Singorojo
9.	3.	2.	04.	111	Beban Dana Desa Tigajuru
9.	3.	2.	04.	112	Beban Dana Desa Jambu
9.	3.	2.	04.	113	Beban Dana Desa Jambu Timur
9.	3.	2.	04.	114	Beban Dana Desa Karanggondang
9.	3.	2.	04.	115	Beban Dana Desa Mororejo
9.	3.	2.	04.	116	Beban Dana Desa Sekuro
9.	3.	2.	04.	117	Beban Dana Desa Sinanggul
9.	3.	2.	04.	118	Beban Dana Desa Srobyong
9.	3.	2.	04.	119	Beban Dana Desa Suwawal
9.	3.	2.	04.	120	Beban Dana Desa Bategede
9.	3.	2.	04.	121	Beban Dana Desa BendanPete
9.	3.	2.	04.	122	Beban Dana Desa Blimbingrejo
9.	3.	2.	04.	123	Beban Dana Desa Daren
9.	3.	2.	04.	124	Beban Dana Desa Dorang
9.	3.	2.	04.	125	Beban Dana Desa Gemiring Kidul
9.	3.	2.	04.	126	Beban Dana Desa Gemiring Lor
9.	3.	2.	04.	127	Beban Dana Desa Jatisari
9.	3.	2.	04.	128	Beban Dana Desa Karangnongko
9.	3.	2.	04.	129	Beban Dana Desa Muryolobo
9.	3.	2.	04.	130	Beban Dana Desa Nalumsari
9.	3.	2.	04.	131	Beban Dana Desa Ngetuk
9.	3.	2.	04.	132	Beban Dana Desa Pringtulis
9.	3.	2.	04.	133	Beban Dana Desa Tritis
9.	3.	2.	04.	134	Beban Dana Desa Tunggulpandean
9.	3.	2.	04.	135	Beban Dana Desa Bulungan
9.	3.	2.	04.	136	Beban Dana Desa Kawak
9.	3.	2.	04.	137	Beban Dana Desa Lebak
9.	3.	2.	04.	138	Beban Dana Desa Mambak
9.	3.	2.	04.	139	Beban Dana Desa Plajan
9.	3.	2.	04.	140	Beban Dana Desa Slagi
9.	3.	2.	04.	141	Beban Dana Desa Suwawal Timur
9.	3.	2.	04.	142	Beban Dana Desa Tanjung
9.	3.	2.	04.	143	Beban Dana Desa Gemulung
9.	3.	2.	04.	144	Beban Dana Desa Gerdu
9.	3.	2.	04.	145	Beban Dana Desa Kaliombo
9.	3.	2.	04.	146	Beban Dana Desa Karangrandu
9.	3.	2.	04.	147	Beban Dana Desa Krasak

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	04.	148	Beban Dana Desa Lebuawu
9.	3.	2.	04.	149	Beban Dana Desa Ngeling
9.	3.	2.	04.	150	Beban Dana Desa Pecangaan Kulon
9.	3.	2.	04.	151	Beban Dana Desa Pecangaan Wetan
9.	3.	2.	04.	152	Beban Dana Desa Pulodarat
9.	3.	2.	04.	153	Beban Dana Desa Rengging
9.	3.	2.	04.	154	Beban Dana Desa Troso
9.	3.	2.	04.	155	Beban Dana Desa Demangan
9.	3.	2.	04.	156	Beban Dana Desa Kecapi
9.	3.	2.	04.	157	Beban Dana Desa Krapyak
9.	3.	2.	04.	158	Beban Dana Desa Langon
9.	3.	2.	04.	159	Beban Dana Desa Mangunan
9.	3.	2.	04.	160	Beban Dana Desa Mantingan
9.	3.	2.	04.	161	Beban Dana Desa Ngabul
9.	3.	2.	04.	162	Beban Dana Desa Petekeyan
9.	3.	2.	04.	163	Beban Dana Desa Platar
9.	3.	2.	04.	164	Beban Dana Desa Semat
9.	3.	2.	04.	165	Beban Dana Desa Senenan
9.	3.	2.	04.	166	Beban Dana Desa Sukodono
9.	3.	2.	04.	167	Beban Dana Desa Tahunan
9.	3.	2.	04.	168	Beban Dana Desa Tegalsambi
9.	3.	2.	04.	169	Beban Dana Desa TelukAwur
9.	3.	2.	04.	170	Beban Dana Desa Brantaksekarjati
9.	3.	2.	04.	171	Beban Dana Desa Bugo
9.	3.	2.	04.	172	Beban Dana Desa Gedangan
9.	3.	2.	04.	173	Beban Dana Desa Gidangelo
9.	3.	2.	04.	174	Beban Dana Desa Guwosobokerto
9.	3.	2.	04.	175	Beban Dana Desa Kalipucangkulon
9.	3.	2.	04.	176	Beban Dana Desa Kalipucangwetan
9.	3.	2.	04.	177	Beban Dana Desa Karanganyar
9.	3.	2.	04.	178	Beban Dana Desa Kedungsarimulyo
9.	3.	2.	04.	179	Beban Dana Desa Kendengsidialit
9.	3.	2.	04.	180	Beban Dana Desa Ketilengsingolelo
9.	3.	2.	04.	181	Beban Dana Desa Sidigede
9.	3.	2.	04.	182	Beban Dana Desa Teluk Wetan
9.	3.	2.	04.	183	Beban Dana Desa Ujungpandan
9.	3.	2.	04.	184	Beban Dana Desa Welahan
9.	3.	2.	05.		<b>Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa</b>
9.	3.	2.	05.	001	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bangsri
9.	3.	2.	05.	002	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Banjar Agung
9.	3.	2.	05.	003	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Banjaran
9.	3.	2.	05.	004	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bondo
9.	3.	2.	05.	005	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Guyangan
9.	3.	2.	05.	006	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jerukwangi
9.	3.	2.	05.	007	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kedungleper
9.	3.	2.	05.	008	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kepuk
9.	3.	2.	05.	009	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Papasan
9.	3.	2.	05.	010	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Srikandang
9.	3.	2.	05.	011	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tengguli

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	05.	012	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Wedelan
9.	3.	2.	05.	013	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bantrung
9.	3.	2.	05.	014	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Batealit
9.	3.	2.	05.	015	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bawu
9.	3.	2.	05.	016	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bringin
9.	3.	2.	05.	017	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Geneng
9.	3.	2.	05.	018	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mindahan
9.	3.	2.	05.	019	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mindahan Kidul
9.	3.	2.	05.	020	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngasem
9.	3.	2.	05.	021	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pekalongan
9.	3.	2.	05.	022	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Raguklampitan
9.	3.	2.	05.	023	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Somosari
9.	3.	2.	05.	024	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bandungharjo
9.	3.	2.	05.	025	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Banyumanis
9.	3.	2.	05.	026	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Blingoh
9.	3.	2.	05.	027	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Clering
9.	3.	2.	05.	028	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jugo
9.	3.	2.	05.	029	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sumberrejo
9.	3.	2.	05.	030	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tulakan
9.	3.	2.	05.	031	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ujungwatu
9.	3.	2.	05.	032	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bandengan
9.	3.	2.	05.	033	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa KedungCino
9.	3.	2.	05.	034	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kuwasen
9.	3.	2.	05.	035	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mulyoharjo
9.	3.	2.	05.	036	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Wonorejo
9.	3.	2.	05.	037	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bakalan
9.	3.	2.	05.	038	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bandungrejo
9.	3.	2.	05.	039	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Banyuputih
9.	3.	2.	05.	040	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Batukali
9.	3.	2.	05.	041	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Damarjati
9.	3.	2.	05.	042	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kriyan
9.	3.	2.	05.	043	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Manyargading
9.	3.	2.	05.	044	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Margoyoso
9.	3.	2.	05.	045	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pendosawalan
9.	3.	2.	05.	046	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Purwogondo
9.	3.	2.	05.	047	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Robayan
9.	3.	2.	05.	048	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sendang
9.	3.	2.	05.	049	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa KarimunJawa
9.	3.	2.	05.	050	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kemujan
9.	3.	2.	05.	051	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Nyamuk
9.	3.	2.	05.	052	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Parang
9.	3.	2.	05.	053	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bugel
9.	3.	2.	05.	054	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bulak Baru
9.	3.	2.	05.	055	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Dongos
9.	3.	2.	05.	056	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jondang
9.	3.	2.	05.	057	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kalianyar
9.	3.	2.	05.	058	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karangaji
9.	3.	2.	05.	059	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kedungmalang
9.	3.	2.	05.	060	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kerso

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	05.	061	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Menganti
9.	3.	2.	05.	062	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Panggung
9.	3.	2.	05.	063	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Rau
9.	3.	2.	05.	064	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sowon Kidul
9.	3.	2.	05.	065	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sowon Lor
9.	3.	2.	05.	066	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sukosono
9.	3.	2.	05.	067	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Surodadi
9.	3.	2.	05.	068	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tanggultlare
9.	3.	2.	05.	069	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tedunan
9.	3.	2.	05.	070	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Wanusobo
9.	3.	2.	05.	071	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bumiharjo
9.	3.	2.	05.	072	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Damarwulan
9.	3.	2.	05.	073	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gelang
9.	3.	2.	05.	074	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jlegong
9.	3.	2.	05.	075	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kaligarang
9.	3.	2.	05.	076	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kelet
9.	3.	2.	05.	077	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Keling
9.	3.	2.	05.	078	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Klepu
9.	3.	2.	05.	079	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kunir
9.	3.	2.	05.	080	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tempur
9.	3.	2.	05.	081	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tunahan
9.	3.	2.	05.	082	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Watuaji
9.	3.	2.	05.	083	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Balong
9.	3.	2.	05.	084	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bucu
9.	3.	2.	05.	085	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Cepogo
9.	3.	2.	05.	086	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Dermolo
9.	3.	2.	05.	087	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Dudakawu
9.	3.	2.	05.	088	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jinggotan
9.	3.	2.	05.	089	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kaliaman
9.	3.	2.	05.	090	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kancilan
9.	3.	2.	05.	091	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pendem
9.	3.	2.	05.	092	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sumanding
9.	3.	2.	05.	093	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tubanan
9.	3.	2.	05.	094	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bandung
9.	3.	2.	05.	095	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Buaran
9.	3.	2.	05.	096	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bungu
9.	3.	2.	05.	097	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Datar
9.	3.	2.	05.	098	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jebol
9.	3.	2.	05.	099	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kuanyar
9.	3.	2.	05.	100	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mayong Kidul
9.	3.	2.	05.	101	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mayong Lor
9.	3.	2.	05.	102	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngroto
9.	3.	2.	05.	103	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pancur
9.	3.	2.	05.	104	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Paren
9.	3.	2.	05.	105	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pelang
9.	3.	2.	05.	106	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pelemkerep
9.	3.	2.	05.	107	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pule
9.	3.	2.	05.	108	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Rajekwesi
9.	3.	2.	05.	109	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sengonbugel

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R o b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	05.	110	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Singorojo
9.	3.	2.	05.	111	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tigajuru
9.	3.	2.	05.	112	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jambu
9.	3.	2.	05.	113	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jambu Timur
9.	3.	2.	05.	114	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karanggonḡndang
9.	3.	2.	05.	115	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mororejo
9.	3.	2.	05.	116	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sekuro
9.	3.	2.	05.	117	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sinanggul
9.	3.	2.	05.	118	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Srobyong
9.	3.	2.	05.	119	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Suwawal
9.	3.	2.	05.	120	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bategede
9.	3.	2.	05.	121	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa BendanPete
9.	3.	2.	05.	122	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Blimbingrejo
9.	3.	2.	05.	123	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Daren
9.	3.	2.	05.	124	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Dorang
9.	3.	2.	05.	125	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gemiring Kidul
9.	3.	2.	05.	126	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gemiring Lor
9.	3.	2.	05.	127	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Jatisari
9.	3.	2.	05.	128	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karangnongko
9.	3.	2.	05.	129	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Muryolobo
9.	3.	2.	05.	130	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Nalumsari
9.	3.	2.	05.	131	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngetuk
9.	3.	2.	05.	132	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pringtulis
9.	3.	2.	05.	133	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tritis
9.	3.	2.	05.	134	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tunggulpandean
9.	3.	2.	05.	135	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bulungan
9.	3.	2.	05.	136	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kawak
9.	3.	2.	05.	137	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Lebak
9.	3.	2.	05.	138	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mambak
9.	3.	2.	05.	139	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Plajan
9.	3.	2.	05.	140	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Slagi
9.	3.	2.	05.	141	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Suwawal Timur
9.	3.	2.	05.	142	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tanjung
9.	3.	2.	05.	143	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gemulung
9.	3.	2.	05.	144	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gerdu
9.	3.	2.	05.	145	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kaliombo
9.	3.	2.	05.	146	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karangrandu
9.	3.	2.	05.	147	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Krasak
9.	3.	2.	05.	148	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Lebuawu
9.	3.	2.	05.	149	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngeling
9.	3.	2.	05.	150	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pecangaan Kulon
9.	3.	2.	05.	151	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pecangaan Wetan
9.	3.	2.	05.	152	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pulodarat
9.	3.	2.	05.	153	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Rengging
9.	3.	2.	05.	154	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Troso
9.	3.	2.	05.	155	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Demangan
9.	3.	2.	05.	156	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kecapi
9.	3.	2.	05.	157	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Krapyak
9.	3.	2.	05.	158	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Langon

A k u n	K e l o m p o k	J e n i s	O b y e k	R O b i n y e c i k a n	U R A I A N
9.	3.	2.	05.	159	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mangunan
9.	3.	2.	05.	160	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Mantingan
9.	3.	2.	05.	161	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ngabul
9.	3.	2.	05.	162	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Petekeyan
9.	3.	2.	05.	163	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Platar
9.	3.	2.	05.	164	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Semat
9.	3.	2.	05.	165	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Senenan
9.	3.	2.	05.	166	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sukodono
9.	3.	2.	05.	167	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahunan
9.	3.	2.	05.	168	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tegalsambi
9.	3.	2.	05.	169	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa TelukAwur
9.	3.	2.	05.	170	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Brantaksekarjati
9.	3.	2.	05.	171	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bugo
9.	3.	2.	05.	172	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gedangan
9.	3.	2.	05.	173	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Gidangelo
9.	3.	2.	05.	174	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Guwosobokerto
9.	3.	2.	05.	175	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kalipucangkulon
9.	3.	2.	05.	176	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kalipucangwetan
9.	3.	2.	05.	177	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Karanganyar
9.	3.	2.	05.	178	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kedungsarimulyo
9.	3.	2.	05.	179	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kendengsidialit
9.	3.	2.	05.	180	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ketilengsingolelo
9.	3.	2.	05.	181	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sidigede
9.	3.	2.	05.	182	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Teluk Wetan
9.	3.	2.	05.	183	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ujungpandan
9.	3.	2.	05.	184	Beban Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Welahan
9.	3.	3.			<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>
9.	3.	3.	01.		Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9.	3.	3.	01.	001	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Pt. BUPATI JEPARA  
WAKIL BUPATI,

  
DIAN KRISTIANDI



**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI**

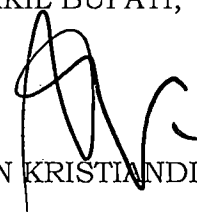
<b>Kode</b>	<b>Urusan/OPD</b>
<b>1</b>	<b>WAJIB PELAYANAN DASAR</b>
<b>1 01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1 01 01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 01 02	SMPN 1 KARIMUN JAWA
1 01 03	SMPN 2 KARIMUNJAWA
1 01 04	SMPN 1 KELING
1 01 05	SMPN 1 DONOROJO
1 01 06	SMPN 2 DONOROJO
1 01 07	SMPN 2 KELING
1 01 08	SMPN 1 BANGSRI
1 01 09	SMPN 2 BANGSRI
1 01 10	SMPN 1 KEMBANG
1 01 11	SMPN 2 KEMBANG
1 01 12	SMPN 3 KEMBANG
1 01 13	SMPN 4 KEMBANG
1 01 14	SMPN 1 MLONGGO
1 01 15	SMPN 1 PAKIS AJI
1 01 16	SMPN 2 PAKIS AJI
1 01 17	SMPN 1 JEPARA
1 01 18	SMPN 2 JEPARA
1 01 19	SMPN 3 JEPARA
1 01 20	SMPN 4 JEPARA
1 01 21	SMPN 5 JEPARA
1 01 22	SMPN 6 JEPARA
1 01 23	SMPN 1 TAHUNAN
1 01 24	SMPN 1 BATEALIT
1 01 25	SMPN 2 BATEALIT
1 01 26	SMPN 3 BATEALIT
1 01 27	SMPN 1 KEDUNG
1 01 28	SMPN 2 KEDUNG
1 01 29	SMPN 3 KEDUNG
1 01 30	SMPN 1 PECANGAAN
1 01 31	SMPN 2 PECANGAAN
1 01 32	SMPN 1 KALINYAMATAN
1 01 33	SMPN 2 KALINYAMATAN
1 01 34	SMPN 1 WELAHAN
1 01 35	SMPN 2 WELAHAN
1 01 36	SMPN 3 WELAHAN
1 01 37	SMPN 1 MAYONG
1 01 38	SMPN 2 MAYONG
1 01 39	SMPN 1 NALUMSARI
1 01 40	SMPN 2 NALUMSARI
1 01 41	SKB BATEALIT
<b>1 02</b>	<b>KESEHATAN</b>
1 02 01	DINAS KESEHATAN
1 02 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 03	PUSKESMAS KELING I
1 02 04	PUSKESMAS KELING II
1 02 05	PUSKESMAS BANGSRI I

Kode	Urusan/OPD
1 02 06	PUSKESMAS BANGSRI II
1 02 07	PUSKESMAS KEMBANG
1 02 08	PUSKESMAS MLONGGO
1 02 09	PUSKESMAS PAKISAJI
1 02 10	PUSKESMAS JEPARA
1 02 11	PUSKESMAS TAHUNAN
1 02 12	PUSKESMAS BATEALIT
1 02 13	PUSKESMAS KEDUNG I
1 02 14	PUSKESMAS KEDUNG II
1 02 15	PUSKESMAS PECANGAAN
1 02 16	PUSKESMAS KALINYAMATAN
1 02 17	PUSKESMAS WELAHAN I
1 02 18	PUSKESMAS WELAHAN II
1 02 19	PUSKESMAS MAYONG I
1 02 20	PUSKESMAS MAYONG II
1 02 21	PUSKESMAS NALUMSARI
1 02 22	PUSKESMAS KARIMUNJAWA
1 02 23	PUSKESMAS DONOROJO
<b>1 03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1 04</b>	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>
1 04 01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
<b>1 05</b>	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
1 05 05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>1 05 03</b>	<b>SOSIAL</b>
1 06 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>2</b>	<b>WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>
<b>2 01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>
2 01 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>2 02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
2 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>2 03</b>	<b>PANGAN</b>
2 03 01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
<b>2 04</b>	<b>PERTANAHAN</b>
<b>2 05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>
2 05 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2 06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
2 06 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>2 07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
<b>2 08</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
<b>2 09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>
2 09 01	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2 10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
2 10 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2 11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>

Kode	Urusan/OPD
<b>2 12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>
2 12 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>213</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>
<b>214</b>	<b>STATISTIK</b>
<b>215</b>	<b>PERSANDIAN</b>
<b>2 16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>
2 16 01	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
<b>2 17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>
2 17 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>2 18</b>	<b>KEARSIPAN</b>
<b>3</b>	<b>PILIHAN</b>
<b>3 01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
3 01 01	DINAS PERIKANAN
<b>3 02</b>	<b>PARIWISATA</b>
<b>3 03</b>	<b>PERTANIAN</b>
<b>3 04</b>	<b>KEHUTANAN</b>
<b>3 05</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
<b>3 06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>
3 06 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
<b>3 07</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>
<b>3 08</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>
<b>4</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4 01</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>
4 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>4 02</b>	<b>KEUANGAN</b>
4 02 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>4 03</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>
4 03 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
<b>404</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
<b>4 05</b>	<b>FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>
4 05 01	SEKRETARIAT DAERAH
4 05 02	SEKRETARIAT DPRD
4 05 03	INSPEKTORAT KABUPATEN
4 05 04	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 05 05	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Kode	Urusan/OPD
4 05 06	KECAMATAN KEDUNG
4 05 07	KECAMATAN PECANGAAN
4 05 08	KECAMATAN KALINYAMATAN
4 05 09	KECAMATAN WELAHAN
4 05 10	KECAMATAN MAYONG
4 05 11	KECAMATAN NALUMSARI
4 05 12	KECAMATAN BATEALIT
4 05 13	KECAMATAN TAHUNAN
4 05 14	KECAMATAN JEPARA
4 05 15	KECAMATAN MLONGGO
4 05 16	KECAMATAN PAKIS AJI
4 05 17	KECAMATAN BANGSRI
4 05 18	KECAMATAN KEMBANG
4 05 19	KECAMATAN KELING
4 05 20	KECAMATAN DONOROJO
4 05 21	KECAMATAN KARIMUNJAWA

Plt. BUPATI JEPARA  
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI